

**KEEFEKTIFAN PENERAPAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP) DALAM
PEMBANGUNAN DESA UNTUK
PENGENTASAN KEMISKINAN**

**(STUDI PADA DESA NGADIRENGGA KECAMATAN WLINGI
KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ALVANDA CHRISNA DEWANTI

105030507111010



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

MALANG

2014

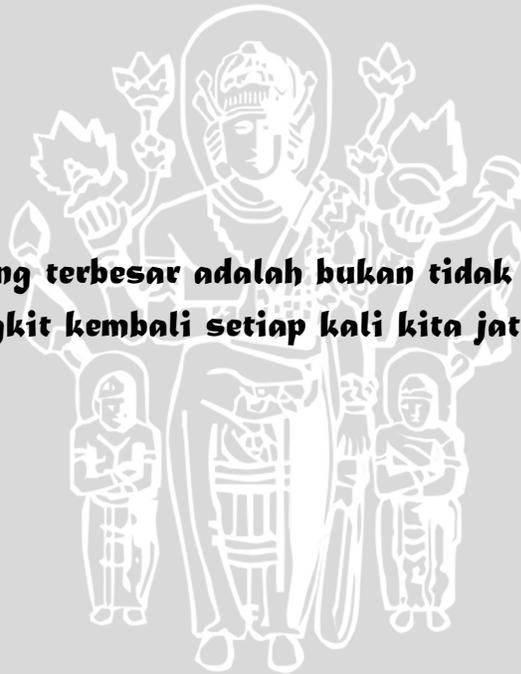
MOTTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confucius)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Efektivitas Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)

DISUSUN OLEH : ALVANDA CHRISNA DEWANTI

NIM : 105030507111010

FAKULTAS : ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI : ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Malang, 12 Juni 2014

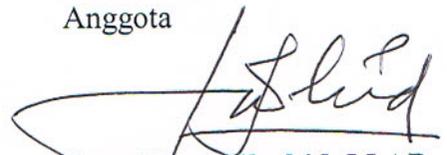
KOMISI PEMBIMBING

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Abdul Wachid, M.AP
19561209 198703 1 008

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 08 Juli 2014
Jam : 09.00
Skripsi atas nama : Alvanda Chrisna Dewanti
Judul : Keefektifan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)

Dan dinyatakan lulus

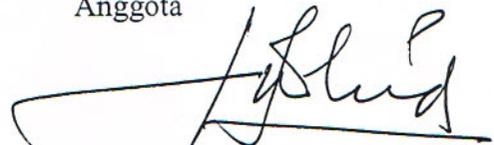
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



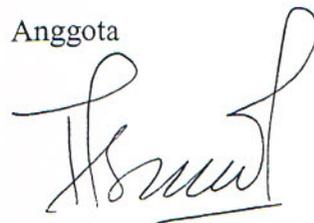
Drs. Abdul Wachid, MAP
NIP. 19561209 198703 1 008

Ketua



Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si
NIP. 19610202 198503 1 006

Anggota



Trisnawati, S.Sos, M.AP
NIP. 19800307 200801 2 012

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 24 Juni 2014



Nama : Alvanda Chrisna Dewanti

NIM : 105030507111010

RINGKASAN

Alvanda Chrisna Dewanti, 2010, **Keefektifan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan** (studi pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar), Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP, 161 halaman

Penelitian ini dilakukan atas dasar tingkat kemiskinan menjadi permasalahan utama di negara Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk pengentasan kemiskinan bahkan sampai pada sistem pemerintahan terkecil yaitu desa. Adanya pembangunan pada pedesaan diharapkan mampu membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di negara Indonesia karena keberhasilan pembangunan nasional dapat diukur berdasarkan seberapa besar perkembangan pembangunan di pedesaan. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan terhadap masyarakat desa untuk terus berkembang dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan pada tahun 2007 presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program pemberdayaan bagi masyarakat dalam tingkat nasional yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program pemberdayaan masyarakat ini merupakan program nasional yang diberikan wewenangnya untuk semua daerah yang ada di Indonesia termasuk wilayah-wilayah pedesaan.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam metode penelitian ini melakukan pengamatan langsung pada objek yang bertujuan untuk menggambarkan suatu kondisi atau fenomena secara sistematis dalam bentuk kalimat atau tertulis yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku berbagai hal yang ada relevansinya dengan pelaksanaan program pemerintah yang juga di kembangkan di tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Dalam penelitian ini diperlukan fokus penelitian sebagai pemilihan pokok permasalahan awal untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) adalah Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan belum berjalan secara efektif yang dikarenakan rencana dengan realisasi kurang berjalan dengan maksimal. Kurangnya respon yang baik dari masyarakat juga menjadi kendala dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ini karena masyarakat desa merupakan objek utama dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya kerjasama yang baik dalam menjalankan tanggung jawab pelaksanaan program kegiatan juga menjadi salah satu faktor bahwa program nasional pemberdayaan masyarakat ini belum berjalan secara efektif. Pemantauan yang baik dari koordinator PNPM Mandiri Pedesaan ini tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat desa tidak ikut berpartisipasi dalam program

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya rencana yang baik dalam program pemberdayaan masyarakat dan realisasi program yang maksimal akan membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.



SUMMARY

Alvanda Chrisna Dewanti, 2010, **The Effectiveness of The Application of National Program of Community Empowerment for Rural Self-Support (PNPM MP) In the Rural Development for Poverty Eradication** (Study at Ngadirengga Village, Wlingi Subdistrict, Blitar District), Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Abdul Wachid, M.AP, 161 pages.

Research background is that poverty is a main problem faced by Indonesia. Some measures have been taken to eradicate poverty in the lowest government level, which is village. The development of village is expected to help reducing poverty because national development is always measured based on how good is the development of village. Therefore, rural community must be empowered at least to reduce their dependence on other. or that we need the empowerment of the rural population to continue to grow and reduce reliance on other parties. To solve the problem of poverty in 2007, President Susilo Bambang Yudhoyono launched a program for community empowerment at the national level, the National Program communities Empowerment (PNPM). The empowerment program is a national program that granted authority for all regions in Indonesia, including rural areas.

Research method is qualitative with descriptive approach. This method of direct observation on the object that is intended to describe a condition or phenomenon systematically in the form of a written sentence or who have a deep meaning derived from informants and conduct various matters relevant to the implementation of government programs are also developed at the level of government bottom that village. In this research, the focus of research is required as the initial election at issue to be researched and how to focus it. Study sites were selected in the study of the National Program of Rural Community Empowerment (PNPM Rural) is a village of the District Ngadirengga Wlingi.

Result of research indicates that the application of national program of community empowerment for rural self-support has been not yet effective because the plan is not corresponding with the realization. Lack of good response from the community is also an obstacle to the success of the community empowerment program for rural communities is the main object in the implementation of the program of activities pemberdayaan community. Lack of good cooperation in carrying out the responsibility of implementing the program of activities is also one of the factors that the national community empowerment program is not effective. Good monitoring of PNPM Rural coordinator will not run properly if the villagers did not participate in program activities pemberdayaan masyarakat. With the plan in both the community development program and the realization of the maximum program will help alleviate poverty in Indonesia.



*Kupersembahkan Karyaku
Kepada Papa dan Mamaku Tercinta
Untuk Adikku Tersayang
Semua Sahabat-sahabatku
Serta Seseorang yang spesial*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keefektifan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) Dalam Pembangunan Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak, Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Ratih Nur Pratiwi, Dr. M,Si selaku Ketua Komisi Pembimbing
4. Bapak Abdul Wachid, Drs. M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
6. Bapak Ady Sutrisno, selaku Kepala Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang telah mengizinkan melakukan penelitian
7. Bapak, Anjar Sumariono selaku pelaku BKM Desa Ngadirengga yang telah bersedia berbagi pengetahuan
8. Ibu Rini, selaku Anggota UPK yang telah bersedia berbagi ilmu dan pengetahuannya
9. Seluruh perangkat Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang telah membantu selama penelitian

10. Papa (Bagus Kuntjoro) dan mamaku (Rina Suryaningtyas) tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi untukku
11. Adikku satu-satunya (Grandis Ardila Gumilang) yang memberikan supportnya
12. Seluruh keluarga besarku yang juga tidak lupa untuk selalu memberikan motivasinya
13. Keluarga besar Chibikust (trias, luluk, vero, leni, silvi) yang memberikan motivasi dukungannya untuk segera menyelesaikan skripsi ini
14. Keluarga Matahari (novita, dela, dita, resa) yang memberikan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini
15. Keluarga besar DC (fiky,merita, nanda, vina, sheila, putri, fitri, osil) yang telah memberikan dukungannya.
16. Untuk Fasta Agustia Ruli Tagunar yang selama ini telah memberikan motivasi dan supportnya dan menjadi tempat berbagi cerita sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Seluruh rekan-rekan angkatan 2010 administrasi pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 27 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN	
TANDA PENGESAHAN	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN.....	i
SUMMARY.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Administrasi Desa.....	11
1. Pengertian Administrasi Desa.....	11
2. Macam Administrasi Desa.....	12
B. Administrasi Pemerintahan Desa.....	13
1. Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa.....	13
2. Penyelenggaraan Administrasi Desa.....	14
C. Pembangunan Desa.....	16
1. Pengertian Pembangunan Desa.....	16
2. Pendekatan Dalam Pembangunan Desa.....	20
D. Kemiskinan.....	21
1. Pengertian Kemiskinan.....	21
2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan.....	23
E. Pemberdayaan Masyarakat.....	24
1. Pengertian Pemberdayaan.....	24
2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	26
3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	28
F. PNPM Mandiri Pedesaan.....	29
1. Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan.....	29
2. Kelembagaan Dalam PNPM Mandiri Pedesaan.....	32

3. Jenis Bantuan Di Tingkat Masyarakat.....	34
4. Kegiatan Dalam Siklus PNPM mandiri Pedesaan	35
5. Kegiatan Pengembangan Kapasitas	36
6. Kriteria dan Jenis Kegiatan.....	38
G. Efektivitas.....	39
1. Pengertian Efektivitas.....	39
2. Ukuran Efektivitas.....	40
3. Indikator Efektivitas Kerja	42
4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Fokus Penelitian	47
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	50
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian.....	54
G. Analisis Data.....	56

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	59
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
a. Kondisi Geografis dan Administrasi Desa Ngadirengga.....	59
b. Demografi	61
1. Jumlah Penduduk.....	61
2. Mata Pencarian penduduk	62
c. Pemerintahan Desa	64
B. Penyajian Data	70
1. Efektivitas Penerapan PNPM Mandiri Pedesaan	70
a. Perencanaan Kegiatan Program	72
b. Pencapaian dan Ketepatan Kegiatan	83
c. Keterlibatan Para Aktor	106
d. Soialisasi Terhadap Sasaran Program.....	111
e. Pemantauan Dalam Pelaksanaan Program.....	113
f. Penerimaan Masyarakat Terhadap Program	115
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program.....	118
a. Faktor pendukung.....	119
1. Petunjuk teknis	119
2. Sarana prasarana.....	121
b. Faktor penghambat	124
3. Keterlibatan Para Aktor	124
4. Keterbatasan Penyaluran Dana.....	126
C. Pembahasan.....	129
1. Efektivitas Penerapan PNPM mandiri Pedesaan	129

a.	Perencanaan Kegiatan Program	130
b.	Pencapaian dan Ketepatan Kegiatan	135
c.	Keterlibatan Para Aktor	141
d.	Sosialisasi Terhadap Sasaran Program	143
e.	Pemantauan Dalam Pelaksanaan Program	144
f.	Penerimaan Masyarakat Terhadap Program	145
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Program	148
a.	Faktor Pendukung	149
1.	Petunjuk Teknis	149
2.	Sarana Prasarana	152
b.	Faktor Penghambat	153
1.	Keterlibatan Para Aktor	153
2.	Keterbatasan Penyaluran Dana	156

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	159
B.	Saran	162

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Keadaan Topografi Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	61
2.	Keadaan Demografi Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	62
3	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Ngadirengga Tahun 2011	63
4	Data Aparatur Pemerintahan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	66
5	Data Jumlah Usia Aparatur Pemerintahan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	68
6	Alternatif Rencana Kegiatan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	74
7	Usulan Kegiatan Masyarakat Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	76
8	Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Masuk Dalam Rencana Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011	77
9	Total Perkiraan Biaya Rencana Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011	81
10	Pelaksanaan Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	86
11	Total Biaya Untuk Usulan Kegiatan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	101



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Peta Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011	60
2	Pembangunan Aspal Jalan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	89
3	Pembangunan Makadam Jalan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	90
4	Pembangunan Rabat Jalan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	91
5	Pembangunan Plengsengan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	93
6	Pembangunan Parit/ Drainase Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	94
7	Pembangunan Rehab Rumah Warga Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	95
8	Pembuatan Pupuk Kompos Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	97
9	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	98
10	Siklus Pemilihan Anggota BKM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Tahun 2011	108



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1.	Matrik Susunan Rencana Program Kegiatan PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011	165
2.	Rencana Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Periode Tahun 2011 – Tahun 2013	167
3.	Matriks Persoalan Kemiskinan dan Daftar Prioritas Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011	176
4.	Pelaksanaan Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar Periode Tahun 2011 – Tahun 2013	179
5.	Matrik Susunan Pelaksanaan Program Kegiatan PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011-2013	193
6.	Pedoman Wawancara	195



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pembangunan Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional ini merupakan proses jangka panjang yang dilakukan agar memperoleh hasil yang optimal. Tujuan nasional sendiri dapat tercapai dengan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dengan adanya keterlibatan dan tanggungjawab dari seluruh lapisan masyarakat.

Proses pembangunan saat ini tidak hanya pada pembangunan tingkat nasional namun telah sampai pada tingkat desa. Dimana berdasarkan catatan statistik masyarakat Indonesia 80 % bertempat tinggal di pedesaan sehingga pembangunan desa juga penting dilakukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa mengingat jumlah penduduk yang besar dan potensi alam yang dimiliki di daerah pedesaan. Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa yaitu :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat, berdasarkan yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat berdasarkan seberapa besar perkembangan pembangunan desa karena melihat eksistensi pembangunan di pedesaan juga akan mempengaruhi pembangunan di tingkat nasional. Menurut Suryono (2010;4) bahwa pada dasarnya pembangunan desa ini dilakukan karena memiliki arti yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik secara lahir maupun batin yang meliputi seluruh pembangunan ideologi, keamanan, agama, sosial budaya, ekonomi, politik yang berlangsung di wilayah pemerintahan terendah yaitu desa yang dilaksanakan untuk mengembangkan swadaya gotong royong di lingkungan masyarakat tersebut. Dengan adanya pembangunan yang menunjang kesejahteraan masyarakat yang ada di pedesaan maka akan berpengaruh bagi pembangunan nasional.

Pembangunan pedesaan bukan hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat saja. Namun menurut Rahardjo (2013;13) pemerintah Indonesia maupun organisasi non pemerintah mengatakan bahwa pembangunan pedesaan itu sangat penting untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan sejak dimulainya Pelita I sampai saat ini, pembangunan pedesaan telah dilaksanakan melalui pengembangan lembaga-lembaga pedesaan, pembangunan infrastruktur pedesaan, kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial dan budaya serta berbagai program untuk keberhasilan dalam pembangunan desa.

Berbagai program pembangunan desa terus dilaksanakan dan diarahkan kepada pemerintahan desa dengan tujuan untuk pengembangan desa dan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Namun pada kenyataannya program pembangunan desa kurang mendapat hasil yang optimal sehingga masih banyak masyarakat yang khususnya berada di pedesaan mengalami kemiskinan seperti kurangnya lapangan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan), ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi), dan ketiadaan jaminan masa depan. Permasalahan inilah yang dialami sebagian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Sumiyati, 2013)

Adanya permasalahan tersebut sebenarnya dibutuhkan keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat pemerintah desa sehingga keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa diwujudkan melalui partisipasi dengan kesadaran yang tinggi untuk mendukung program pembangunan desa yang terarah. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, yakni diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin

melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara. (Fitriana, 2013)

Program pemerintah untuk masyarakat pedesaan salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang selanjutnya disebut (PNPM Mandiri Pedesaan). PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Program ini merupakan pengembangan yang lebih luas dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. (Prastyanti, 2011)

Lahirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tidak secara spontan. Setelah Presiden mendapat laporan dari berbagai pihak, mengirim utusan ke berbagai daerah, wawancara langsung dengan pelaku program, bahkan sudah lebih dari 30 negara mengirimkan dutanya untuk belajar tentang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka mulai awal tahun 2006 gagasan PNPM sudah menjadi wacana di Istana Negara. Tepatnya pada bulan Agustus 2006, presiden memutuskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus menjadi program nasional. Pada tahun itu pula lahirlah kebijakan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Dua program yang menjadi pilar utama

PNPM Mandiri sebelum program-program lain bergabung, adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). (Depdagri, 2007;1)

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama (Sumiyati, 2013), yaitu :

- a. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan,
- b. Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (*capacity building*), dan
- c. pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat mendorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), partisipasi dari CSR (Corporate Social Responsibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. (Indiahono,2012)

Pelaksanaan pembangunan desa untuk pengentasan kemiskinan diharapkan mampu untuk mendorong pembangunan desa sehingga dapat memiliki kemadiriian dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang menjadi wewenangnya. Kemandirian tersebut dapat tercapai melalui adanya pelaksanaan pembangunan desa yang terpadu, terarah dan berkesinambungan dimana keterlibatan seluruh warga masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Peran pemerintah desa juga sangat penting dalam pembangunan desa, memunculkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Hal ini seperti yang terjadi pada desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Sebelum diluncurkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, desa Ngadirenggo ini adalah desa yang tertinggal dimana kemiskinan masih menjadi masalah utama. Kemudian setelah tahun 2007 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini berkembang, masyarakat desa Ngadirengga ini mengalami banyak perkembangan dalam hal perekonomian.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak kendala atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini walaupun sudah membawa banyak perubahan pada masyarakat desa Ngadirengga ini sendiri. Salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan PNPM ini adalah kurangnya kerjasama yang baik antara para penanggungjawab program kegiatan

PNPM dengan masyarakat setempat, kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat mempengaruhi keberhasilan program PNPM Mandiri Pedesaan ini. Untuk selanjutnya dalam hal keterbatasan penyaluran dana, sehingga ada beberapa program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang belum dapat terealisasi seperti kegiatan simpan pinjam bagi kelompok masyarakat. Hal ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat di desa Ngadirengga.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti melakukan penelitian tentang efektivitas dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang: **“Keefektivan Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) dalam Pembangunan Desa untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat kita lihat bahwa penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat mandiri pedesaan merupakan program pemerintah yang dilimpahkan ke pemerintah desa agar pemerintah desa mampu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi dalam menunjang pembangunan desa dengan demikian masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keefektifan penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan di Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan di Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keefektifan penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM mandiri pedesaan)
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM mandiri pedesaan)

D. Kontribusi Penelitian

Dalam penelitian ini, pada akhirnya manfaat atau kontribusi yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis merupakan pengaplikasian mata kuliah yang sudah diterima, dengan memadukan konsep teori dengan kenyataan yang ada di lapangan
2. Bagi perguruan tinggi merupakan bahan informasi dan referensi ilmu administrasi pada umumnya dan keuangan pada khususnya, terutama pada keuangan dalam pembangunan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pembanding bagi peneliti lain yang membahas tentang keefektifan penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat

mandiri perdesaan (PNPM mandiri perdesaan) yang lebih baik dimasa yang aka datang.

3. Bagi desa yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam rangka penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM mandiri perdesaan) yang lebih efektif dalam pembangunan di desa untuk pengentasan kemiskinan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas dalam penulisan ini dapat diketahui dan dimengerti secara jelas dari masing-masing bab. Secara garis besar penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sebagai penutupnya yaitu menguraikan sistematika pembahasan yang berisikan gambaran secara singkat tentang isi dari penulisan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka teoritis yang didalamnya membahas landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar evaluasi permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan konsep-konsep dasar dan berbagai pengertian teori seperti Pengertian Administrasi Desa, Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa, Pengertian

Pembangunan, Pengertian Kemiskinan, Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan, dan Pengertian Efektivitas

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, mencakup materi yang terdiri dari : jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi penyajian data umum, penyajian data fokus dan pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum merupakan gambaran yang sebenarnya pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan fokus penelitian yang kemudian membahasnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari bab pembahasannya yang ada secara keseluruhan disertai saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Desa

1. Pengertian Administrasi Desa

Administrasi desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sistem tata usaha/ administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.

Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa harus didukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut administrasi desa. Jadi, administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam buku administrasi desa. (Hanif, 2011:135).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Administrasi Desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa. Dimana kegiatan pemerintahan desa ini yang dilakukan oleh para pemerintah desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pihak

lain yang berperan dalam pelaksanaan pemerintahan desa dengan didukung oleh sistem tata usaha/ administrasi yang benar, rapi dan tertib.

2. Macam Administrasi Desa

Administrasi desa terdiri dari berbagai macam dengan berbagai tugas dan fungsi masing-masing dari administrasi tersebut, diantaranya adalah (Hanif, 2011:136) :

1. Administrasi umum
Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa pada buku administrasi umum
2. Administrasi penduduk
Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk
3. Administrasi keuangan
Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan
4. Administrasi pembangunan
Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan atau sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan
5. Administrasi badan permusyawaratan desa atau BPD
Adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD
6. Administrasi lainnya
Adalah administrasi selain kelima administrasi tersebut yang dianggap penting oleh desa.

Itulah macam-macam kegiatan administrasi desa yang dilaksanakan oleh desa yang bertujuan untuk memudahkan perangkat desa dalam melaksanakan segala kegiatan dalam administrasi desa. Karena setiap desa memiliki wewenang dalam seluruh kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pembagian kegiatan antar perangkat desa tidak terjadi tumpang tindih.

B. Administrasi Pemerintahan Desa

1. Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa

Administrasi Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam struktur administrasi desa dimana pemerintahan desa tersebut akan berjalan dengan lancar apabila didukung oleh sistem tata usaha/administrasi yang benar, rapi dan tertib. Administrasi Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa yang melakukan sebuah kerjasama dengan prosedur dan tatacara yang sudah ditentukan. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. (Hanif, 2011:68)

Administrasi Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pengertian Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Hanif, 2011:68)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Administrasi Pemerintahan Desa ini sendiri merupakan struktur dari perangkat desa yang menjalankan

kegiatan pemerintahan desa dengan sistem tata usaha administrasi yang benar, rapi, dan tertib sesuai dengan prosedur. Perangkat desa ini memegang kekuasaan penuh dalam menjalankan segala kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa yang membantu untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Menurut Hanif (2011:73) Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

Unsur pimpinan, yaitu kepala desa

a. Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas :

1. Sekretariat desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
2. Unsur pelaksanaan teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
3. Unsur kewilayahan yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Menurut Hanif (2011:74) Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa

- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas fungsi tersebut BPD memiliki wewenang : (Hanif, 2011:77)

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD

Setiap perangkat desa memiliki wewenang, tugas, dan fungsinya masing-masing. Kepala desa selaku pimpinan dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan desa memiliki wewenang dan

tugas yang berbeda. Dengan adanya wewenang Badan Permusyawaratan Desa tersebut memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa.

C. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan adalah usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia pembangunan biasanya difokuskan ke bidang ekonomi, sehingga terjadinya perubahan sosial tidak akan memiliki arti apabila tidak memiliki nilai tambah secara ekonomi. Untuk itu pembangunan sendiri merupakan perubahan besar-besaran suatu bangsa yang memiliki implikasi sangat luas berkaitan dengan agen perubahan, kekuasaan, serta sumber daya yang dimiliki dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Pembangunan menurut Siagian (1974) adalah suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintahan secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. (Suryono, 2010:2)

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya pengertian Desa selalu mengalami perubahan, seperti yang tercantum pada pengertian Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 1 yang berbunyi :

” Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Pembangunan desa sendiri merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan. Di negara-negara berkembang secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Konsep pembanguna pedesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang. Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama

menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi dan pengangguran masyarakat. (Rahardjo; 2013:76)

Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. (Sumiyati, 2013)

Karena masyarakat desa mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan desa bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut, untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai pembangunan desa terpadu. (Sumiyati, 2013)

Konsep pembangunan desa terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagi dimensi. Pembangunan desa terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengaitkan seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyakat desa dengan berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena suatu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka utnuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota. (Sumiyati, 2013)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa ini merupakan kemampuan untuk memandirikan masyarakat yang ada di pedesaan agar terlepas dari masalah kemiskinan. Pembangunan desa ini tidak terlepas dari keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah desa. Adanya peningkatan dari partisipasi masyarakat ini sendiri juga akan membantu pembangunan desa. Karena aspek dalam pembangunan desa ini juga meliputi dari peran serta masyarakat sebagai obyek dalam pembangunan desa.

2. Pendekatan Dalam Pembangunan Desa

Dalam pembangunan desa terdapat beberapa pendekatan untuk mengidentifikasinya, diantaranya adalah (Rahardjo;2013:13) :

a. Pendekatan Berbasis Sumber Daya Alam

Pendekatan yang berbasis sumberdaya alam ini melalui penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis dan kerajinan/industri kecil serta pembangunan kelembagaan untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam.

b. Pendekatan untuk mempercepat perbaikan dalam perekonomian pedesaan

Dalam pendekatan ini lebih memfokuskan melalui perencanaan tata ruang (spasial) baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan daerah khususnya daerah-daerah yang terbelakang.

c. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif adalah pendekatan yang didasarkan atas asumsi bahwa penduduk pedesaan adalah subjek pembangunan, sumber daya manusia yang potensial. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih menekankan pada pembentukan motivasi dalam diri masyarakat setempat, serta perubahan sikap mental masyarakatnya dalam mewujudkan terciptanya partisipasi aktif dan langsung kelihatan aslinya, karena keberhasilan yang diraih bukanlah dalam bentuk pembangunan fisik dan prasarana, tetapi dalam bentuk sikap mental dan

tumbuhnya motivasi yang kuat dalam diri masyarakat itu sendiri. Pembangunan fisik dan prasarana secara tidak langsung dapat merupakan hasil dari pendekatan partisipatif ini.

Dari beberapa pendekatan tersebut dapat dilihat bahwa dalam pembangunan desa harus melihat dari berbagai aspek. Dengan adanya aspek-aspek dalam pembangunan desa ini dapat membantu salah satunya adalah perekonomian masyarakat desa. Perkembangan dalam perekonomian masyarakat pedesaan ini merupakan tolok ukur dari keberhasilan pembangunan desa. Sehingga pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan struktur dan terarah.

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Berbicara tentang kemiskinan, pada dasarnya dapat didefinisikan secara sederhana maupun dalam arti luas. Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidacukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidacukupan yang lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan berusaha, keterbatasan akses terhadap berbagai hal, dan lain-lain. (Hamzah, 2012)

Dimensi kemiskinan, secara dinamis mengalami perubahan dengan mempertimbangkan aspek nonekonomi masyarakat miskin.

Menurut Hamzah (2012) Sedikitnya terdapat sembilan dimensi kemiskinan yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

- a. ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (papan, sandang, dan perumahan)
- b. aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi)
- c. lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital
- d. rentan terhadap guncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal
- e. rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam
- f. ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- g. terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan;
- h. ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
- i. mengalami ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan ini adalah kurangnya kebutuhan secara materi pada seseorang atau kurangnya kebutuhan penunjang seperti masalah kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, dan lain-lain. Karena seperti yang banyak kita lihat bahwa masyarakat yang dikatakan miskin itu bukan hanya karena kekurangan dalam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan tetapi juga kebutuhan-kebutuhan penunjang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi.

2. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan

Diantara permasalahan utama pembangunan Indonesia adalah masalah kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. (Fitriana, 2013)

Berbagai langkah dan upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1) upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes), tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah. Pada dekade 1990-an pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera.

Upaya tersebut dilanjutkan dengan meluncurkan program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM/DKE) pada akhir tahun 1998 berupa pemberian dana langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Pemerintah juga melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan sasaran perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan sasaran perkotaan.

(http://karokab.bps.go.id/publikasi/inkesra/2011/08_Bab7_Kemiskinan.pdf)

Dengan adanya hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam mengupayakan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia ini sudah melakukan berbagai cara. Berbagai program sudah diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan seperti pada dekade 1990-an pemerintah menggunakan program Inpres Desatertinggal (IDT) sampai pada tahun 1998 meluncurkan program pemberdayaan daerah dengan pemberian dana langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Namun sampai saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan utama di negara Indonesia, dan berbagai program belum bisa benar-benar menanggulangi masalah kemiskinan ini.

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan sering digunakan dalam diskusi-diskusi dan berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia serta upaya peningkatannya. Apabila melihat dari lingkup alirannya, konsep pemberdayaan ini identik dengan jiwa aliran yang dikenal dalam

kelompok post modernism, dengan titik berat dan pendapat yang berorientasi pada anti sistem, anti struktur dan anti determinasi. (Fuadika, 2011:50)

Pemberdayaan memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Kartasmita (1995;17) dalam (Fuadika, 2011:50) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dalam rangka pemikiran itu, menurut Kartasmita (1995;18-20) dalam (Fuadika, 2011:51), upaya memberdayakan masyarakat harus melalui tiga jalur, yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau Wirm yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran atau potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari itu untuk menciptakan suasana.
- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka ini adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena itu justru akan mengecilkan yang kecil dan menglulaukan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat miskin menjadi tergantung pada berbagai program pemberian.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat ini adalah suatu pengembangan diri pada masyarakat dalam mencapai sebuah kemajuan taraf hidup mereka, sehingga masyarakat dapat bertahan dalam perkembangan jaman. Untuk memberdayakan suatu masyarakat dibutuhkan berbagai tahapan atau jalur. Adanya langkah atau jalur dalam memberdayakan masyarakat ini akan lebih mempermudah lagi untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, karena objek utama dalam pemberdayaan sendiri adalah masyarakat.

2. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable*. Chambe's 1995 (dalam Ginandjar Kartasasmita, 1996;142) sebagaimana dikutip oleh (Fuadika, 2011:54). sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996;214) Dikutip oleh (Fuadika, 2011:54), istilah pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut webster dalam Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti yaitu :

Pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, diartikan sebagai pemberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan,

atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. (dalam Ginandjar Kartasasmita, 1996;59) sebagaimana dikutip oleh (Fuadika, 2011 : 55)

Dengan adanya pemberdayaan akan menghindarkan masyarakat dari sifat ketergantungan sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan kemampuan dan potensi yang ada pada diri mereka. Selain itu Ginandjar dalam Mubyarto (1997;180) dikutip oleh (Fuadika, 2011;55) juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat khususnya yang kecil, lemah, dan miskin merupakan agenda utama kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan dalam hal ini mencakup tiga bidang yaitu :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang
- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat itu
- c. Melindungi kelompok ekonomi rakyat yang masih lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat ini penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat membatasi dirinya dari ketergantungan dalam menjalani kehidupan bersosial. Dalam memberdayakan masyarakat dilakukakn berbagai upaya dan strategi. Upaya yang dilakukan tersebut akan lebih membantu pemberdayaan masyarakat agar masyarakat tidak lagi ketergantungan dengan

memberikan salah satunya potensi ekonomi kepada masyarakat dalam pemberdayaan.

3. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat di atas berpijak pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut beberapa penulis seperti Soloman (1976), Rappaport (1981,1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sullivan dan Kisthardt (1989), dalam (Suharto, 2005;216-217) sebagaimana dikutip oleh (Fuadika, 2011:61). Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, yaitu :

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karenanya pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai patner
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu memberikan sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan
- d. Kompetensi diperoleh melalui pengalam hidup, khususnya pengalaman yang memeberikan perasaan mampu pada masyarakat
- e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegagan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalusi memiliki beragam solusi
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel

Dalam pemberdayaan masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip mendasar untuk menjadi pedoman dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. Dalam prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial ini lebih menempatkan manusia atau masyarakat sebagai objek atau aktor penting dari pemberdayaan tersebut. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat ini dapat dicapai dengan adanya kerjasama yang baik dari masyarakat.

F. PNPM Mandiri Pedesaan

1. Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. (Depdagri, 2007;1)

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui PPK.

Tujuan Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khususnya meliputi (Depdagri, 2007;2) :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa.

Dapat disimpulkan bahwa PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah salah satu program nasional dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah dengan menjadikan kelompok keluarga miskin menjadi sasaran dalam program ini. Kelompok masyarakat yang ada di pedesaan yang tergolong masyarakat miskin ini diharapkan mampu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan dan perkembangan perekonomian mereka, dengan berbagai tujuan dari program ini yang diharapkan masyarakat miskin yang ada di pedesaan mampu untuk memperbaiki perekonomiannya dan lepas dari kemiskinan. Bukan hanya tujuan umum dan khusus dalam perkembangan program ini. Dengan adanya tujuan khusus ini dapat lebih difokuskan lagi tujuan-tujuan utama dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini. Agar fokus utama diluncurkannya program ini tidak menjadi lebar dengan memberikan batasan-batasan

2. Kelembagaan Dalam PNPM Mandiri Pedesaan

Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dilaksanakan melalui suatu lembaga di desa yang dibentuk melalui musyawarah desa yang dilakukan pada tahap awal pelaksanaan.

Kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut (Depdagri, 2007;11) :

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)
TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris. Pada saat Musyawarah Desa Informasi hasil musyawarah antar desa (MAD) keanggotaan TPK dilengkapi dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Tim Penulis Usulan (TPU)
TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes. Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan kader-kader desa yang ada.
3. Tim Pemantau
Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan).
4. Tim Pemelihara
Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan antar desa (jika diperlukan). Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya masyarakat setempat.

5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)
KPMD/K adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.
Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan. Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk memfasilitasi dan membantu FK dalam tahapan kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat.
6. Kelompok Masyarakat (Pokmas)
Yang dimaksudkan dengan Pokmas adalah kelompok masyarakat yang terlibat dan mendukung kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok SPP, kelompok UEP, kelompok pengelola air, dan kelompok pengelola pasar desa.

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan ini bukan hanya kepala desa yang bertanggung jawab pada keberhasilan program tersebut. Pemerintah dari kecamatan membentuk suatu tim atau kelembagaan untuk membantu dalam pelaksanaan program tersebut mulai dari perencanaan program yang akan dielenggarakan di pedesaan sampai pada pelestraian program di pedesaan. Inilah kelembagaan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di desa dengan tim yang memiliki fungsi dan tugas sendiri dalam melaksanakan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat tersebut sehingga dapat mencapai sasaran.

3. Jenis Bantuan Di Tingkat Masyarakat

Bantuan untuk masyarakat dalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan dana yaitu (Sumiyati, 2013):

1. Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing-masing.

2. Bantuan Dana

Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana bantuan langsung masyarakat (BLM). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dana bantuan langsung masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam komponen-komponen kegiatan lingkungan, komponen kegiatan sosial, dan komponen kegiatan keuangan.

Dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini dibutuhkan dana yang cukup besar yang berasal dari dana APBN. Kemudian dana tersebut dilimpahkan kepada daerah untuk kebutuhan program pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya dana dari pemerintah pusat itu disebut dengan dana bantuan. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah dan kemudian disalurkan kepada desa yang melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini untuk menunjang pemberdayaan kepada masyarakat desa agar tidak ketergantungan.

4. Kegiatan-kegiatan Dalam Siklus PNPM Mandiri Pedesaan

Alur kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah (Depdagri, 2007;17):

- a. Mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, termasuk pelaku pelaku PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sebelumnya;
- b. Kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PNPM Mandiri Perdesaan tahap sebelumnya;
- c. Inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah);
- d. Inventarisasi data kependudukan, program selain PNPM Mandiri Perdesaan yang akan masuk ke desa, dll.

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan. (Fitriana, 2013)

Sistem kelembagaan lokal dan pertemuan informal masyarakat seperti: pertemuan keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja,dll),

pertemuan adat istiadat; (gotong royong, arisan, upacara adat dan lain-lain) merupakan alternatif untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media penerapan prinsip transparansi. Media cetak, seperti koran dan tabloid, serta media elektronika, seperti radio dan TV, dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan ini akan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh para fasilitator untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Namun sebelum melaksanakan rencana program ini dibutuhkan pengenalan pada kondisi desa agar dapat mengetahui kebutuhan yang untuk kelancaran program nasional ini.

5. Kegiatan Pengembangan Kapasitas

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan lokal menuju kemandirian, maka : (Fitriana, 2013)

- a. Di setiap desa dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM D/K dengan kualifikasi teknik dan pemberdayaan), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara,
- b. Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD), Tim Verifikasi, UPK, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL),
- c. Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan di antaranya meliputi: penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif,
- d. Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PPK di desa dan kecamatan. Kategorisasi meliputi tahapan pembentukan dan tahapan pengakaran. Tahapan pembentukan untuk mengetahui hubungan antara dinamika kolektifitas dan strategi pendampingan.

- Tahapan pengakaran untuk mengetahui dinamika kolektifitas dan status.
- e. Dilakukan penataan dan pengembangan Kelembagaan Desa serta Antar Desa.

Organisasi kerja yang dibangun melalui PPK, pada awalnya adalah lembaga-lembaga di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang akan dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada. (Fitriana, 2013)

Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek statuta dan payunghukum. Statuta menuntaskan status hak milik, keterwakilan dalam delegasi, serta batas kewenangan. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (Pokmas) yang dilaksanakan dengan strategi pendampingan yang bersifat partisipatif, kolektif, dan representatif.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan program PNPM Mandiri Pedesaan ini dibutuhkan pengembangan kapasitas. Dalam pelaku pelaksanaan program ini dipilih dari desa yang bersangkutan itu sendiri kemudian tim dari kecamatan juga dipilih dan dikembanga sendiri oleh fasilitator dari kecamatan. Kemudian dalam pengembangan kapasitas mereka para pelaku pelaksanaan program dibutuhkan pelatihan

pemerintahan desa. Setelah dilaksanakannya pelatihan dilakukan juga penataan dan pengembangan kelembagaan desa serta antar desa.

6. Kriteria Dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria (Depdagri, 2007;7) :

- a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
- b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat
- d. Didukung oleh sumber daya yang ada
- e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah sebagai berikut (Depdagri, 2007;7) :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumberdaya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan

Dalam memudahkan para fasilitator dan tim yang bersangkutan untuk melaksanakan program pemberdayaan ini diperlukan struktur jenis kegiatan yang sesuai dengan kondisi desa tersebut. Dalam suatu kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan kegiatan yang direncanakan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh fasilitator. Inilah berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat. Untuk pencapaian tujuannya agar masyarakat dapat mandiri terutama dalam segi ekonomi.

G. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. (Yulianti, 2012:14)

Sehingga jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan sebuah target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Upaya untuk mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini merupakan salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). (Yulianti, 2012:15)

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran yang menyatakan suatu target keberhasilan yang dicapai dalam kegiatan atau program yang sedang berjalan. Efektivitas ini merupakan tolok ukur dalam suatu kegiatan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

2. Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Berikut adalah kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77) dalam (Yulianti, 2012:16), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan yang akan dicapai.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Suatu kinerja yang sedang berjalan seringkali menemukan kesulitan dalam pencapaian efektivitas. Ukuran dan kriteria ini dapat berfungsi sebagai tolok ukur dalam penilaian suatu kinerja untuk melihat kinerja tersebut sudah berjalan secara efektif. Karena suatu kegiatan atau program dikatakan efektif apabila rencana dan pelaksanaan dari program tersebut berjalan secara sinergi.

3. Indikator Efektivitas Kerja

Dalam efektivitas terdapat beberapa indikator untuk melihat efektivitas organisasi sebagai suatu tingkat untuk dapat merealisasikan tujuannya. Sedangkan menurut Handoko, (1997) dalam Zuliyanti (2005: 26) dalam Yudhaningsih, (2011 : 41) Efektivitas kerja terdiri dari kata efektivitas dan kerja. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan

Berikut adalah Indikator untuk mengukur efektivitas kerja menurut Richard dan M. Steers (1980:192) dalam Zuliyanti, (2005: 29) dalam Yudhaningsih, (2011: 41) meliputi:

- a. Kemampuan Menyesuaikan Diri. Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Hal ini sesuai pendapat Ricard M. Steers yang menyatakan bahwa kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Prestasi Kerja. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu mengacu (Hasibuan 2001: 94) dalam Zuliyanti, (2005: 29). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi kerja adalah hasil yang dicapai pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan mutu dan sasaran serta batas waktu yang telah ditentukan. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur merupakan cara untuk suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi jumlah spesialisasi pekerjaan, desentralisasi pengendalian untuk penyelesaian pekerjaan. Sedangkan teknologi merupakan suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
- c. Kepuasan Kerja. Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya (Hasibuan, 2001: 202). Pendapat lain kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan yang dirasakan

seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi (Steers, 1980: 45) dalam Zuliyanti, (2005: 30). Menurut Handoko (1998: 193) dalam Zuliyanti, (2005: 30) kepuasan kerja suatu keadaan emosional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dimata karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan mereka.

Dalam pencapaian program kerja suatu organisasi dibutuhkan beberapa indikator untuk mendefinisikan tujuan dan peralatan agar program kerja tersebut untuk dapat berhasil. Indikator-indikator tersebut merupakan hasil dari kemampuan para pelaku pekerjaan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan hasil kerja yang dilakukan. Hasil kerja yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari indikator yang telah ditentukan dan kemampuan para pelaku kerja dalam menjalankan tanggung jawabnya.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kerja

Dalam pencapaian tujuan efektivitas kerja suatu organisasi bukan hanya dibutuhkan indikator yang membutuhkan kemampuan untuk mendefinisikan tujuan dan peralatan yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan. Namun faktor yang berperan dalam keberhasilan efektivitas kerja dalam organisasi juga sangat berpengaruh. Hal ini disebabkan faktor yang dapat menimbulkan berkembangnya suatu efektivitas kerja dalam organisasi agar menjadi lebih baik sangat dibutuhkan untuk perkembangan efektivitas kerja itu sendiri.

Berikut adalah Faktor yang mempengaruhi tercapainya efektivitas kerja, menurut Zuliyanti, (2005: 26) dalam Yudhaningsih, (2011 :41), yaitu:

- a. **Karakteristik Organisasi.** Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. Struktur merupakan cara untuk suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi jumlah spesialisasi pekerjaan, desentralisasi pengendalian untuk penyelesaian pekerjaan. Teknologi merupakan suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi.
- b. **Karakteristik Lingkungan.** Lingkungan mencakup dua aspek yang berhubungan yaitu lingkungan intern dan ekstern. Lingkungan intern dikenal dengan iklim organisasi yang meliputi atribut lingkungan kerja seperti kepuasan dan prestasi. Lingkungan ekstern menyangkut kekuatan yang timbul diluar batas organisasi yang mempengaruhi tindakan dalam organisasi seperti adanya peraturan pemerintah.
- c. **Karakteristik Pekerja.** Pekerja mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga akan menyebabkan perbedaan perilaku antara orang satu dengan orang lain. Prestasi merupakan modal utama di dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, sebab meskipun teknologi yang dipergunakan canggih jika tanpa prestasi tidak ada gunanya.
- d. **Kebijakan dan Praktek Manajemen.** Manajer memegang peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan. Sehingga manajer berkewajiban menjamin struktur organisasi konsisten dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Selain itu manajer juga bertanggungjawab untuk menetapkan suatu sistem imbalan yang pantas sehingga dapat memuaskan kebutuhan pekerja dan tujuan pribadinya dalam mengejar sasaran organisasi.

Keberhasilan efektivitas kerja suatu organisasi bukan hanya dilihat atau diukur dari indikator yang telah ditentukan. Namun juga dilihat dari faktor yang sangat berpengaruh dalam efektivitas kerja karena dalam keberhasilan efektivitas kerja ini bukan hanya dari pelaku program kerja namun hal-hal yang mendorong perkembangan program kerja menjadi lebih baik. Faktor yang berpengaruh dalam efektivitas kerja ini adalah

karateristik organisasi yaitu hal-hal yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Karakteristik lingkungan yaitu berbagai hal yang ada diluar organisasi yang dapat mendorong keberhasilan efektivitas kerja organisasi. Karateristik pekerja yaitu para pelaku program kerja organisasi yang menjadi subjek dalam pelaksanaan program kerja organisasi. Dan yang terakhir adalah karateristik manajemen yaitu semua yang berhubungan dengan sistem dan manajemen yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan efektivitas kerja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini. Metode penelitian adalah suatu pedoman atau cara dalam melakukan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis agar dapat memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Melihat rumusan masalah yang dikemukakan pada bab sebelumnya dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisa, maka peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung pada objek penelitian dan akan menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat. Karena metode penelitian ini memusatkan pada deskripsi yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku berbagai hal yang ada relevansinya dengan pelaksanaan program pemerintah yang juga dikembangkan di tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. Peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap objek. Objek dibiarkan apa adanya seperti kondisi aslinya.

Dalam penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif yang akan menjelaskan penelitian ini dengan menggunakan kata-kata atau secara tertulis.

Selanjutnya Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2007, h.4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini, lebih mengandalkan unsur manusia (peneliti) sebagai instrumen atau pelaku utama, dan berinteraksi dengan orang yang diamati dalam suatu cakupan yaitu Desa serta tempat-tempat yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan yang diperoleh dengan melakukan wawancara, serta berbagai kegiatan yang dapat menunjang seperti observasi dan dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penguraian tentang masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Juga dapat dikatakan sebagai pemilihan pokok permasalahan awal untuk diteliti dan bagaimana memfokuskannya. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Fokus penelitian diperlukan untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian. Dengan menentukan fokus penelitian, maka penelitian dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.

Oleh karena itu maka peneliti berusaha membuat suatu fokus penelitian dari seluruh objek penelitian yang akan diteliti. Peneliti dapat memasukkan data yang relevan agar penelitiannya lebih akurat dan sesuai dengan disiplin ilmu dan tema yang telah dipilih. Berdasarkan judul dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah :

1. Keefektifan penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

Mandiri Perdesaan :

- a. Proses perencanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak ada beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur perencanaan yang telah ditetapkan efektif atau tidak salah satunya adalah Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- b. Pencapaian dan ketepatan kegiatan dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam ukuran dan kriteria kejelasan strategi pencapaian sangat dibutuhkan karena Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan yang akan dicapai.
- c. Keterlibatan para aktor dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Untuk mengukur efektif atau tidak program kebijakan dari segi keikutsertaan semua aktor yang bertanggung jawab di dalamnya maka dapat dilihat dengan Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.

- d. Sosialisasi terhadap sasaran program dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
 - e. Pemantauan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Untuk ukuran efektif atau tidak suatu program kebijakan yang diukur dari segi pemantuan untuk pelaksanaan program dapat dilihat bahwa Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
 - f. Penerimaan masyarakat terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
2. Faktor pendukung dan penghambat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM mandiri pedesaan) :
- a. faktor pendorong
 1. Petunjuk teknis operasional pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
 2. Sarana dan prasarana, keterlibatan masyarakat dalam program PNPM
 - b. faktor penghambat
 1. Keterlibatan para aktor dalam sosialisasi masyarakat

2. Keterbatasan penyaluran dana untuk pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah ruang atau tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dimana penelitian ini akan dilakukan. Penelitian ini dilakukan terhadap Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) lokasi penelitiannya di Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Dengan penelitian di kabupaten blitar ini harapannya adalah mampu memberi gambaran secara tepat tentang berbagai fenomena yang terjadi serta mampu memberikan pelajaran yang berguna dari berbagai kesimpulan yang nantinya akan diperoleh dari peneliti.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan mendapat gambaran yang sebenarnya dari berbagai hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Yang menjadi situs penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini didasarkan pada alasan karena desa tersebut Sebelum diluncurkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, desa Ngadirenggo ini adalah desa yang tertinggal dimana kemiskinan masih menjadi masalah utama. Kemudian setelah tahun 2007 dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini berkembang, masyarakat desa Ngadirengga ini mengalami banyak perkembangan dalam hal perekonomian.

Berdasarkan temuan di lapangan, masih banyak kendala atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini walaupun sudah membawa banyak perubahan pada masyarakat desa Ngadirengga ini sendiri. Salah satu kendala yang muncul dalam pelaksanaan PNPM ini adalah ada beberapa Unit Pengelola Keuangan (UPK) belum bisa melunasi dana pinjaman dari PNPM yang melalui simpa pinjam yang kemudian berakibat desa yang bersangkutan tidak mendapat proyek kembali tahun depan baik secara fisik seperti sarana dan prasarana maupun non fisik seperti pengembangan usaha. Hal ini juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat di desa Ngadirengga, sehingga persyaratan penelitian kualitatif ini dimungkinkan dapat secara optimal dalam pelaksanaan wawancara atau kegiatan sejenisnya. Pemilihan lokasi ini diharapkan agar peneliti lebih mudah memperoleh ijin penelitian, mudah dalam memperoleh data dan informasi.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh atau merupakan suatu hal atau seseorang atau benda dimana peneliti melakukan pengamatan, membaca, atau langsung bertanya pada hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti, yang dijadikan sebagai sumber untuk mendapatkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Berkaitan dengan hal ini maka jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dan digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis. Dalam penelitian ini data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Tim Pelaksana PNPM Mandiri serta masyarakat disekitarnya yang mendapat manfaat dari program ini.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Misalnya pengumpulan data yang diperoleh dari buku, arsip, artikel, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang disediakan oleh Kantor Desa Ngadirengga yang sesuai atau berkaitan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dari sumber yang berkaitan. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi (pengamatan)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap segala fenomena yang terjadi di lapangan sehingga mampu

memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fokus dan tema penelitian yang telah dipilih.

2. Interview (wawancara)

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab/ percakapan secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten serta pihak tersebut mampu untuk memberikan keterangan tentang segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan. Pihak-pihak yang telah diwawancarai adalah UPK (Unit Pengelola Keuangan) dengan Ibu Rini dan Ibu Kestyaningsih. Wawancara dengan anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dengan Bapak Anjar Sumariono, dan masyarakat Desa Ngadirengga dengan Ibu Indri dan Nugroho.

3. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan yang berupa data-data yang tertulis seperti dokumen-dokumen berupa data tertulis termasuk tabel-tabel mengenai rencana kegiatan sampai pada pelaksanaan kegiatan maupun gambar-gambar dari pelaksanaan kegiatan dari Kantor Desa Ngadirengga yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen Kantor Desa Ngadirengga.

4. Fieldnote (catatan lapangan)

Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber atau informan pada saat wawancara yang berupa catatan sederhana yang kemudian diolah menjadi data yang akurat dan berguna.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian. Berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut maka instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen utama yang berfungsi sebagai penggali data, baik itu melalui wawancara, observasi dari dokumen-dokumen yang telah tersedia.

2. Interview guide (pedoman wawancara)

Pedoman yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara yang dapat berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan untuk melakukan wawancara kepada anggota BKM:

- a. Berapa luas wilayah Desa Ngadirengga?
- b. Berapa jumlah penduduk Desa Ngadirengga? Laki-laki dan perempuan
- c. Berapa jumlah KK keseluruhan di Desa Ngadirengga?
- d. Berapa jumlah Rumah Tangga miskin di Desa Ngadirengga?
- e. Berapa jumlah warga miskin keseluruhan?
- f. Daftar mata pencaharian warga desa Ngadirengga?
- g. Apa saja jenis pekerjaan warga Desa Ngadirengga? Berapa jumlah total keseluruhan?
- h. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya program PNPM?
- i. Apa saja program kegiatan dalam PNPM?
- j. Bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya program PNPM?
- k. Bagaimana keterlibatan semua aktor dalam pelaksanaan program PNPM?
- l. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PNPM?

- m. Siapa yang memiliki tanggung jawab memonitoring proses kegiatan?
- n. Bagaimana proses perencanaan kegiatan PNPM sebelum dilaksanakan?
- o. Bagaimana menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan?

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan untuk melakukan wawancara dengan anggota UPK :

- a. Bagaimana proses perencanaan kegiatan PNPM sebelum dilaksanakan?
- b. Bagaimana menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan?
- c. Berapa jumlah sarana prasarana yang sudah diperbaiki?
- d. Apa saja jenis program kegiatan yang masih berjalan sampai saat ini?
- e. Apa saja jenis program kegiatan yang tidak dilanjutkan? mengapa?
- f. Program apa saja yang sudah terlihat hasilnya?
- g. Berapa anggaran dana PNPM dalam sekali periode?
- h. Apakah dengan dana yang diperoleh sudah mengatasi kemiskinan?
- i. Apakah terdapat kendala dalam pengajuan dana?
- j. Apakah dengan dana yang diperoleh sisa atau kurang untuk kegiatan PNPM?
- k. Apa yang dihasilkan dari program yang sudah berjalan?
- l. Bagaimana ketepatan rencana dan realisasi program kegiatan PNPM?
- m. Adakah sanksi apabila kegiatan yang belum tepenuhi dalam satu periode?
- n. Apa saja hal yang dapat mendukung program kegiatan PNPM?
- o. Apa saja hal menjadi hambatan atau kendala bagi program kegiatan PNPM?
- p. Bagaimana penanggungjawab program mengatasi kendala yang muncul?
- q. Adakah manfaat atau keuntungan dengan adanya kegiatan PNPM?

Berikut adalah daftar pertanyaan yang diajukan untuk melakukan wawancara dengan anggota masyarakat :

- a. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya program PNPM?
- b. Apa yang dihasilkan dari program yang sudah berjalan?
- c. Adakah manfaat atau keuntungan dengan adanya kegiatan PNPM?

3. Catatan lapangan

Merupakan buku catatan dan alat tulis yang dapat digunakan selama berada dilapangan untuk memudahkan hal-hal tertentu yang mungkin belum didapat dari dokumen tertulis.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam segala keseluruhan proses penelitian ini. Ini dikarenakan analisa data menyangkut kukatan analisa dan kemampuan dalam mendeskripsikan data, situasi, peristiwa dan konsepsi yang merupakan bagian dari obyek penelitian. Dengan menggunakan analisa, data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dengan memberikan penjelasan secara lengkap yang mana informasinya diperoleh melalui wawancara di lapangan. Menurut Miles dan Hubberma (Basrowi, 2008;209-210) langkah-langkah analisis data adalah :

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk

analisisnyag menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk tabel dan gambar dimana terdapat beberapa tabel yaitu dari tabel 1 sampai dengan tabel 11 yang mendukung adanya penyajian data sedangkan untuk gambar terdapat gambar 1 samapai dengan gambar 10 yang mendukung secara nyata adanya kegiatan program dalam penyajian data. Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang terjadi dalam satu bentuk alur yang padu dan mudah diraih, denga demikian seorang penganalisisbdapat melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melakukan analisis yang menurut saran yang dikiasikan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin bermanfaat.

3. Verifikasi/ penarikan kesimpulan

Verikasi/penarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan mencari arti dari data-data yang ada seperti mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin.

Pada analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data model interaktif. Dimana dalam model interaktif ini ada tiga jenis kegiatan analisis, dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri yang merupakan siklus dan interaktif. Peneliti harus siap bergerak diantara empat sumbu kumparan itu selama

pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan/verifikasi selama sisa waktu penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

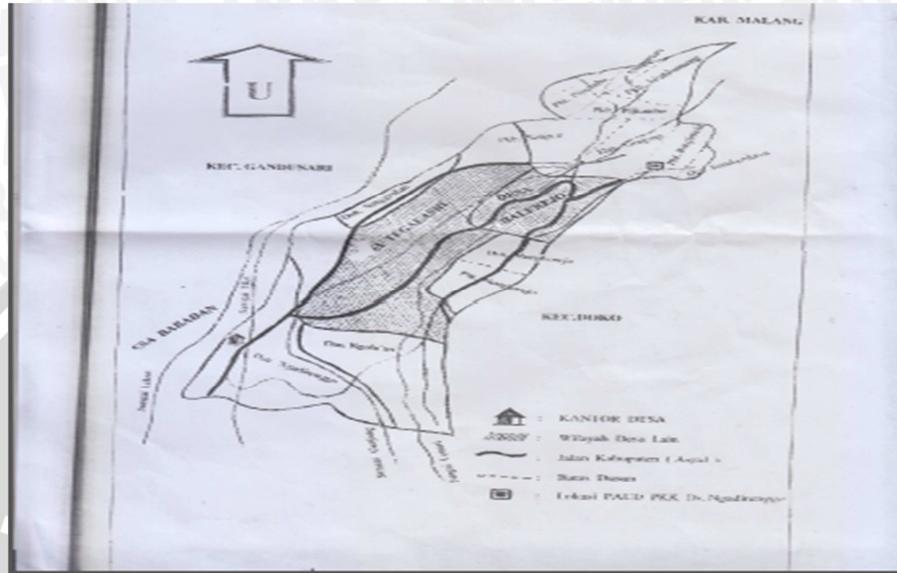
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Georafis dan Administrasi Desa Ngadirengga

Desa Ngadirengga adalah desa yang mempunyai kondisi daerah geografis yang sangat luas, karena memiliki daerah yang sangat luas daerah Ngadirengga sampai ke kaki atau lereng gunung kawi. Konon desa Ngadirengga ini adalah desa yang paling tua di wilayah Kecamatan Wlingi, Desa Ngadirengga berdiri sekitar tahun 1734 dengan luas lahan yang tak terbatas. Desa Ngadirengga memiliki batas wilayah, yaitu :

- a. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Babadan Kecamatan Wlingi, Desa Soso, Desa Slumbang, Desa Semen, Desa Tulungrejo, Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tembalang Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
- c. Sebelah Utara : berbatasan dengan pegunungan Kawi dengan tanaman hutan yang sampai diperbatasan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah Desa Plumbangan kecamatan doko kabupaten Blitar

Gambar 1
Peta Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011:2

Luas Desa Ngadirengga seluruhnya adalah 1661,221 Ha yang terbagi menjadi 7 Dusun, yaitu : Dusun Ngadirengga, Dusun Ngola'an, Dusun Sanggrahan, Dusun Nongkorejo, Dusun Ringintelu, Dusun Sumberduren, Dusun Genjong. Masing-masing dusun tersebut dipimpin oleh kepala dusun yang bisa disebut dengan Kamituwo. Dari masing-masing dusun tersebut masih dibagi lagi menjadi beberapa kelompok wilayah yang terdiri dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Jumlah RW di wilayah Desa Ngadirengga adalah 19 yang membawahi 45 RT. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berdasarkan luas wilayah Desa Ngadirengga, maka luas desa tersebut digunakan oleh penduduk untuk berbagai kegiatan yang bersifat sosial ekonomi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Keadaan Topografi Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
Tahun 2011

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1.	Tanah sawah (pertanian)	136 Ha
2.	Kolam	5 Ha
3.	Jalan	32 Ha
4.	Kantor desa	0,06 Ha
5.	Tanah pekarangan	45 Ha
6.	Tanah ladang	33 Ha
7.	Perkebunan negara	518,64 Ha
8.	Pekebunan	598,15 Ha
9.	Hutan	1,371 Ha
10.	Pemukiman	292 Ha
	Jumlah	1661,221 Ha

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga Kec. Wlingi 2011: 3

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar luas lahan Desa Ngadirengga adalah perkebunan baik milik negara maupun pekebunan milik Desa Ngadirengga sendiri. Banyak perkebunan teh di daerah pinggiran Desa Ngadirengga di daerah pemukiman penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Ngadirengga adalah masyarakat yang bekerja di perkebunan. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

b. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Ngadirengga tahun 2011 adalah sebanyak 6.302 dan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.809, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 3.159 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.143 orang. Dengan rincian penduduk Desa Ngadirengga adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Keadaan Demografi Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
Tahun 2011

No	Keterangan Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Presentase (0%)
1.	Laki-laki	3.159	50,12%
2.	Perempuan	3.143	49,87%
	Jumlah	6.302	100%

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga, 2011:

Dilihat dari tabel 2 menyatakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Ngadirengga yaitu sebanyak 3.159 orang (50,12%) dan untuk jumlah penduduk perempuan di Desa Ngadirengga adalah sebanyak 3.143 orang (49,87%). Dari data diatas menunjukka bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Ngadirengga lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, walaupun selisihnya tidak begitu besar hanya 0,25%. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan suatu kegiatan yang memberikan pendapatan bagi seluruh penduduk dalam memnuhi semua kebutuhan rumah tangga dan status sosial yang ada di masyarakat. Mata pencaharian merupakan salah satu faktor penting sebagai penunjang ekonomi dan sebagai status sosial di tengah masyarakat. Adapaun rincian penduduk Desa Ngadirengga menurut jenis mata pencahariannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pncaharian Desa Ngadirengga
Kecamatan Wlingi Tahun 2011

No	Status	Jumlah (orang)	Presentase (0%)
1.	JasaPemerintahan/NonPemerintahan:		
a.	Pegawai desa	19 orang	2,17%
b.	Pegawai Negeri Sipil (PNS) :	-	
	1. Pegawai desa	1 orang	0,11%
	2. PNS	13 orang	1,49%
	3. ABRI	6 orang	0,68%
	4. Guru	39 orang	4,47%
	5. Bidan	2 orang	0,22%
c.	Pensiunan ABRI/ Sipil	17 orang	1,94%
d.	Pegawai swasta	576 orang	66,05%
2.	Jasa Perdagangan		
a.	Warung	28 orang	3,21%
b.	Kios	14 orang	1,60%
3.	Jasa Ketrampilan		
a.	Tukang kayu	62 orang	7,11%
b.	Tukang batu	60 orang	6,88%
c.	Tukang bordir	15 orang	1,72%
d.	Tukang cukur	10 orang	1,14%
	Jumlah	872 orang	100%

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga, 2011

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Ngadirengga bekerja atau bermata pencaharian pada sektor swastasebanyak 66,05%, dan yang sebagian lagi lebih banyak dibandingkan yang lain adalah pada jasa ketrampilan dengan jumlah sebanyak 16,85% yang dibedakan menjadi beberapa ketrampilan dengan jumlah persentase tukang kayu sebanyak 7,11%, tukang batu sebanyak 6,88%, tukang bordir sebanyak 1,72% dan tukang cukur sebanyak 1,14%. Pegawai swasta terdiri dari pegawai pekebunan dan perhutani di beberapa perkebunan dan perhutani yang ada di desa Ngadirengga. Oleh karena

itu segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa Ngadirengga dapat dikembangkan untuk hasil yang lebih baik.

Penduduk desa Ngadirengga yang tidak bekerja sebagai pegawai perkebunan dan perhutani mengembangkan usaha mereka dengan membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan membuat jasa perdagangan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sedangkan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan yang sudah berhenti sebagai pegawai negeri sipil tidak lebih banyak dari masyarakat yang bekerja di sektor swasta, lebih dominan masyarakat yang bekerja di bidang swasta. Ini disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu dan kurang memiliki keahlian dalam bekerja sehingga untuk mereka yang memiliki kurangnya keahlian tersebut bekerja di perkebunan atau perhutani milik negara maupun yang memang milik desa Ngadirengga itu sendiri yang dapat ditampung untuk membantu pihak perkebunan bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan kerja. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

c. Pemerintahan Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang memiliki otonomi desa yang berhak mengatur segala urusan pemerintah sendiri. Seperti pada Undang-Undang No 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Status desa adalah satuan pemerintahan yang berada dibawah kabupaten/kota yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan. Desa dan kelurahan memiliki perbedaan yang signifikan, kelurahan

hanya wilayah kerja lurah yang berada dibawah wewenang camat yang tidak memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sedangkan desa berada dibawah wewenang camat namun juga memiliki wewenang sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan desa merupakan wujud dari kerjasama antar perangkat desa dalam menjalankan segala urusan desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Fungsi pemerintahan baik yang ada di pemerintahan pusat, daerah atau bahkan desa adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dibantu oleh pengurus pemerintahan desa yang biasa disebut dengan perangkat desa. Dalam menjalankan pemerintahan, desa Ngadirengga memiliki perangkat desa untuk membantu berjalannya pemerintahan. Adapun perangkat desa Ngadirengga terdiri dari Kepala Desa, sekretaris desa, staf kaur pemerintahan, staf kaur pembangunan, dan seluruh pendukung dalam pemerintahan desa termasuk kamituwo yang memiliki peran dalam pemerintahan desa.

Berikut adalah rincian aparatur pemerintahan desa beserta jabatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa :

Tabel 4
Data Aparatur Pemerintahan Desa Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi
Kabupaten Blitar Tahun 2011

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin
1.	Ady sutrisno	Kepala desa	S1	Laki-laki
2.	Eklas suprihatin	Sekretaris desa	S1	Laki-laki
3.	Margiyono	Kaur pemerintahan	S1	Laki-laki
4.	Rini dwi wahyuningsih	Kaur ekobang	S1	Perempuan
5.	Sugianto	Kaur umum	SMA	Laki-laki
6.	Siti mustaqiyah	Kaur keuangan	S1	Perempuan
7.	Anjar sumariono	Kaur kesra	SMA	Laki-laki
8.	Midi	Ksn. Ngadirengga	SMA	Laki-laki
9.	Sulistiyanto	ksn. Ngola'an	SMA	Laki-laki
10.	Harjito	Ks. Sumberduren	SMA	Laki-laki
11.	Pipik andoko	Ksn. Genjong	SMA	Laki-laki
12.	Suharto	Ksn. Nongkorejo	SMA	Laki-laki
13.	Halili	Ksn. sanggarahan	SMA	Laki-laki
14.	Manidi	Pht. Ringintelu	SMA	Laki-laki
15.	Susanto	PTL	SMA	Laki-laki

Sumber : Dokumen dari kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan tabel 4 diatas Dalam menjalankan pemerintahan desa, desa ngadirengga dibantu oleh perangkat desa yang menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala desa selaku sebagai pemimpin yang bertugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa. Seluruh tugas dan wewenang kepala desa tersebut dilakukan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. dalam menjalankan tugas kepala desa memiliki masa jabatan 6 tahun yang dihitung sejak dilantiknya kepala desa dan hanya dapat menduduki masa jabatannya selama 2 periode masa jabatan. Sesuai dengan fungsinya kepala desa memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam setahun dan

memiliki kewajiban menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Pendidikan terakhir perangkat desa ini lebih banyak didominasi oleh lulusan SMA karena melihat pendidikan pada Desa Ngadirengga pada saat itu masih belum menjadi hal yang penting. Dan untuk perangkat desa yang masuk dalam Pegawai Negeri Sipil memiliki pendidikan terakhir minimal S1 karena untuk perangkat desa yang Masuk dalam PNS dapat sewaktu-waktu berpindah tugas ke daerah lain yang membutuhkan untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga perangkat desa yang ada di kantor Desa Ngadirengga tersebut memiliki pendidikan terakhir SMA dan S1, pendidikan terakhir SMA di dominasi dari warga desa Ngadirengga sendiri. (Dokumen Desa Ngadirengga tahun 2011)

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat desa dan perangkat desa sendiri memiliki tanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa tersebut terdiri dari sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur ekonomi pembangunan, kaur umum, kaur keuangan, kaur kesejahteraan masyarakat dan perangkat lain yang membantu berjalannya pemerintahan desa. Sekretaris desa merupakan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan untuk menjadi sekretaris desa. Berikut adalah persyaratan dari sekretaris desa menurut (hanif, 2011:76) :

- a. Pendidikan paling rendah adalah SMA atau sederajat
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran

- d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota pada daerah tersebut. Sedangkan perangkat desa lainnya yang membantu pemerintahan desa diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan yaitu dari masyarakat desa sendiri. Pengangkatan perangkat desa lainnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan persyaratan untuk dapat diangkat kepala desa sebagai perangkat desa yang mendukung pemerintahan desa calon yang dipilih harus berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi berusia 60 tahun.

Berikut adalah rincian usia aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa :

Tabel 5
Data Jumlah Usia Aparatur Pemerintahan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah Usia			
			20-30	31-40	41-50	51-60
1.	Ady Sutrisno	L				√
2.	Eklas Suprihatin	L				√
3.	Margiyono	L			√	
4.	Rini Dwi Wahyuningsih	P		√		
5.	Sugianto	L			√	
6.	Siti Mustaqiyah	P		√		
7.	Anjar Sumariono	L		√		
8.	Midi	L			√	
9.	Sulistyanto	L			√	
10.	Harjito	L			√	
11.	Pipik Andoko	L		√		
12.	Suharto	L			√	
13.	Halili	L			√	
14.	Manidi	L			√	
15.	Susanto	L			√	

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa para perangkat desa yang dipilih harus berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi berusia 60 tahun. Di Kantor Desa Ngadirengga perangkat desa rata-rata memiliki usia 41 samapai 50 tahun. Perangkat desa di Kantor Desa Ngadirengga ini di dominasi oleh laki-laki dan perempuan yang hanya 2 orang dan memilki peran yang penting dalam menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan desa. Dan untuk perangkat desa yang berjenis kelamin perempuan ini memiliki usia rata-rata 31 sampai 40 tahun. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Jumlah untuk perangkat desa yang melalui pemilihan oleh kepala desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sedangkan untuk susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan perancangan peraturan desa yang telah ditetapkan. Untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa lainnya kecuali sekretaris desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapka setia tahun dalam APBDes, penghasilan yang diterima paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Efektivitas Penerapan PNPM Mandiri Pedesaan dalam Pembangunan Desa untuk Pengentasan Kemiskinan Di Desa Ngadirengga

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan adalah program pemerintah yang ditetapkan mulai dari tahun 2007. Kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam keberhasilan pencapaian program ini masyarakat yang tergolong miskin menjadi sasaran utama.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini diharapkan bantuan dana dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ini dapat berhasil, mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di pedesaan. Dana untuk membiayai kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini diberikan oleh pemerintah pusat keseluruhan dari dana APBN dan dana APBD hanya sebesar 10% (sepuluh persen). Dari dana yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan rencana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yang terbagi menjadi 3 (tiga) rencana kegiatan yaitu : kegiatan lingkungan, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anjar Sumariono selaku pelaku pelaksana Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Desa Ngadirengga :

“Untuk biaya seluruh kegiatan dalam PNPM Mandiri Pedesaan bersumber dari dana APBN dan 10% (sepuluh persen) dari dana APBD. Dan untuk dana dari APBDes juga termasuk namun tidak setiap tahun dana dari desa tersebut membantu kegiatan dari PNPM” (wawancara pada tanggal 23 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Dana program PNPM dari dana APBN dan dana APBD hanya digunakan untuk membiayai kegiatan dari PNPM Mandiri Pedesaan. Namun untuk biaya koordinator yang menangani atau yang bertanggung jawab pada kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan sangat ditekan karena diprioritaskan pada kegiatan pemberdayaan sehingga para koordinator yang bertanggung jawab itu sukarelawan yang membantu berjalannya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anjar Sumariono selaku pelaku pelaksana BKM :

“ Dana yang diberikan oleh pemerintah hanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga untuk para koordinator yang bertanggung jawab atas kegiatan program PNPM tersebut tidak mendapat gaji, walaupun ada proyek besar untuk kegiatan PNPM ada biaya namun hanya sedikit, digunakan untuk stimulan saja” (wawancara pada tanggal 23 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan ini membantu peningkatan perekonomian masyarakat Desa Ngadirengga, menunjang penghasilan dengan berbagai program kegiatan yang diajukan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun tahun 2015 pada masa jabatan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah habis program PNPM ini akan diganti, harapannya program yang akan menggantikan program PNPM ini akan lebih baik dan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan mengurangi angka kemiskinan.

a. Perencanaan Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Rencana kegiatan merupakan wujud dari berbagai susunan kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam hal sarana dan prasarana maupun peningkatan taraf hidup masyarakat. Perencanaan kegiatan tahunan di Desa Ngadirengga adalah gambaran umum yang mencakup seluruh usulan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak dan bukan hanya berdasarkan keinginan masyarakat secara individual namun juga untuk kepentingan orang banyak. Karena masyarakat sendiri yang menentukan perencanaan kegiatan untuk diusulkan dan harapannya dapat terealisasi.

Sebelum menentukan rencana kegiatan untuk menunjang seluruh kegiatan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan ini muncul berbagai masalah dari masyarakat desa baik dari sarana prasarana maupun dari hal ekonomi. Dari berbagai permasalahan yang ada dibutuhkan penanganan-penanganan khusus maka disusunlah rencana kegiatan untuk membantu menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat. Dari Permasalahan-permasalahan tersebut dan yang perlu untuk mendapat perbaikan antara lain :

1. Bidang Lingkungan :
 - a. Banyaknya jalan di desa yang masih tanah sehingga perlu adanya makadam jalan
 - b. Aliran air hujan merusak lingkungan sawah dan jalan
 - c. Derasnya aliran air apabila pada waktu musim hujan sehingga perkampungan warga tergenang air/banjir

- d. Masih banyak wilayah yang rawan longsor apabila pada waktu turun hujan
 - e. Jalan becek ketika hujan membuat masyarakat sulit beraktifitas
 - f. normal maka perlu adanya pengerasan jalan dengan rabat
 - g. Masih adanya pemukiman kumuh yang kurang layak huni, terutama bagi warga miskin
2. Bidang ekonomi :
- a. Kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan pinjaman lunak/mudah
 - b. Tidak memiliki cukup modal untuk usaha
3. Bidang sosial :
- a. Kurang memiliki ketrampilan berorganisasi karena masih banyak berpendidikan rendah
 - b. Perlunya pembenahan ekonomi dengan social produktif kambing bergulir
 - c. Masih banyaknya balita, ibu hamil, dan lansia yang kekurangan gizi
 - d. Kelengkapan sarana penunjang kesehatan warga miskin yang kurang memadai
 - e. Kurangnya sarana belajar anak-anak sehingga seakan-akan pendidikan selalu dinomor duakan
 - f. Kurangnya sarana pendidikan tambahan bagi anak-anak warga miskin

Dari berbagai hal usulan permasalahan maka perlu untuk diselesaikan dengan dibentuknya Rencana kegiatan dalam kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini masuk dalam kegiatan tahunan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali sedangkan untuk review kegiatan dilakukan selama 3 (tiga) tahun sekali. Rencana kegiatan tersebut harus mendapat dorongan atau partisipasi dari

masyarakat yang aktif maupun dari perangkat desa selaku koordinator dari program PNPM Mandiri Pedesaan. Dan hanya masyarakat aktif yang mengirimkan wakilnya dari setiap dusun untuk mengusulkan kegiatan untuk satu tahun sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anjar Sumariono selaku pelaksana BKM :

“Dengan adanya partisipasi masyarakat yang mengirimkan wakilnya dari setiap dusun dapat membantu koordinator pelaku BKM untuk membuat rencana kegiatan tahunan bagi dusun yang membutuhkan perbaikan dalam hal sarana dan prasarana” (wawancara pada tanggal 23 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Berikut adalah rincian 3(tiga) rencana kegiatan proyek PNPM Mandiri Pedesaan dalam jangka waktu 3(tiga) tahun pelaksanaan secara umum :

Tabel 6
Alternatif Rencana Kegiatan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Th 2011

NO	Alternatif Kebutuhan	Skenario Kegiatan	Tahun
1	2	3	4
BIDANG LINGKUNGAN			
1.	Makadam jalan, aspal jalan dan rabat jalan	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013
2.	Pembuatan parit/ drainase	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013
3.	Pembuatan dan rehab plengsengan	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM,	2011-2013
4.	Rehab rumah tidak layak huni	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013
BIDANG EKONOMI			
5.	Kegiatan pinjaman bergulir/simpan pinjam usaha kecil	Verifikasi, validasi, pembentukan KSM, persetujuan BKM, pelaksanaan	2011-2013
BIDANG SOSIAL			
6.	Pemberian asupan gizi bagi balita dan ibu hamil	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013
7.	Kambing bergulir	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013
8.	APE TK dan PAUD/ sarana prasarana TK dan PAUD	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013
9.	Pelatihan pakan ternak	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013

1	2	3	4
10.	Pelatihan pupuk kompos	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM,	2011-2013
11.	Les gratis	Survey lokasi, verifikasi, validasi, pembentukan KSM, kerjasama, dll	2011-2013

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan tabel 6 diatas setiap rencana kegiatan secara umum yang paling banyak mendapat perhatian untuk segera direalisasikan adalah bidang lingkungan dan bidang sosial. Dalam bidang lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana dapat mempengaruhi perkembangan pendapatan warga desa Ngadirengga karena harapannya setelah adanya program PNPM Mandiri Pedesaan ini ada peningkatan dari perekonomian masyarakat. Dan program PNPM Mandiri Pedesaan ini bukan hanya memprioritaskan pembangunan dalam hal sarana dan prasarana saja namun juga dalam hal pengembangan potensi masyarakat untuk lapangan pekerjaan dan pendidikan, seperti pelatihan ternak, pelatihan pupuk kompos bahkan sampai pada pemberian pelayanan les gratis kepada anak-anak yang masih membutuhkan pendidikan bagi masa depannya. (Dokumen Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berikut adalah rincian usulan kegiatan dari masyarakat untuk setiap dusun yang membutuhkan bantuan dari program PNPM Mandiri Pedesaan :

Tabel 7
Usulan Kegiatan Masyarakat Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Th. 2011

Kegiatan Lingkungan

Nama KSM	Usulan Kegiatan			Nilai Usulan Kegiatan (Rp)
	Detail	Lokasi	Volume	
Ngudi lancar	plengsengan	RT 2 RW 8 Sumberdiren	0,3 m x 20 m	13.000.000,00
Mbangun berkah III	Rehab rumah	Dusun Nongkorejo Genjong	4 unit	53.500.000,00
Susu lancar	Rabat jalan	Dusun Pijombo	0,8 m x 20 m	9.300.000,00
Kawi lancar	Rabat jalan	Dusun Sirahkencong	2 x 117 m	11.000.000,00
Getah jaya	Rabat jalan	Dusun Ngola'an	0,8 m x 400 m	18.500.000,00
Ngolah rejo	Saluran drainase	RT 3 RW 4 Dusun Sanggrahan	0,4 x 0,4 x 80m	11.400.000,00
Sub Total				116.700.000,00

Kegiatan Sosial

Nama KSM	Usulan Kegiatan			Nilai Usulan Kegiatan (Rp)
	Detail	Lokasi	Volume	
Bumi Rejo	Pelatihan Pembuatan dan penanaman sayur	desa Ngadirengga	30 orang	12.500.000,00
Sub Total				12.500.000,00
Biaya Operasional BKM				3.000.000,00
Total				132.200.000,00

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan tabel 7 diatas Usulan kegiatan masyarakat yang diajukan kepada koordinator program PNPM Mandiri Pedesaan ini disesuaikan dengan keadaan lingkungan mereka yang membutuhkan bantuan dari dana PNPM. Jumlah dana dari setiap kegiatan yang diajukan oleh masyarakat tersebut sumber dananya diperoleh dari dana APBN yang khusus untuk biaya kegiatan PNPM

Mandiri Pedesaan dan dana swadaya, selain itu juga mendapat tambahan dana dari dana APBD. Namun tidak semua usulan yang diajukan disetujui oleh koordinator PNPM Mandiri Pedesaan, ada beberapa usulan yang tidak masuk dalam rencana kegiatan PNPM. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berikut adalah rincian perkiraan usulan kegiatan masyarakat yang masuk dalam rencana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan :

Tabel 8
Usulan Kegiatan Masyarakat Yang Masuk Dalam Rencana Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011

No	Program	Lokasi			Volume	Biaya
		RT	RW	Dusun		
1	2	3	4	5	6	7
Bidang Lingkungan						
1	Makadam jalan (lanjutan)	3	9	Genjong	900x3	50.000.000
2	Makadam jalan	2	10	Genjong	2,5x100	13.000.000
3	Makadam jalan	3	10	Genjong	2,5x100	12.000.000
4	Makadam jalan	1	10	Genjong	2,5x100	30.000.000
5	Makadam jalan	3	9	Genjong	2,5x400	11.000.000
6	Makadam jalan		14	Pijiombo	3x1200	13.000.000
7	Makadam jalan		11	Ringin telu	3x1200	30.000.000
8	Makadam jalan		6	Nongkorejo	3x1200	13.000.000
9	Makadam jalan	3	4	Ngola'an	600x3	30.000.000
10	Makadam jalan	2	3	Ngadirengga	200x3	12.000.000
11	Makadam jalan	1	6	Nongkorejo	190x2,5	10.000.000
12	Makadam jalan (putuk)	3	7	Sanggarahan	200x2,5	34.000.000
13	Makadam jalan	2	8	Sumberduren	500x2,5	13.000.000
14	Aspal jalan	1,2	4	Ngola'an	600x3	50.000.000
15	Rabat jalan	2	6	Nongkorejo	100x2	45.000.000
16	Rabat jalan	2,3	9	Genjong	2x300	10.000.000
17	Rabat jalan	2	1	Ngadirengga	100x2,8	20.000.000
18	Rabat jalan	1	7	Nongkorejo	2x250	12.000.000
19	Rabat jalan			Ringin telu	2x250	10.000.000
20	Rabat jalan		6	Nongkorejo	2x300	15.000.000
21	Parit /Drainase	1,2	3	Ngadirengga	220x0,5	50.000.000
22	Parit / drainase	1,2	4	Ngola'an	600x0,5	45.000.000
23	Parit	1,2	8	Sumberduren	300x0,5	50.000.000
24	Parit / drainase	1	9	Genjong	3x500	12.000.000
25	Parit / drainase	3	10	Genjong	3x300	10.000.000
26	Drainase	1	10	Genjong	2x500	50.000.000
27	Drainase	2	10	Genjong	2,3x500	45.000.000
28	Drainase	3	9	Genjong	2,3x400	32.000.000
29	Drainase	1,2	4	Ngola'an	200x0,5	20.000.000

1	2	3	4	5	6	7
30	Drainase	2	1	Ngadirengga	120x0,5	30.000.000
31	Drainase		1	Ngadirengga	0,4x1x200	10.000.000
32	Parit / drainase		9,10	Genjong	0,2x3x400	23.000.000
33	Gorong-gorong	3	10	Genjong	2,5x4	11.000.000
34	Parit	1	7	Sanggrahan	60x0,5	30.000.000
35	Saluran irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	2000x1x0,5	50.000.000
36	Dam irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	3	45.000.000
37	Plengsengan	1	10	Genjong	5x10	20.750.000
38	Plengsengan	2	9	Genjong	10x12	50.000.000
39	Plengsengan	1	9	Genjong	3x3x7	12.000.000
40	Plengsengan	1	7	Sanggrahan	3x3x0,5	10.000.000
41	Plengsengan makam	Dsn	Dsn	Ngadirengga	500x3x0,5	20.750.000
42	Plengsengan	1	7	Sanggrahan	30x0,5	50.000.000
43	Plengsengan (depan selip)	1	7	Sanggrahan	40x3x0,5	32.000.000
44	Pembangunan jembatan		4,5	Ngola'an	3,5x40	150.000.000
45	Rehab rumah			Ngadirengga	40 unit	50.000.000
46	Pipanisasi + Tabung air bersih	1	16	Perk. Sengon	300+1	50.000.000
47	Pipanisasi	2	14	Perh. pijiombo	500	45.000.000
48	Pipanisasi	4	19	Perk. sirahkencong	500	50.000.000
49	Pipanisasi air + tandon	Dsn	Dsn	Genjong	1000+6	56.000.000
Bidang Sosial						
50	Asupan gizi balita			Ngadirengga	6 bln	25.000.000
51	Asupan gizi ibu hamil			Ngadirengga	6 bln	17.000.000
52	Kambing bergulir			Ngadirengga	36 bln	32.000.000
53	Pengadaan APE TK			Ngadirengga	23 bln	21.000.000
54	Pengadaan sarana prasarana TK			Ngadirengga		15.000.000
55	Pelatihan pakan ternak			Ngadirengga	32 bln	8.500.000
56	Pelatihan pupuk kompos			Ngadirengga	12 bln	4.500.000
57	LES gratis			Ngadirengga	12 bln	15.000.000
Bidang Ekonomi						
58	Pinjaman bergulir masyarakat desa			Kelurahan Ngadirengga	21 KSM	189.000.000

Sumber : Dokumen Kantor Desa Ngadirengga Tahun 2011

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dijelaskan bahwa setiap dusun memiliki hak untuk mengusulkan pendapat mereka untuk pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana melalui dana PNPM Mandiri Pedesaan. Dalam usulan masyarakat tersebut ditetapkan kegiatan yang masuk dalam rencana kegiatan PNPM agar dana yang diperoleh dari PNPM dapat dibagi rata dan semua

kebutuhan masyarakat desa dapat terealisasi. Kebutuhan masyarakat desa tersebut bukan hanya untuk pemenuhan akses jalan namun juga kebutuhan pengembangan potensi untuk membantu penambahan penghasilan mereka.

Di Desa Ngadirengga rencana kegiatan masyarakat dibagi menjadi 3 kategori yaitu dalam bidang lingkungan, bidang sosial dan bidang ekonomi. Dalam bidang lingkungan kebutuhan masyarakat adalah terpenuhinya sarana prasarana dan akses jalan seperti pembangunan maupun perbaikan jalan yang masih makadam, aspal jalan, rabat jalan, pembuatan drainase atau aliran air sehingga tidak mengakibatkan banjir pada saat musim hujan, pemuatan plengsengan, perbaikan plengsengan, perbaikan rumah warga yang sudah tidak layak huni, semua kebutuhan yang masuk dalam rencana kegiatan ini memiliki luas atau jumlah yang berbeda-beda setiap dusun karena menyesuaikan kondisi dusun yang berbeda. Ini dilakukan agar akses jalan dapat lancar untuk membantu masyarakat dalam pekerjaan mereka.

Dalam bidang sosial ini lebih mengutamakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh warga masyarakat di Desa Ngadirengga. Rencana kegiatan yang masuk dalam pelaksanaan program PNPM ini seperti asupan gizi bagi balita dan ibu hamil karena banyak keluarga yang tergolong masyarakat miskin sehingga para wibu hamil dan balita banyak yang kekurangan gizi, kegiatan pelatihan pakan ternak dan pupuk kompos ini dilakukan adalah untuk melatih warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga nantinya mampu untuk membuat kerajinan sendiri dan menjualnya dipasaran agar dapat meningkatkan perekonomian mereka. Dan untuk pengadaan sarana prasarana TK ini digunakan

untuk membantu anak-anak yang dapat bersekolah untuk mendapat fasilitas yang layak, LES gratis juga mendapat minat yang cukup baik dari anak-anak yang kurang mampu untuk tetap bisa merasakan pendidikan walaupun diluar sekolah formal.

Dalam bidang ekonomi ini memiliki tingkat minat yang tinggi dari masyarakat Desa Ngadirengga. Program simpan pinjam ini dikhususkan untuk para perempuan yang kesulitan dalam mencari modal untuk usaha kecil mereka. Peminjaan modal ini sangat membantu bagi peningkatan perekonomian warga masyarakat Desa Ngadirengga dengan 21 kelompok masyarakat yang sampai saat ini rencana program simpan pinjam ini masih berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Dari keseluruhan jumlah usulan kegiatan yang telah masuk dalam rencana kegiatan PNPM jumlah biaya yang telah diperkirakan juga masuk dalam rencana kegiatan PNPM untuk memudahkan koordinator PNPM dalam mencairkan dana yang digunakan untuk pelaksanaannya. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga Tahun 2011)

Berikut adalah rincian total perkiraan biaya selama kegiatan program PNPM berlangsung melalui sumber dana dari APBN dan Swadaya :

Tabel 9
Total Perkiraan Biaya Rencana Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga
Kecamatan Wlingi Tahun 2011

Indikasi Persoalan	Target Pencapaian	Permasalahan	Program	Perkiraan Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5
Bidang Lingkungan				
Masih adanya jalan rusak dan akses jalan yang sulit dilalui oleh masyarakat terutama pada musim hujan	Pemenuhan akan perbaikan jalan/makadam lajan, aspal jalan dan rabat jalan terpenuhi 37%	Masih adanya jalan yang rusak	Makadam jalan	271.000.000
		Masih adanya jalan yang belum diaspal	Aspal jalan	50.000.000
		Masih adanya jalan kampung yang kurang baik	Rabat jalan	112.000.000
Sistem drainase yang kurang memadai	Terpenuhinya sistem drainase yang tepat guna dimasyarakat 34%	Terjadinya aliran air yang deras pada waktu hujan dan banjir	Pembuatan drainase	513.000.000
Banyaknya plengsengan jalan yang rusak terkikis air sehingga harus ada pembenahan	Terpenuhinya pembangunan plengsengan yang lebih baik 56%	Terjadinya longsor akibat kikisan hujan	Pembuatan plengsengan	195.500.000
		Terjadinya alur dan kontur tanah yang tidak ideal	Rehab plengsengan	150.000.000
Masih ada rumah warga yang kurang layak huni	Rumah warga menjadi layak huni 25%	Masih adanya rumah yang kurang layak huni di masyarakat	Rehab rumah	50.000.000
Masih ada warga yang kekurangan air bersih	Warga miskin mendapat pelayanan air bersih 100%	Terpenuhinya layanan air bersih kepada masyarakat	Pelayanan air bersih	201.000.000
Sub Total				1.542.000.000
Bidang Sosial				
Adanya balita dan ibu hamil dengan berat badan kurang dari usianya, karena asupan gizi yang kurang	Asupan gizi balita tercukupi sehingga kesehatan balita meningkat 30%	Masih minimnya asupan gizi bagi balita dan ibu hamil dari pemerintah setempat	Asupan gizi bagi balita dan ibu hamil	25.000.000
Adanya kebutuhan masyarakat untuk kambing bergulir	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Terbatasnya kegiatan untuk bantuan peternak	Kambing bergulir	32.000.000
Banyaknya sarana pendidikan APE dan juga yang lainnya masih kurang memadai	Terpenuhinya sarana pendidikan masyarakat dengan baik 25%	Belum punya sarana pendidikan dengan baik	Pengadaan sarana prasarana TK dan PAUD	15.000.000
		Belum adanya sara belajar dan wahana untuk melatih kecerdasan anak	Pengadaan APE TK dan PAUD	21.000.000
Adanya pengangguran produktif dikalangan masyarakat	Menurunkan angka pengangguran produktif dikalangan masyarakat 26%	Terbatasnya sarana pelatihan aktif	Pelatihan pakan ternak	8.500.000
		Tidak adanya akses yang jelas mengenai info pelatihan	Pelatihan pupuk organik	4.500.000

1	2	3	4	5
Banyaknya anak-anak yang masih minim menerima pendidikan tambahan	Terpenuhinya pendidikan anak-anak warmis 58%	Terbatasnya sarana pendidikan yang bisa dijangkau anak-anak	Les gratis untuk anak-anak warmis	15.000.000
Sub Total				121.000.000
Bidang Ekonomi				
Pendapatan ekonomi warga yang masih rendah	Meningkatkan pendapatan warga melalui peningkatan usaha 30%	Masih ada pendapatan warga yang berada kurang dari Rp. 400.000 karena untuk usaha pemodalangan kurang	Pemberian pinjaman modal usaha secara bergulir lewat KSM	189.000.000
Sub Total				189.000.000
Total				1.852.000.000

Sumber :Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan tabel 9 diatas Dalam usulan kegiatan program PNPM untuk sarana dan prasarana maupun pengembangan potensi masyarakat untuk menunjang perekonomian diberikan perkiraan rincian biaya pada semua kegiatan. Perkiraan rincian biaya tersebut digunakan untuk mengajukan seluruh biaya dalam kegiatan yang akan dilakukan agar memudahkan dalam pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Rini selaku UPK :

“ Untuk mencairkan dana yang digunakan dalam kegiatan PNPM usulan kegiatan dan rincian biaya yang dibutuhkan harus diselesaikan terlebih dahulu. Apabila tahap pertama usulan kegiatan dan rincian biaya belum selesai tahap kedua dalam pencairan dana belum bisa dilakukan” (wawancara pada tanggal 24 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Dengan adanya rincian usulan kegiatan beserta biaya yang diperkirakan untuk melaksanakan program PNPM tersebut dapat membantu koordinator program untuk mendeteksi kondisi yang ada disetiap wilayah di Desa Ngadirengga. Setiap wilayah yang mengusulkan program kegiatan kepada koordinator program PNPM melalui perwakilan warga desa yang menampung

setiap inspirasi masyarakat dan kemudian diajukan kepada koordinator program PNPM. Cara ini dilakukan agar keseluruhan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program PNPM dapat dicairkan oleh UPK dan kegiatan yang sudah direncanakan dapat segera terealisasi. Namun apabila usulan kegiatan dan rincian biaya perkiraan bagi program kegiatan yang akan dilaksanakan belum terselesaikan maka untuk pencairan dana belum dapat dilaksanakan. Hal ini akan menjadi penghambat program kegiatan yang sudah direncanakan, pelaksanaan kegiatannya pun juga terpaksa harus mundur dari jadwal rencana yang telah ditentukan. Sehingga dapat menyebabkan untuk periode selanjutnya program kegiatan yang terhambat ini belum selesai untuk direalisasikan yang menjadikan untuk usulan kegiatan periode selanjutnya tertunda. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

b. Pencapaian dan ketepatan kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Pencapaian dan ketepatan kegiatan merupakan keseluruhan dari hasil rencana kegiatan yang telah disusun untuk mewujudkan usulan dari masyarakat dalam memperbaiki taraf hidup mereka. Dalam pencapaian dan ketepatan kegiatan ini harapannya adalah segala keseluruhan rencana yang telah disusun dapat terealisasi semua. Namun tidak semua usulan mendapat bantuan dana yang memadai sehingga hanya usulan-usulan rencana kegiatan yang dianggap mendesak dan penting saja yang mampu direalisasikan terlebih dahulu.

Setiap usulan kegiatan yang diajukan oleh masyarakat hanya beberapa yang terealisasi oleh dana PNPM karena keterbatasan dana dan program

kegiatan yang membutuhkan dana yang cukup besar. Namun dari beberapa permasalahan masyarakat baik keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana maupun keadaan ekonomi mereka, koordinator program PNPM telah merealisasikan kebutuhan masyarakat diantaranya adalah :

1. Bidang Lingkungan :

- a. Terealisasinya makadam jalan di lingkungan masyarakat
- b. Terciptanya pembangunan aspal jalan
- c. Terwujudnya pembangunan parit dan drainase
- d. Terwujudnya pembangunan plengsengan
- e. Terwujudnya pembangunan rabat jalan Terealis
- f. asikannya pembenahan lingkungan untuk rehab rumah

2. Bidang Ekonomi :

- a. Terbukanya akses masyarakat untuk melakukan pinjaman lunak
- b. Terealisikannya pinjaman bergulir

3. Bidang Sosial :

- a. Terealisikannya pemberian asupan gizi kepada balita dan ibu hamil
- b. Terwujudnya pemberian bantuan sosial produktif kambing bergulir
- c. Terealisikannya bantuan APE TK dan PAUD sarana prasarana TK dan PAUD
- d. Terwujudnya pelatihan-pelatihan masyarakat produktif
- e. Terwujudnya sarana LES gratis untuk anak-anak warga miskin

Dari beberapa usulan kegiatan masyarakat yang telah berhasil direalisasikan melalui dana PNPM ada beberapa kegiatan yang mengalami

perubahan sehingga rencana kegiatan yang paling prioritas yang akan direalisasikan terlebih dahulu. Dengan adanya bantuan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan dan kegiatan untuk menunjang program PNPM ini beberapa kegiatan yang sudah berjalan mengalami peningkatan menjadidi lebih baik, berkurangnya jumlah masyarakat yang menerima bantuan juga menjadi salah satu bukti bahwa terjadinya peningkatan dalam keberhasilan kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat. seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Rini selaku anggota UPK :

“dengan adanya dana PNPM Mandiri Pedesaan ini ada beberapa peningkatan dalam realisasi dari program kegiatan. Salah satunya adalah perbaikan jalan umum yang dapat membantu perkembangan keuangan warga desa Ngadirengga. Walaupun tidak semua usulan kegiatan dapat terealisasi pada periode ini namun diusahakan dapat diusulkan kembali pada periode selanjutnya” (wawancara 24 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Dalam pelaksanaan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan para koordinator program memberikan arahan kepada perwakilan disetiap daerah di Desa Ngadirengga untuk menampung semua aspirasi masyarakat desa di wilayah tersebut. Masyarakat di setiap wilayah memiliki hak untuk memberikan usulan yang sesuai dengan kondisi wilayah saat itu seperti perbaikan jalan makadam, rehab untuk beberapa rumah yang tidak layak huni, sampai pada pelatihan yang banyak mendapat partisipasi dari masyarakat desa. Dari setiap usulan warga desa tersebut ditampung oleh perwakilan desa dan akan disampaikan kepada koordinator program kegiatan saat koordinator tersebut mendatangi dusun-dusun yang bersangkutan. Dari usulan yang telah ditetapkan sebagai rencana kegiatan, tidak semua rencana kegiatan dapat direalisasikan pada periode ini karena

kebutuhan masyarakat yang meningkat dan keterbatasan dana yang diperoleh mengakibatkan rencanakan kegiatan ini direalisasikan dalam beberapa periode. Apabila periode saat ini belum dapat direalisasikan semua, beberapa rencana kegiatan akan diusulkan kembali pada periode selanjutnya sampai pada kebutuhan masyarakat desa terpenuhi. Berikut adalah rencana kegiatan yang dilakukan dalam beberapa periode untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usulan dari warga masyarakat dapat terealisasikan :

Tabel 10
Pelaksanaan Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan
Wlingi Tahun 2011

No	Program	Lokasi			Volume	Biaya
		RT	RW	Dusun		
1	2	3	4	5	6	7
Bidang Lingkungan						
Target 1 : memperbaiki kondisi sarana jalan warga miskin 45%						
1	Aspal	1,2	4	Ngola'an	600x3	50.000.000
2	Rabat jalan	2	6	Nongkorejo	100x2	45.000.000
3	Makadam jalan (lanjutan)	3	9	Genjong	900x3	50.000.000
4	Rabat jalan	2	11	Perh. Nongkorejo	2x250	32.000.000
5	Makadam jalan	2	10	Genjong	2,5x100	13.000.000
6	Makadam jalan	3	10	Genjong	2,5x100	12.000.000
7	Makadam jalan	1	10	Genjong	2,5x100	30.000.000
8	Rabat jalan	2,3	9	Genjong	2x300	10.000.000
9	Makadam jalan	3	9	Genjong	2,5 x400	11.000.000
10	Rabat jalan	1	14	Perh. Pijiombo	2,5x200	20.750.000
11	Rabat jalan	2	14	Perh. Pijiombo	2,5x200	15.000.000
12	Rabat jalan	2	1	Ngadirengga	100x2,8	20.000.000
13	Rabat jalan	1,2	19	Perk. Sirah kengong	500	34.000.000
14	Makadam jalan		14	Pijiombo	3x1200	13.000.000
15	Rabat jalan	1	6	Nongkorejo	2x250	12.000.000
16	Makadam jalan		11	Ringin telu	3x1200	30.000.000
17	Rabat jalan			Ringin telu	2x250	10.000.000
18	Rabat jalan		6	Nongkorejo	2x250	15.000.000
19	Makadam jalan		6	Nongkorejo	3x1200	13.000.000
20	Makadam jalan	2	3	Ngadirengga	200x3	12.000.000
21	Makadam jalan	2,3	4	Ngola'an	600x3	30.000.000
22	Makadam jalan	1	6	Nongkorejo	190x2,5	10.000.000
23	Makadam jalan (putuk)	3	7	Sanggrahan	200x2,5	34.000.000
24	Makadam jalan	2	8	Sumberduren	500x2,5	13.000.000
25	Makadam jalan jurusan genjong	1,2	12	Perh. Ringin telu	800x1	12.000.000
26	Makadam jalan	1,2	14	Perh. Pijiombo	1000x1	45.000.000
Target 2 : saluran dan lahan rawan longsor teratasi 65%						

1	2	3	4	5	6	7
27	Parit	1,2	3	Ngadirengga	220x0,5	50.000.000
28	Parit	1,2	4	Ngola'an	600x0,5	45.000.000
29	Parit	1,2	8	Sumberduren	300x0,5	50.000.000
30	Drainase	2	11	Perh. Nongkorejo	2,5x250	32.000.000
31	Drainase	1	11	Perh. Ngkorejo	2x100	13.000.000
32	Parit / drainase	1	9	Genjong	3x500	12.000.000
33	Parit / drainase	2	10	Genjong	3x200	30.000.000
34	Parit / drainase	3	10	Genjong	3x300	10.000.000
35	Gorong-gorong	3	10	Genjong	2,5x4	11.000.000
36	Talut/ plengsengan	1	10	Genjong	5x10	20.750.000
37	Parit/drainase	1	10	Genjong	2x500	50.000.000
38	Parit/drainase	2	9	Genjong	2,3x500	45.000.000
39	Talut/plengsengan	2	9	Genjong	10x12	50.000.000
40	Parit/drainase	3	9	Genjong	2,3x400	32.000.000
41	Parit/drainase	1	14	Perh. Pijiombo	2,5x200	13.000.000
42	Talut/plengsengan	1	9	Genjong	3x3x7	12.000.000
43	Parit (depan bu gimah)	1	7	Sanggrahan	60x0,5	30.000.000
44	Plengsengan (depan bu tanem)	1	7	Sanggrahan	3x3x0,5	10.000.000
45	Talut	1	14	Perh.pijiombo	15x0,5	11.000.000
46	Plengsengan makam umum	Dsn	Dsn	Ngadirengga	500x3x0,5	20.750.000
47	Saluran irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	2000x1x0,5	50.000.000
48	Pembuatan dam irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	3	45.000.000
49	Plengsengan (depan slamet)	1	7	Sanggrahan	30x0,5	50.000.000
50	Plengsengan (depan selip jiono)	1	7	Sanggrahan	40x3x0,5	32.000.000
51	Parit	1,2	4	Ngola'an	200x0,5	20.000.000
52	Parit	2	11	Peh. Nongkorejo	150x0,5	12.000.000
53	Parit	2	1	Ngadirengga	120x0,5	30.000.000
54	Parit/drainase		1	Ngadirengga	0,4x1x200	10.000.000
55	Parit/drainase		9,10	Genjong	0,2x3x400	23.000.000
56	Talut + parit		3	Ngadirengga	5x3x25	20.750.000
57	Talut + parit		6	Nongkorejo	5x3x25	19.000.000
Target 3 : warga miskin mendapatkan pelayanan air bersih 100%						
58	Pipanisasi + tabung air bersih	1	16	Perk. Sengon	300+1	50.000.000
59	Pipanisasi	2	14	Perh.pijiombo	500	45.000.000
60	pipanisasi	4	19	Perk. Sirah kencing	500	50.000.000
61	Pipanisasi air +tandon	Dsn	Dsn	Genjong	1000+6	56.000.000
Target 4 : meningkatkan sarana jalan jembatan masyarakat 30%						
62	Pembangunan jembatan	3	19	Perk. Sirah kencing	6x2,5	76.000.000
63	Pembangunan jembatan		4,5	Ngola'an	3,5x40	150.000.000
Target 5 : meningkatkan sarana lingkungan masyarakat 56%						
64	Rehab rumah			Desa Ngadirengga	40 unit	50.000.000
65	Pembuatan MCK	1	11	Perh. Nongkorejo	3 unit	15.000.000
Bidang Sosial						
Target 1 : menurunkan angka lansia, ibu hamil dan balita kurang gizi 30%						
66	Asupan gizi lansia			Desa Ngadirengga	6 bln	15.000.000
67	Asupan gizi balita			Desa Ngadirengga	6 bln	25.000.000
68	Asupan gizi ibu hamil			Desa Ngadirengga	6 bln	17.000.000

1	2	3	4	5	6	7
Target 2 : meningkatkan ketrampilan masyarakat miskin dalam pengembangan inovatif masyarakat						
69	Pelatihan pembuatan pupuk kompos			Desa Ngadirengga	12 bln	10.000.000
70	Pelatihan pembuatan pakan ternak			Desa Ngadirengga	32 bln	10.000.000
71	Kambing bergulir			Desa Ngadirengga	36 bln	27.000.000
72	Pelatihan menjahit			Desa Ngadirengga	18 bln	18.000.000
73	Pelatihan tata boga			Desa Ngadirengga	6 bln	12.000.000
Target 3 : meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak miskin demi tercapainya kemampuan yang maksimal di dalam pendidikan dasar 20%						
74	Pelatihan pendidikan komputer bagi anak			Desa ngadirengga	12 bln	18.000.000
75	Pengadaan APE TK			Desa ngadirengga	23 bln	21.000.000
76	Pengadaan APE posyandu			Desa ngadirengga	18 bln	13.000.000
77	Program perpustakaan masy			Desa ngadirengga	36 bln	16.000.000
78	LES gratis			Desa ngadirengga	12 bln	10.000.000
79	Beasiswa bagi anak-anak miskin			Desa ngadirengga	12 bln	18.000.000
Bidang Ekonomi						
Target : meningkatkan pendapatan warga miskin 30 %						
80	Pinjaman bergulir bagi warga miskin			Kelurahan ngadirengga	21 KSM	190.000.000
Total						2.313.000.000

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan tabel 10 diatas menyatakan bahwa dari perencanaan kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat kepada koordinator PNPM tidak semua rencana kegiatan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Pada bidang lingkungan banyak kegiatan yang tidak masuk dalam rencana kegiatan namun masuk dalam SPJ pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan banyaknya rencana kegiatan yang tidak terduga setelah pengajuan rencana kegiatan untuk pencairan dana sehingga masih terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang tidak masuk dalam rencana kegiatan. Adanya kegiatan PNPM yang tidak masuk dalam rencana kegiatan lebih banyak pada daerah perkebunan atau perhutani yang tidak mengajukan usulan kegiatan untuk memperbaiki atau pembangunan sarana prasaran baru. Sehingga pihak koordinator tidak dapat mengajukan kondisi

kebutuhan masyarakat yang ada di daerah perkebunan dan perhutani namun pihak koordinator PNPM juga memprioritaskan kebutuhan bagi masyarakat yang ada di daerah perkebunan dan perhutani dengan tetap memberikan kebutuhan dana untuk membangun maupun untuk memperbaiki keadaan jalan agar dapat membantu meningkatkan perekonomian warganya. Daerah-daerah yang ada di Desa Ngadirengga yang sudah dapat terealisasi seperti aspal jalan, makadam jalan, rabat jalan, pembangunan plengsengan, pembangunan parit, irigasi. Semua kebutuhan sarana prasarana masyarakat tersebut dilakukan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Ngadirengga. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berikut adalah gambar pembangunan aspal jalan untuk membantu akses masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari :

Gambar 2
Pembangunan Aspal Jalan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan gambar 2 diatas ini merupakan gambar pembangunan aspal jalan yang ada di dusun Ngola'an di Desa ngadirengga dengan luas 600x3m, biaya yang diperkirakan dalam membangun aspal jalan ini sekitar Rp. 50.000.000 dan dalam pelaksanaannya dapat menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 50.000.000. untuk pembangunan asal jalan ini waktu yang dibutuhkan dalam satu periode sehingga tidak menghabiskan waktu untuk mengerjakan kegiatan dalam pembangunan aspal jalan. Dalam pembangunan aspal ini yang mengajukan usulan dalam rencana kegiatan ini dusun Ngola'an sedangkan dusun yang lain tidak mengajukan untuk rencana kegiatan pembangunan aspal jalan dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh warga masyarakat dan kontraktor untuk menyediakan alat-alat yang digunakan untuk pembangunan aspal jalan ini. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga)

Berikut adalah gambar pembangunan makadam jalan untuk membantu akses transportasi masyarakat Desa Ngadirengga :

Gambar 3
Pembangunan Makadam Jalan Desa Ngadirengga Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan gambar 3 diatas menyatakan adanya kegiatan para warga masyarakat Desa Ngadirengga yang membangun makadam jalan untuk membantu warga masyarakat lainnya dalam akses transportasi mereka. Pembangunan makadam jalan ini ada pada dusun genjong yang memiliki usulan dari masyarakat mengenai pembangunan jalan makadam maupun akses transportasi lainnya dengan luas 2,5x400 walaupun pada dusun yang lain memiliki luas yang berbeda dan menghabiskan biaya sekitar Rp. 11.000.000 yang sesuai dengan perkiraan biaya dalam rencana kegiatan. Keseluruhan biaya yang digunakan untuk pembangunan makadam jalan ini tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan karena wilayah di daerah perkebunan dan perhutani tidak mengajukan untuk pembangunan akses transportasi namun tetap memiliki hak untuk memperoleh dana dari PNPM karena masih termasuk dalam Desa Ngadirengga sehingga kebutuhan untuk kesejahteraan seluruh warga masyarakat desa Ngadirengga sangat diutamakan. (Dokumen Kntor Desa Ngadirengga)

Berikut adalah gambar pembangunan rabat jalan untuk memperbaiki jalan yang sudah tidak layak untuk dilewati :

Gambar 4
Pembangunan Rabat Jalan Desa Ngadirengga Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan gambar 4 diatas menyatakan pembangunan rabat jalan yang ada di Desa Ngadirengga yang dibantu oleh warga masyarakat karena akses transportasi ini juga digunakan untuk membantu masyarakat yang lain dan memudahkan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pembangunan rabat jalan ini ada di dusun Nongkorejo di Desa Ngadirengga dengan luas 100x2m, biaya yang diperkirakan mencapai Rp.45.000.000 dalam pembangunan rabat jalan ini dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan yang kurang lebih Rp. 45.000.000. Dalam pembangunan rabat jalan ini hampir semua dusun yang ada di desa Ngadirengga ini mengusulkan kegiatan ini agar masuk dalam rencana kegiatan dan dapat terealisasi. Rabat jalan ini lebih diutamakan pada jalan-jalan yang ada di daerah perkebunan dan perhutani karena jalan yang sudah tidak layak untuk dilewati yang akan menghambat transportasi para pihak perkebunan dan perhutani dalam mengembangkan usaha mereka di luar desa Ngadirengga. (Dokumen Kntor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berikut adalah gambar pembangunan plengsengan untuk mengurangi terkikisnya tanah oleh air hujan yang dapat mengakibatkan banjir :

Gambar 5
Pembangunan Plengsengan Desa Ngadirengga Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan gambar 5 diatas menyatakan kegiatan masyarakat Desa Ngadirengga dalam pembangunan plengsengan untuk mengurangi tanah longsor yang diakibatkan terkikisnya tanah oleh air hujan. Pembangunan ini ada di dusun genjong di Desa Ngadirengga dengan luas 10x12m dengan perkiraan biaya mencapai Rp.50.000.000 dan dalam pelaksanaannya menghabiskan biaya kurang lebih Rp.50.000.000 Pembangunan plengsengan ini diusulkan oleh beberapa dusun dan masuk dalam rencana kegiatan untuk direalisasikan, luas plengsengan yang akan di bangun pada setiap dusun berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dana yang diperkirakan untuk membangun plengsengan ini sesuai dengan target pada pelaksanaan kegiatan PNPM ini karena pembangunan plengsengan ini tidak dianggarkan pada daerah perkebunan dan perhutani sehingga dana yang masuk perkiraan sesuai dengan dana yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berikut adalah gambar pembangunan parit / drainase untuk aliran air di daerah-daerah yang rawan banjir pada saat musim hujan :

Gambar 6
Pembangunan Parit/ Drainase Desa Ngadirengga Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan gambar 6 diatas menyatakan pembangunan parit/ drainase untuk aliran air pada saat musim hujan agar mengurangi adanya banjir. Pembangunan parit/ drainase ini dilakukakn di daerah-daerah depan rumah warga masyarakat desa Ngadirengga yang sering tergenang air saat hujan. Pembangunan parit/ drainase ini ada di dusun Sanggarahan yang ada di depan rumah warga dengan luas 60x0,5m dengan perkiraan mencapai Rp.30.000.000 dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan total biaya yang ada dalam perencanaan kegiatan kurang lebih Rp. 30.000.000. Dari beberapa dusun mengusulkan rencana kegiatan pembuatan parit/ drainase ini dan dari usulan rencana kegiatan masyarakat tersebut dapat terealisasikan dengan biaya yang sesuai dengan perkiraan dana karena tidak mengangarkan pada daerah perkebunan dan perhutani yang belum

atau persis keadaan atau kondisi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di daerah perhutani dan perkebunan. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berikut adalah gambar pembangunan rehab rumah warga yang sudah tidak layak huni untuk diperbaiki :

Gambar 7
Pembangunan Rehab Rumah Warga Desa Ngadirengga Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga Tahun 2011

Berdasarkan gambar 7 diatas menyatakan adanya kegiatan pembangunan rehab rumah untuk rumah-rumah warga yang sudah tidak layak huni. Pembangunan rehab rumah ini pada rencana kegiatan diperkirakan ada 40 unit rumah yang akan di rehab pada Desa Ngadirengga dan untuk realisasi pelaksanaannya juga memenuhi target 40 unit dalam pembangunannya. Dana yang diperkirakan juga disesuaikan dengan biaya yang dihabiskan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp.50.000.000 dan dalam pelaksanaannya kurang lebih menghabiskan dana sebesar Rp. 50.000.000. Rehab rumah ini dilakukan merata dari seluruh desa Ngadirengga yang ada beberapa dusun,

rumah yang benar-benar membutuhkan bantuan dan sudah tidak layak untuk dihuni masuk dalam rencana kegiatan yang dapat direalisasikan. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Pada bidang kegiatan sosial beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam rencana kegiatan namun masuk dalam pelaksanaan kegiatan PNPM. Kegiatan yang masuk dalam pelaksanaan kegiatan namun tidak masuk dalam rencana kegiatan ini seperti asupan gizi pada lansia, pelatihan menjahit yang khusus untuk ibu-ibu, pelatihan tata boga bagi masyarakat umum dan untuk para ibu-ibu, pelatihan pendidikan komputer untuk anak-anak miskin, pengadaan posyandu, program perpustakaan masyarakat dan beasiswa untuk anak-anak miskin. Hal ini muncul karena terdapat dusun yang mengusulkan rencana kegiatan tersebut namun pada saat pelaksanaan kegiatan usulan untuk kegiatan tersebut muncul dan untuk pelatihan tersebut memiliki peminat yang lumayan sehingga pihak koordinator PNPM mencarikan dana untuk tetap terealisasikannya kegiatan program PNPM ini.

Berikut adalah gambar pelatihan bagi masyarakat Desa Ngadirengga dalam pembuatan pupuk kompos :

Gambar 8
Pembuatan Pupuk Kompos Desa Ngadirengga Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan gambar 8 diatas menyatakan kegiatan masyarakat dalam pelatihan pembuatan pupuk kompos di Desa Ngadirengga. Pada pelatihan pembuatan pupuk kompos ini banyak diminati oleh masyarakat karena warga masyarakat desa Ngadirengga yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan cukup dapat menggunakan keahlian ini untuk meningkatkan perekonomian kehidupan mereka. Pelatihan pembuatan pupuk kompos ini dilakukan selama 12 bulan untuk melihat potensi dari masyarakat Desa Ngadirengga sendiri dalam pelatihan yang dilakukan dan dalam rencana kegiatan perkiraan biaya yang dihabiskan sebesar Rp.10.000.000 sedangkan dalam pelaksanaa kegiatannya telah sesuai dengan perkiraan biaya yang telah direncanakan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000. Dalam jangka waktu 12 bulan tersebut diharapkan masyarakat nantinya dapat menggunakan keahlian selama

pelatihan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Berikut adalah gambar pelatihan pembuatan pakan ternak untuk warga masyarakat Desa Ngadirengga :

Gambar 9
Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Desa Ngadirengga Tahun 2011



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan gambar 9 diatas menyatakan kegiatan warga masyarakat yang melakukan pelatihan pembuatan pakan ternak di Desa Ngadirengga. Pelatihan pembuatan pakan ternak ini dilakukan selama 32 bulan dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 10.000.000 dan untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan perkiraan biaya yang sudah masuk dalam rencana kegiatan kurang lebih mencapai Rp. 10.000.000. Pelatihan dalam pembuatan pakan ternak ini diharapkan mampu melatih warga masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi mereka yang dapat meningkatkan penghasilan mereka. Pelatihan

pembuatan pakan ternak ini banyak diminati oleh warga masyarakat karena banyak masyarakat yang ada di Desa Ngadirengga yang memiliki hewan ternak yang dapat meningkatkan perekonomian sehingga untuk meminimalisir pengeluaran dalam pakan ternak maka dengan adanya pelatihan ini warga masyarakat selain mengembangkan potensi mereka dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru juga dapat digunakan sendiri hasil pembuatan pakan ternak tersebut. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Pada kegiatan dalam bidang ekonomi yang banyak mendapat respon paling banyak dari masyarakat adalah kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat yang khusus perempuan. Kegiatan simpan pinjam ini merupakan tanggung jawab langsung dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) sehingga untuk peminjaman dan pengembalian uang pinjaman ini langsung pada koordinator UPK. Untuk peminjaman uang ini dibagi dalam beberapa kelompok masyarakat yang nantinya untuk pengembalian peminjaman ini di tanggung oleh seluruh anggota kelompok hal ini dapat membantu meringankan pengembalian peminjaman kepada koordinator UPK. Namun untuk pengembalian peminjaman tersebut kurang dari 90% dana yang digunakan untuk kegiatan simpan pinjam tersebut dapat dihibahkan kepada kegiatan di bidang lingkungan yang masih banyak kebutuhan masyarakat Desa Ngadirengga yang belum dapat terealisasi.

Masyarakat yang menerima bantuan dari dana PNPM melalui program kegiatan PNPM mengalami kemajuan dalam beberapa program kegiatan. Pada kegiatan lingkungan dari beberapa tahun sebelumnya dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang masih tinggi saat ini semakin berkurang karena semakin banyak

kebutuhan masyarakat yang terpenuhi dengan berjalannya program PNPM melalui kegiatan di bidang lingkungan. Untuk bidang sosial minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosial seperti pelatihan untuk potensi masyarakat dan les gratis untuk anak-anak yang kurang mampu semakin menurun. Kegiatan yang memiliki mendapat respon dari masyarakat adalah pinjaman bantuan modal usaha. Namun kendala pada program kegiatan ekonomi ini adalah apabila masyarakat yang masuk pada kelompok impan pinjam pada pengembalian modal keseluruhan kurang dari 90% dana yang akan diberikan untuk program kegiatan ini pada tahun berikutnya tidak dapat diberikan dan akan dihibahkan pada program kegiatan lingkungan. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Dari setiap rencana kegiatan untuk kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan tersebut tidak semua program dapat berjalan sesuai harapan setiap tahun karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini. Dari sekian banyak rencana kegiatan untuk program pemberdayaan yang masih berjalan sesuai harapan adalah kegiatan simpan pinjam dalam bantuan modal usaha. Untuk les gratis hanya berjalan di awal pembentukan program kegiatan karena kurangnya dana dari PNPM Mandiri pedesaan yang sebagian besar dana dihibahkan pada perbaikan sarana dan prasarana pedesaan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anjar Sumariono pelaku BKM :

“ Rencana kegiatan dalam bidang sosial seperti les gratis hanya berjalan pada awal pembentukan rencana kegiatan, dikarenakan kekurangan dana dalam kegiatan tersebut. Kegiatan les gratis tersebut dapat terus berjalan apabila dari pihak masyarakat sendiri mau iuran untuk membayar guru pembimbing les gratis dan tidak mengandalkan dana dari program PNPM saja” (wawancara pada tanggal 23 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Dan untuk rencana kegiatan lainya yang tidak berjalan secara berkelanjutan seperti pelatihan pakan ternak dan pelatihan pupuk kompos itu disebabkan karena tidak ada minat atau partisipasi dari masyarakat sendiri mereka lebih minat pada kegiatan simpan pinjam untuk modal usaha mereka.

Pada program PNPM Mandiri Pedesaan setiap kegiatan yang diajukan membutuhkan rencana biaya yang berbeda. Sebelum dana PNPM yang bersumber dari dana APBN tersebut cair dan untuk menunjang kegiatan program PNPM rincian biaya tersebut diusulkan terlebih dahulu sesuai dengan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat setelah itu dana untuk kegiatan program PNPM dapat digunakan untuk menunjang kegiatan. Dengan rencana perkiraan biaya untuk kegiatan program PNPM selain karena mengikuti prosedur yang ada akan lebih memudahkan para koordinator program PNPM untuk memperkirakan semua usulan program beserta biaya yang akan dihabiskan untuk kegiatan tersebut.

Berikut adalah rincian total biaya yang diperoleh setelah pengajuan perkiraan biaya dan usulan kegiatan :

Tabel 11
Total Biaya Untuk Usulan Kegiatan Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011

No	Target Pencapaian	Total Biaya Yang Dibutuhkan
1	2	3
Bidang Lingkungan		
1.	Memperbaiki kondisi sarana jalan warga miskin 45 %	691.750.000
2.	Saluran dan lahan rawan lonsor teratasi 65%	809.250.000
3.	Warga miskin mendapatkan pelayanan air bersih 100%	201.000.000
4.	Meningkatkan sarana jalan jembatan masyarakat 30%	226.000.000
Sub Total		2.043.000.000
Bidang Sosial		
Kesehatan		

1	2	3
1.	Menurunkan angka lansia, ibu hamil dan balita kurang gizi 30%	57.000.000
Pelatihan		
1.	Meningkatkan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan inovatif masyarakat 30%	77.000.000
Pendidikan		
1.	Meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak miskin demi tercapainya kemampuan yang maksimal di dalam pendidikan dasar 20%	96.000.000
Sub Total		230.000.000
Bidang Ekonomi		
1.	Meningkatkan pendapatan warga miskin 30%	190.000.000
Sub Total		190.000.000
Total		2.313.000.000

Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Berdasarkan tabel 11 Dalam uraian total biaya untuk rencana kegiatan yang telah diusulkan ini, pada program kegiatan bidang lingkungan terdapat selisih biaya dalam pengadaaan biaya untuk melaksanakan program. Sesuai rencana kegiatan usulan masyarakat yang sudah ditetapkan biaya untuk bidang lingkungan mencapai Rp. 1.542.000.000 dalam jangka waktu 3 tahun periode sedangkan untuk biaya total yang dibutuhkan mencapai Rp. 2.313.000.000 dalam jangka waktu 3 tahun periode. Ini disebabkan karena adanya perbaikan tak terduga untuk sarana prasana akses transportasi masyarakat sehingga dana yang dibutuhkan keluar dari perkiraan usulan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dengan adanya kekurangan dana yang dialami dalam program ini koordinator PNPM Mandiri Pedesaan lebih mementingkan dana untuk program kegiatan yang sudah direncanakan dan untuk semua kekurangan perbaikan sarana prasarana yang belum dapat diatasi akan kembali diusulkan pada

rencana kegiatan pada tahun periode berikutnya yang menggunakan dana untuk program PNPM Mandiri Pedesaan yang baru.

Dalam bidang lingkungan perbaikan bagi kebutuhan masyarakat desa untuk akses sarana prasarana terdapat beberapa selisih kebutuhan yang tidak tepat sasaran dalam kebutuhan yang telah direalisasikan dengan rencana kegiatan yang telah diajukan. Dalam memperbaiki kondisi sarana prasarana jalan warga miskin untuk perencanaan kegiatan diperkirakan perbaikan sarana prasarana tersebut dapat selesai 37% dalam waktu 3 tahun sedangkan untuk realisasinya lebih meningkat menjadi 45% dari perkiraan. Saluran dan lahan rawan longsor teratasi untuk perkiraan rencana dapat terselesaikan 34% sedangkan pada realisasinya kebutuhan sarana prasarana ini mengalami peningkatan menjadi 65%. Warga miskin yang mendapatkan pelayanan air bersih untuk perkiraan rencana yang diajukan tidak masuk dalam rencana kegiatan sehingga tidak dianggarkan namun pada saat realisasi kebutuhan air bersih bagi warga ini muncul sehingga kebutuhan ini direalisasikan terlebih dahulu dengan realisasi 100%. Meningkatkan sarana jalan jembatan bagi masyarakat dalam perkiraan rencana tidak diajukan oleh masyarakat sehingga tidak masuk dalam anggaran perkiraan dan untuk realisasinya tepat mencapai 30% karena terdapat keluhan dari masyarakat untuk memperbaiki jembatan. Meningkatkan sarana lingkungan masyarakat yang diperkirakan dalam rencana adalah 25% sedangkan untuk realisasinya mengalami peningkatan yaitu 56%.

Pada rencana program kegiatan masyarakat dalam bidang sosial selisih dana yang diperoleh untuk melaksanakan kegiatan program PNPM Mandiri

Pedesaan tidak terlalu signifikan. Dalam hal pelatihan untuk mengembangkan potensi warga masyarakat yang tidak memiliki peluang kerja terdapat beberapa pelatihan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan ini disebabkan karena minat dari masyarakat yang kurang untuk beberapa pelatihan pengembangan potensi. Sehingga untuk meminimalisir pengeluaran dana dalam pelatihan ini hanya diambil beberapa pelatihan untuk masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi dari masyarakat yang tinggi. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam program kegiatan pelatihan ini dengan melihat minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan ini. Namun jika pelatihan yang diusulkan pada periode ini mengalami penurunan pada minat masyarakat yang mengikuti maka program kegiatan ini tidak akan diusulkan kembali pada periode berikutnya dan akan diganti dengan pelatihan baru yang juga dapat membantu pengembangan potensi masyarakat desa untuk membuka kesempatan kerja mereka sendiri.

Dalam bidang sosial pemenuhan kebutuhan masyarakat mengenai pelatihan-pelatihan yang dapat membantu masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan keahlian yang mereka miliki sampai pada peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak yang tergolong dari keluarga yang tidak mampu mengalami perbedaan dalam perencanaan kegiatan dengan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam menurunkan angka ibu hamil dan balita yang kurang gizi perkiraan rencana yang diajukan kebutuhan masyarakat ini dapat terselesaikan 30% dan pada realisasi kegiatan yang dicapai sama dengan yang telah direncanakan yaitu 30%. Meningkatkan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan inovatif masyarakat perkiraan rencana dapat dicapai 30%

sedangkan dalam realisasi kegiatannya mencapai 26% ini dikarenakan dana yang diperoleh digunakan terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan pada bidang lingkungan yang lebih prioritas dan tidak masuk dalam rencana anggaran. Meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak miskin demi tercapainya kemampuan yang maksimal di dalam pendidikan dasar dalam perkiraan rencananya dapat mencapai 56% untuk pendidikan anak seperti les gratis dan 25% untuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu namun yang dapat terealisasi hanya 20% karena lebih dipentingkan untuk kebutuhan bidang lingkungan masyarakat desa.

Rencana program kegiatan dalam bidang ekonomi ini memiliki selisih yang lebih sedikit dari pada program kegiatan bidang yang lainnya. Dalam bidang ekonomi desa Ngadirengga hanya memiliki satu program untuk membantu perekonomian masyarakat desa yaitu dengan memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat desa untuk modal usaha. Di Ngadirengga dalam memberikan pinjaman bergulir masyarakat untuk modal usaha masyarakat desa yang pada tahun 2007 modal awal untuk program ini sebesar Rp. 46.500.000 yang kemudian untuk saat ini terbagi menjadi beberapa kelompok masyarakat untuk memudahkan pinjaman modal usaha ini karena dalam program ini memiliki kesepakatan dalam peminjaman apabila dalam pengembalian kurang dari 90% dari beberapa kelompok masyarakat tersebut maka dana untuk mebiaya program kegiatan peminjaman modal usaha ini akan dihibahkan pada program kegiatan bidang lingkungan yang masih membutuhkan dana untuk memperbaiki sarana prasarana

akses pedesaan. Oleh karena itu dalam pengembalian uang pinjaman modal ini menjadi tanggungjawab semua anggota kelompok masyarakat yang terkait.

Dalam bidang ekonomi minat masyarakat sangat tinggi untuk bergabung dalam kelompok simpan pinjam yang di bentuk oleh koordinator kegiatan PNPM untuk membantu warga desa yang ingin membuka usaha atau lapangan pekerjaan sendiri namun memiliki masalah dalam permodalan. Untuk perencanaan kegiatan sebelum diadakannya kelompok simpan pinjam sampai pada pelaksanaan program kegiatan ini tidak terlalu memiliki masalah karena dengan minat masyarakat yang tinggi rencana kegiatan yang telah diajukan sesuai dengan pelaksanaan program kegiatan. Dalam meningkatkan pendapatan warga miskin dengan membuka kelompok simpan pinjam ini pada perkiraan rencana ini diperkirakan 30% dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya dalam realisasi kegiatan hasil yang telah dicapai 30%. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

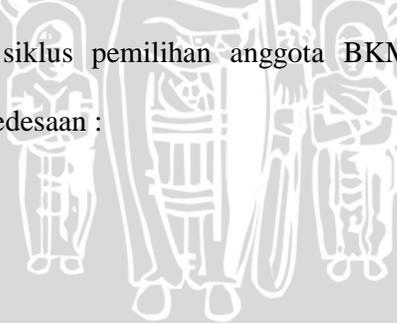
c. Keterlibatan Para Aktor Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaan program pemerintah yang ada di tingkat desa dengan kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan apabila tidak mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan program ini. Namun keberhasilan program PNPM Mandiri Pedesaan ini bukan hanya dari partisipasi masyarakat saja tetapi adanya partisipasi dan dukungan dari para anggota koordinasi program PNPM Mandiri Pedesaan dan perangkat desa yang ikut serta membantu pelaksanaan

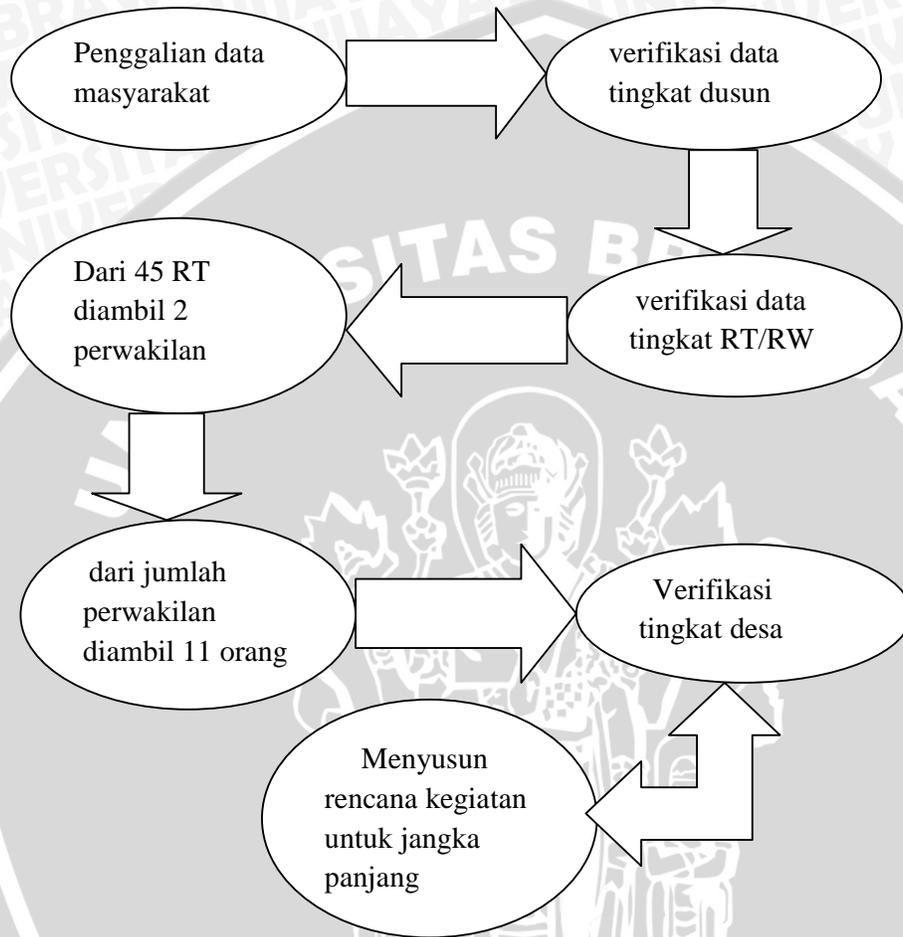
program ini. Adanya keterlibatan dari semua pihak dalam program ini maka program PNPM ini dapat berjalan.

Program PNPM Mandiri Pedesaan ini mengikutsertakan beberapa golongan masyarakat sebagai pelaksana program dan perangkat desa serta koordinator program PNPM lainnya sebagai pendamping atau pengarah program PNPM Mandiri Pedesaan. Kepala desa adalah sebagai perangkat yang juga ikut serta dalam program ini yang memiliki peran penting sedangkan lembaga pemerintahan desa seperti BKM atau penggerak dari program PNPM ini keikutsertaannya harus melewati pemilihan terlebih dahulu. Masyarakat yang menjadi sasaran utama adalah warga yang bertempat tinggal disekitar desa Ngadierengga dan pendamping dari kecamatan yang biasa disebut sebagai fasilitator dari kecamatan yang bertugas untuk mendampingi kegiatan PNPM diseluruh desa yang dibawahinya.

Berikut adalah siklus pemilihan anggota BKM sebagai penggerak program PNPM Mandiri Pedesaan :



Gambar 10
Siklus Pemilhan Anggota BKM
Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi



Sumber : Dokumen dari Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011

Anggota BKM adalah masyarakat yang menjadi sukarelawan untuk membantu program PNPM Mandiri Pedesaan. Pemilihan anggota BKM dilakukan berdasarkan penggalan sumber data yang ada di desa kemudian masyarakat yang mendaftarkan diri harus melakukan verifikasi pada tingkat dusun, verifikasi pada tingkat RT/RW dan dari tingkat RT/RW tersebut dipilih 11 orang dari 45 RT yang ada di desa Ngadirengga. Dari 11 orang yang terpilih tersebut harus melakukan

verifikasi di tingkat desa dan kemudian mereka resmi menjadi anggota BKM yang akan menyusun rencana kegiatan untuk 3 tahun ke depan. (Dokumen Kantor Desa Ngadirengga tahun 2011)

Masyarakat yang terpilih menjadi anggota BKM melalui pemilihan adalah masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, menjadi suka relawan untuk membantu keberhasilan program PNPM Mandiri Pedesaan. Masyarakat ini dikatakan sebagai relawan karena mereka bersedia mewakili dusun mereka untuk dipilih menjadi anggota BKM dan bekerja tanpa mendapat upah dari hasil kerja mereka. Dana dari PNPM Mandiri Pedesaan memang diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat sedangkan untuk anggaran para anggota BKM selaku penggerak program PNPM ini hanya sebagai stimulan dengan jumlah yang sedikit. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anjar Sumariono selaku BKM :

“ masyarakat yang bersedia menjadi anggota BKM itu adalah masyarakat yang berjiwa sosial memegang amanat masyarakat yang lain walaupun tidak mendapat gaji/ upah dari pemerintah dalam melaksanakan amanatnya karena dana yang diberikan oleh pemerintah hanya diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat. Yang dikhawatirkan hanya apabila para anggota yang lainnya sudah tidak mau bekerja membantu program PNPM lagi jika tidak mendapat upah/gaji dari hasil kerja mereka membantu pemerintah dan masyarakat lainnya” (wawancara pada tanggal 23 April 2014)

Dalam pelaksanaan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan anggota BKM memiliki peran yang penting untuk keberhasilan program kegiatan PNPM. Anggota BKM membantu perangkat desa yang lainnya untuk membentuk rencana kegiatan dan merealisasikannya. Semua yang tergabung menjadi anggota BKM merupakan sukarelawan dari masyarakat desa yang mengajukan diri dalam pemilihan anggota BKM yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui

pemilihan tingkat desa. Masyarakat desa yang terpilih menjadi anggota BKM tersebut melalui pemilihan tingkat dusun, tingkat RT/RW dan sampai pada tingkat desa. Tugas anggota BKM adalah membantu warga masyarakat untuk membuat rencana kegiatan yang berasal dari usulan warga masyarakat setiap dusun yang kemudian setiap usulan yang ada dipilih kegiatan yang paling mendesak untuk diajukan menjadi rencana kegiatan.

Dari tugas anggota BKM mulai dari membentuka perencanaan kegiatan yang akan diajukan untuk direalisasikan sampai pada pelkasnaan kegiatan program PNPM upah/gaji yang diperoleh tidak sebanding dengan hasil kerja mereka. Pendapatan anggota BKM tersebut biasanya diambilkn dari dana sisa pembuatan SPJ, tidak ada dana khusus yang digunakan unuk upah/gaji bagi anggota BKM. Dana untuk pendapatan anggota BKM sangat ditekan dan dana yang diperoleh dari pencairan dana tersebut diprioritaskan untuk pemberdayaan bukan untuk gaji/upah anggota BKM. Dengan adanya penekanan dalam pendapatan anggota BKM ini dikhawatirkan anggota BKM tidak bersedia untuk membantu pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan ini karena upah/gaji yang mereka terima tidak sesuai dengan hasil kerja keras mereka. Sedangkan koordinator lainnya banyak yang telah lepas tangan dalam program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini, mereka cenderung acuh dengan kegiatan PNPM. Sehingga hampir semua urusan yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Pedesaan ini dilakukan atau dikerjakan oleh anggota BKM agar program kegiatan PNPM ini dapat tetap berjalan dan berhasil sesuai dengan harapan.

d. Sosialisasi Terhadap Sasaran Program Dalam Pelaksanaan PNPM

Mandiri Pedesaan

Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pelaksanaan seluruh rencana kegiatan yang telah diusulkan dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM diperlukan subyek untuk menjalankan program rencana kegiatan tersebut. Masyarakat merupakan subyek utama untuk keberhasilan program PNPM Mandiri Pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah aspek penting dalam program PNPM Mandiri Pedesaan ini.

Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan semua kegiatan yang telah direncanakan sangat dibutuhkan. Kesejahteraan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mendapat kehidupan yang layak menjadi salah satu tujuan untuk diluncurkannya kebijakan ini. Keberhasilan suatu program akan dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai subyek dari program PNPM.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan program nasional yang dicanangkan oleh presiden untuk membantu mensejahterakan kehidupan seluruh masyarakat indonesia yang ada di daerah terutama yang bertempat tinggal di daerah pedesaan yang jauh dari pemantauan pemerintah pusat. Dengan adanya program ini akan membantu khususnya perekonomian masyarakat desa yang tergolong masyarakat miskin. Sejak adanya program PNPM ini yang khususnya pada pedesaan diperlukan adanya pemberdayaan-pemberdayaan untuk masyarakat miskin dalam membantu

mengembangkan potensi dan ketrampilan mereka untuk meningkatkan taraf hidup.

Dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat diperlukan sosialisasi program kepada masyarakat desa yang bantuan dari program PNPM ini. Sosialisasi tersebut digunakan agar masyarakat desa mampu memahami makna dan tujuan dari diadakannya program PNPM Mandiri Pedesaan. Di Desa Ngadirengga seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat baik membangun sarana prasarana untuk akses pekerjaan maupun pengembangan potensi masyarakat untuk usaha mereka harus dilakukan sosialisasi kegiatan terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi kebutuhan yang perlu diusulkan dalam rencana kegiatan program PNPM.

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat dari setiap dusun untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk membahas proyek yang akan diusulkan pada rencana kegiatan tahunan masyarakat dikumpulkan pada setiap dusun masing-masing, perangkat desa dan koordinator yang bertugas mendatangi dusun-dusun untuk melakukan sosialisasi dan melihat keadaan wilayah dusun. Pada tahap sosialisasi ini masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan masih memiliki tingkat partisipasi yang sangat kurang karena jaminan dari pihak perkebunan lebih menjanjikan dari pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program PNPM Mandiri Pedesaan.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rini selaku UPK :

“ sosialisasi program PNPM dan kegiatan yang akan diusulkan oleh masyarakat dilakukan dengan datang ke dusun-dusun, semua masyarakat dikumpulkan di dusun masing-masing dan memperkenalkan program PNPM Mandiri Pedesaan yang kemudian

dilanjutkan untuk mengidentifikasi semua permasalahan yang terjadi di dusun mereka. Kemudian permasalahan tersebut masuk dalam rencana kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan” (wawancara pada tanggal 24 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Dengan adanya sosialisasi program PNPM Mandiri Pedesaan dapat membantu perangkat desa dan koordinator PNPM untuk mengetahui permasalahan dan keadaan wilayah sebenarnya di setiap dusun. Untuk daerah perkebunan yang memang sulit untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan karyawan perkebunannya, koordinator PNPM tetap memberikan bantuan dana dari dana PNPM. Sisa dana dari kebutuhan masyarakat yang mendesak di daerah dusun akan diberikan kepada daerah perkebunan untuk akses jalan yang masih membutuhkan perbaikan agar mempermudah hasil perekonomian mereka.

e. Pemantauan Dalam Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan merupakan program pemberdayaan bagi masyarakat miskin. Seluruh kegiatan yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat miskin diusulkan dalam program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana tahunan program PNPM.

Dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM yang dibantu oleh perangkat desa, koordinator program PNPM dan partisipasi masyarakat juga didukung oleh pemantauan atau monitoring selama kegiatan program PNPM tersebut berlangsung. Pihak monitoring dalam pelaksanaan kegiatan program

PNPM dilakukan oleh fasilitator dari kecamatan yang bertugas untuk mendampingi selama kegiatan berlangsung pada seluruh desa yang dibawahinya. Para fasilitator dari kecamatan tersebut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan program karena program PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah turunan dari program kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga untuk pengawasan atau pemantauan dilakukan dari pihak kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rini selaku UPK :

“ untuk pendamping atau yang bertugas memantau seluruh kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan adalah pihak fasilitator dari kecamatan. Para fasilitator bertugas untuk melakukan pendampingan dan pemantauan kepada seluruh desa yang dibawahinya. Sehingga satu fasilitator dari kecamatan bisa mengawasi atau memantau kegiatan program PNPM ini dengan jumlah lebih dari satu desa dalam satu kecamatan” (wawancara pada tanggal 24 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Fasilitator yang bertugas untuk melakukakn pemantuan pada kegiatan program PNPM Mandiri Pedesaan yang diberikan amanat oleh kecamatan tersebut adalah lulusan sarjana dari berbagai universitas. Di Kecamatan Wlingi memilki 5 orang fasilitator yang bertugas untuk memantau setiap desa yang menjadi tanggungjawab dari masing-masing fasilitator. Dari 5 fasilitator untuk kecamatan wlingi yang diambil untuk program kegiatan lingkungan berasal dari lulusan teknik, untuk program kegiatan ekonomi berasal dari lulusan ekonomi sedangkan untuk program kegiatan sosial mengambil dari semua jurusan.

Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui proses dari kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dan tingkat keberhasilan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Hasil dari usulan kegiatan tersebut adalah adanya sarana prasarana

yang memadai sampai pada pengembangan potensi dari masyarakat untuk taraf hidup yang lebih baik. Apabila semua sasaran kegiatan program PNPM tersebut tidak berjalan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan maka pihak fasilitator memberikan laporan kepada kecamatan dan dana untuk program PNPM yang tidak memenuhi dan terealisasi sesuai usulan kegiatan dapat ditunda untuk pencairan dananya. Dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tahun selanjutnya tidak akan diberikan sebelum rencana kegiatan yang diusulkan pada tahun sebelumnya belum terealisasi.

Dengan adanya usulan kegiatan oleh masyarakat Desa Ngadirengga dan pemantauan dari para fasilitator harapannya program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini akan lebih banyak hasil yang diciptakan dari program PNPM ini. Dapat mengurangi tingkat penyelewengan dana untuk program kegiatan PNPM karena kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat desa adalah tujuan utama dari program PNPM Mandiri Pedesaan. Pada program kegiatan PNPM terdapat usulan kegiatan yang mampu memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sehingga mampu untuk membantu perekonomian masyarakat.

f. Penerimaan Masyarakat Dalam PNPM Mandiri Pedesaan

Diluncurkannya kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ini dan dilimpahkannya pada daerah untuk mengembangkan program pemerintah ini dengan dana yang akan diberikan dan dikelola di daerah. Pada tingkat daerah program PNPM Mandiri ini

dikembangkan kembali kepada kecamatan dan pedesaan sehingga program PNPM ini merata sampai pada tingkat desa karena masyarakat yang tergolong miskin lebih banyak bertempat tinggal di desa dengan sarana prasarana yang belum memadai. Tingkat kemiskinan yang ada di desa masih tergolong tinggi dengan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan kurangnya sarana prasarana pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu.

Di daerah pedesaan program PNPM ini sangat dibutuhkan melalui bantuan dana dengan mengembangkan kegiatan sosial, perbaikan lingkungan bahkan untuk bidang perekonomian masyarakat. Melihat kondisi pedesaan sebelum mendapat bantuan dari dana PNPM Mandiri Pedesaan banyak sarana prasarana yang kurang memadai untuk akses usaha masyarakat desa. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi alasan berikutnya untuk mengusulkan kegiatan yang dapat membantu masyarakat untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan mengembangkan potensi yang ada dalam individu masyarakat seperti melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat bermanfaat dan memberikan penghasilan. Namun masyarakat desa banyak yang melakukan pro dan kontra dengan adanya program PNPM Mandiri Pedesaan ini.

Pada Desa Ngadirengga respon masyarakat terhadap adanya kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan yang membantu kesejahteraan masyarakat ini tidak semua masyarakat mampu menerima dengan baik program PNPM ini. Masyarakat Desa Ngadirengga memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda sebagian dari jumlah masyarakat bekerja sebagai buruh perkebunan. Mayoritas masyarakat Desa setuju dan menerima dengan baik adanya kebijakan program

PNPM Mandiri Pedesaan namun warga masyarakat yang bekerja di daerah perkebunan kurang memiliki partisipasi yang baik terhadap program PNPM ini. Para karyawan yang bekerja di perkebunan tersebut merasa bahwa segala sarana prasarana dan jaminan perekonomian sudah menjadi tanggungjawab pihak perkebunan sehingga apabila koordinator membutuhkan wakil untuk mengusulkan kegiatan yang akan direncanakan kurang mendapat respon yang baik dari warga yang bekerja sebagai karyawan perkebunan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rini Selaku UPK :

“ di Desa Ngadirengga ini terdapat 3 perkebunan dan masyarakat Desa Ngadirengga sebagian bekerja sebagai karyawan perkebunan. Masyarakat yang bekerja sebagai karyawan perkebunan tersebut kurang berpartisipasi untuk program PNPM ini karena para karyawan tersebut merasa selama ada kerusakan terhadap sarana prasarana dan jaminan perekonomian sudah menjadi tanggungan perusahaan sehingga apabila dibutuhkan perwakilan untuk mengelola proyek kegiatan pihak perkebunan tersebut tidak mengirimkan perwakilannya” (wawancara pada tanggal 28 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Dengan adanya rencana kegiatan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan ini banyak mengalami perubahan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Mengurangi tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan utama dengan bantuan dana melalui rencana kegiatan PNPM. Sarana prasarana untuk membantu masyarakat mengelola usaha mereka saat ini telah terelaisasikan, bantuan untuk sarana pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu sudah mulai berjalan. Oleh karena itu masyarakat Desa Ngadirengga dapat menerima dengan baik adanya kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini dengan menumbuhkan tingkat partisipasi yang tinggi kepada masyarakat desa merupakan

wujud bahwa sebagian masyarakat tidak menolak adanya program PNPM Mandiri Pedesaan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Ngadirengga

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam pelaksanaan program kegiatan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik dari para koordinator untuk program PNPM ini dan juga partisipasi penerimaan masyarakat yang mampu menerima program ini dan ikut andil dalam melaksanakan program kegiatan yang ada. Karena setiap rencana kegiatan yang diusulkan tersebut adalah bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Program PNPM Mandiri Pedesaan ini dibuat untuk membantu masyarakat miskin karena saat ini permasalahan tingkat kemiskinan di negara Indonesia belum dapat diselesaikan apabila pemerintah tidak melakukan kebijakan yang serius dan memihak keluarga miskin.

Dalam menjalankan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan tidak luput dari hal-hal yang mendukung adanya program PNPM Mandiri Pedesaan ini sampai dikatakan berhasil mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun bukan hanya hal-hal yang mendukung program ini namun kendala yang ada di dalamnya sehingga dapat menjadikan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini berubah menjadi lebih baik dengan mengetahui semua kendala yang ada dan menyiapkan solusi yang tepat agar kendala yang muncul dapat teratasi

dan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat berhasil sesuai harapan semua kalangan masyarakat. Karena suatu keberhasilan sebuah program adalah dapat menyelesaikan segala permasalahan yang muncul, dapat menemukan solusi yang tepat pada semua kendala yang ada.

a. Faktor Pendukung

1. Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini merupakan keseluruhan yang berhubungan dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan. Petunjuk teknis dari pusat tersebut mulai dari tujuan diadakannya program PNPM Mandiri Pedesaan, visi misi dalam pelaksanaannya, peran pelaku yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan seperti koordinator program sampai peran kepala desa dan seluruh perangkat untuk membantu program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini. Tidak hanya pelaku yang ada di pedesaan yang dapat mengkoordinir kegiatan program PNPM ini namun juga pelaku dari kecamatan yang berwenang atau bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Berikut adalah contoh petunjuk teknis dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan :

I. KEBIJAKAN POKOK

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Keluaran program
- 1.4 Prinsip dasar PNPM
- 1.5 Sasaran PNPM
- 1.6 Pendanaan

III ALUR KEGIATAN

- 3.1 Perencanaan Kegiatan
- 3.2 Pelaksanaan Kegiatan
- 3.3 Pelestarian Kegiatan

IV. PENGENDALIAN

- 4.1 Pemantauan Kegiatan

1.7 Ketentuan dasar PNPM

4.2 Evaluasi

II. PERAN PELAKU

4.3 Laporan

2.1 pelaku di desa

4.4 Pengelolaan Pengaduan

2.2 pelaku di kecamatan

masalah

2.3 pelaku di kabupaten

Dengan adanya petunjuk teknis tersebut masyarakat desa yang ingin mengetahui tujuan dari adanya program ini, mulai dari proses perencanaan program kegiatan samapai pada pelestarian kegiatan melalui alur kegiatan yang telah ditetapkan. Alur kegiatan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat desa juga terdapat dalam petunjuk teknis agar masyarakat mampu dan mudah untuk mempelajari mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai pada pelestarian kegiatan agar kegiatan yang sudah dapat direalisasikan dapat dijaga atau bahkan dapat dikembangkan oleh masyarakat desa. Dan yang terakhir mengenai pengendalian program seperti pemantauan atau pengawasan dalam jalannya kegiatan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini. Evaluasi kerja setelah selesai kegiatan dan kemudian pelaporan dari koordinator desa kepada fasilitator yang di tunjuk langsung oleh kecamatan untuk memberikan tanggung jawab kepada fasilitator memberikan pengawasan pada desa yang bersangkutan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Rini selaku anggota UPK :

“ salah satu yang mendukung pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah petunjuk teknis, dalam petunjuk teknis ini semua program PNPM ada dalam petunjuk teknis, alur proses perencanaan program kegiatan sampai pada evaluasi kegiatan. Tidak semua warga atau koordinator program PNPM memahami proses kegiatan PNPM walaupun dengan sosialisasi sehingga petunjuk teknis ini dapat membantu” (wawancara pada 24 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Petunjuk teknis membantu untuk memudahkan para pelaku kebijakan program PNPM untuk dapat menjalankan kegiatan karena keberhasilan program ini adalah minimalnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan ini. Wujud nyata keberhasilan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini dilihat dari usulan rencana kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat desa kemusian dapat direalisasikan dan hasil dari kegiatan tersebut adalah perbaikan sarana prasarana, dibentuknya sarana prasarana baru untuk memudahkan masyarakat desa dalam akses mereka melakukan pekerjaan mereka. Karena sarana prasarana yang rusak akan menghambat masyarakat desa untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan bukti nyata dari keberhasilan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Adanya perbaikan atau bahkan pembuatan sarana prasarana yang baru bagi masyarakat adalah output dari rencana kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini karena adanya sarana prasarana ini dapat membantu masyarakat desa untuk akses transportasi kehidupan sehari-hari mereka seperti pembangunan aspal jalan, pembangunan makadam jalan di lingkungan masyarakat. Dan untuk sarana prasarana yang lainnya yang dapat membantu masyarakat desa adalah pembangunan parit untuk aliran air hujan karena keluhan masyarakat saat ini adalah masih sering terjadinya banjir pada saat musim hujan. Pembembenahan lingkungan untuk perbaikan rumah masyarakat desa yang tidak layak huni juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat karena

tempat tinggal yang layak juga merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa.

Kebutuhan masyarakat terkait dengan terpenuhinya sarana prasarana bukan hanya dari perbaikan akses jalan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat desa namun juga peningkatan perekonomian masyarakat desa menjadi salah satu bentuk sarana prasarana dalam hal lain. Peningkatan perekonomian masyarakat desa seperti pada peminjaman modal usaha adalah bentuk sarana prasarana agar masyarakat desa mampu untuk menggunakan modal usaha tersebut untuk membuka usaha baru, menggunakan modal yang telah dipinjam untuk menghasilkan modal baru bagi mereka dan dengan adanya hal itu dapat membantu masyarakat desa untuk memperbaiki perekonomiannya dan bahkan dapat meningkatkan perekonomian mereka yang tergolong warga miskin.

Pemenuhan sarana prasarana lainnya juga ada dari pengembangan potensi masyarakat desa dalam melatih keahlian mereka untuk membantu mereka mengenal keahlian yang mereka miliki. Dengan adanya keahlian atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa tersebut dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi mereka warga masyarakat yang tidak memiliki kesempatan kerja di tempat lain. Menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan keahlian yang dimiliki akan lebih menghasilkan laba yang banyak dan apabila mereka yang telah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dapat memperkerjakan warga masyarakat desa yang lain untuk bersama-sama meningkatkan perekonomian mereka. Pengembangan potensi tersebut antara lain pelatihan pakan ternak dan pelatihan pupuk kompos. Dan sarana prasarana yang

lainnya adalah memberikan sarana untuk sekolah TK dan PAUD juga les gratis kepada anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu agar mereka juga mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak walaupun mereka belum bisa mendapatkan sarana pendidikan di sekolah formal. Seperti yang telah ditingkatkan oleh Ibu Rini selaku anggota UPK :

“ adanya sarana prasarana ini bukan hanya mendukung masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka namun juga mendukung keberhasilan program kegiatan PNPM mandiri Pedesaan ini. Keberhasilan program kegiatan PNPM yang dapat dilihat adalah terealisasinya semua rencana kegiatan yang telah terealisasikan karena peningkatan akses sarana prasarana mampu membantu peningkatan perekonomian masyarakat desa Ngadirengga” (wawancara pada 25 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga

Terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dari perbaikan sarana prasarana sampai pada peningkatan perekonomian masyarakat desa merupakan hal yang paling mendukung dalam kebijakan program PNPM. Seperti yang dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat desa adalah tujuan utama diluncurkannya kebijakan program PNPM mandiri Pedesaan ini sehingga segala sesuatu yang terkait dengan terpenuhinya segala kebutuhan bagi masyarakat desa akan menjadi prioritas utama bagi koordinator kebijakan program kegiatan PNPM. Dalam pelaksanaan program kegiatan PNPM ini tidak semua rencana kegiatan yang telah direncanakan sebagai proyek kegiatan akan dilaksanakan karena koordinator program kegiatan lebih memprioritaskan kegiatan mana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa, sehingga untuk rencana kegiatan yang belum dilaksanakan pada periode ini akan kembali dimasukkan dalam rencana kegiatan pada periode berikutnya.

b. Faktor Penghambat

1. Keterlibatan Para Aktor

Keterlibatan aktor merupakan keterlibatan seluruh anggota yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ataupun subyek yang menjalankan kebijakan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan tersebut. Para pelaku program kegiatan yang terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam program kegiatan ini adalah kepala desa beserta perangkat desa yang lainnya, fasilitator dari kecamatan dan yang paling penting adalah adanya masyarakat yang bersedia untuk diberdayakan dalam melaksanakan program kegiatan PNPM. Masyarakat menjadi subyek utama dalam pelaksanaan program ini karena sasaran utama dari kebijakan program ini adalah masyarakat yang tergolong miskin yang bersedia untuk diberdayakan melalui program ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan penting.

Di Desa Ngadirengga dalam pelaksanaan rencana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kurangnya respon yang baik dari sebagian masyarakat desa. Di desa Ngadirengga terdapat 3 perkebunan yang sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai karyawan perkebunan. Dalam setiap rencana kegiatan masyarakat setiap dusun memiliki hak untuk memberikan usulan mereka dalam rencana kegiatan untuk satu periode namun di 3 perkebunan tersebut tidak mengirimkan wakilnya. Pihak koordinator kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan tetap memberikan proyek atau rencana kegiatan dengan dana yang diberikan namun proyek yang diberikan tersebut belum juga diselesaikan dan

seharusnya SPJ kegiatan sudah harus selesai sebelum rencana kegiatan berikutnya. Hal ini mengakibatkan tertundanya rencana kegiatan yang akan diusulkan oleh masyarakat desa untuk periode berikutnya.

Beberapa kendala lainnya muncul dari lepasnya tanggung jawab KSM dalam pelaksanaan rencana kegiatan PNPM. Kendala dalam KSM ini adalah proyek yang akan dijalankan oleh masyarakat, untuk melakukan rencana kegiatan yang baru KSM tahap pertama harus terlebih dahulu selesai dilakukan namun KSM tidak peduli akan hal pengusulan rencana proyek yang baru sehingga untuk menentukan proyek kedua sulit untuk dilakukan. Selama ini KSM tidak peduli dengan proyek yang masuk dalam rencana kegiatan masyarakat dan untuk sementara yang menyelesaikan proyek tersebut agar dapat menentukan proyek yang kedua adalah BKM, sedangkan dalam menyelesaikan proyek ini pihak BKM sendiri tidak mendapat anggaran dana untuk gaji mereka karena secara sukarela pihak BKM ini membantu pelaksanaan proyek ini. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rini selaku UPK :

“ selama ini BKM membantu menyelesaikan proyek yang sebenarnya menjadi tanggung jawab anggota KSM tanpa mendapat gaji, mereka melakukan secara sukarela. Apabila ada sisa dana dari pembuatan SPJ yang diambilkan dari dana rencana kegiatan PNPM yang dicairkan maka itu akan diberikan kepada anggota BKM untuk gaji mereka. Gaji yang diperoleh dari hasil kerja mereka rata-rata Rp 100.000 – Rp 200.000 per bulan” (wawancara pada tanggal 28 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Anggota BKM merupakan sukarelawan dari warga masyarakat yang membantu program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Anggota BKM bukan hanya membantu perangkat desa dalam program kegiatan namun juga membantu

anggota koordinator yang lain dalam menyelesaikan tugasnya sebagai koordinator program kegiatan PNPM. Dengan pelakasnya tugasnya anggota BKM tidak mendapatkan upah/gaji sesuai dengan hasil kerjanya, pendapatan yang diperoleh oleh anggota BKM tersebut diambil dari sisa pembuatan dana SPJ yang dianggarkan. Koordinator yang lain sudah mulai lepas tangan dalam program kegiatan PNPM sehingga agar program kegiatan PNPM ini tetap berjalan maka anggota BKM bersedia untuk membantu menyelesaikan proyek dari koordinator PNPM yang sudah diabaikan. Dana untuk gaji/upah para anggota BKM lebih ditekankan dan lebih diprioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Keterbatasan Penyaluran Dana

Pendanaan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Karena faktor yang terpenting setelah permasalahan yang muncul dan dimasukkan dalam proses perencanaan kegiatan adalah biaya yang akan dihabiskan dalam pelaksanaan rencana kegiatan PNPM tersebut. Tanpa adanya perencanaan yang pas dan pendanaan yang mendukung program kegiatan ini proyek rencana kegiatan PNPM tidak akan dapat dilaksanakan. Anggota BKM bertugas untuk mengelola perencanaan kegiatan yang disulkan oleh warga masyarakat desa dan seluruh keuangan yang akan digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan. Seperti yang telah ditingkatkan oleh Ibu Rini selaku anggota UPK :

“dana untuk pelaksanaan program kegiatan PNPM ini diperoleh dengan mengajukan usulan dan rincian biaya yang sesuai dengan kondisi wilayah yang membutuhkan bantuan. Namun kenyataannya dana yang diperoleh belum mampu untuk merealisasikan semua program kegiatan

yang telah direncanakan, akibatnya rencana kegiatan masyarakat yang lebih menesak terlebih dahulu yang akan terealisasi. Walaupun sudah ada usulan kegiatan dan rincian biaya namun kondisi wilayah di desa sewaktu-waktu akan berubah selama menunggu pencairan dana” (wawancara pada 25 April 2014 di Kantor Desa Ngadirengga)

Kendala yang muncul dalam penyaluran dana ini adalah kurangnya dana yang diberikan untuk membantu masyarakat desa sehingga dana yang akan digunakan untuk program rencana kegiatan yang lain harus digunakan untuk rencana kegiatan yang lebih mendesak terlebih dahulu. Walaupun dibutuhkan perkiraan biaya terlebih dahulu dalam perencanaan kegiatan untuk proyek masyarakat agar dapat mengetahui jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk proses pelaksanaan program kegiatan. Namun semua perkiraan biaya yang dilakukan dan diajukan untuk mecairkan dana tidak sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. Biaya yang diperlukan lebih banyak daripada perkiraan biaya yang telah diajukan karena terdapat kebutuhan masyarakat desa yang belum dapat terealisasi pada periode saat ini sehingga dengan keterbatasan dana yang diperoleh dari pencairan dana tersebut kebutuhan masyarakat desa yang paling mendesak yang akan direalisasikan terlebih dahulu.

Apabila dilihat pada program rencana kegiatan bidang lingkungan biaya yang diperkirakan dalam proses pelaksanaan kegiatan PNPM tersebut memiliki selisih yang berbeda dari jumlah seluruh kebutuhan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu koordinator penanggung jawab program PNPM dalam rencana kegiatan lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak seperti memperbaiki jalan sesuai dengan jumlah dana yang telah diperoleh. perbaikan sarana prasarana untuk setiap dusun memberikan usulan rencana kegiatan tersebut

dengan ukuran jalan yang dapat dikatakan cukup lebar sehingga dana yang akan digunakan untuk perbaikan sarana prasarana tersebut tidak sesuai dengan perkiraan biaya yang telah dianggarkan karena masih banyak usulan-usulan yang tak terduga yang menjadikan rencana kegiatan ini semakin meluas dan biaya yang dibutuhkan semakin banyak dari pada dana yang telah dicairkan untuk proses pelaksanaan program kegiatan PNPM.

Namun dengan adanya keterbatasan dana yang diperoleh untuk memperbaiki sarana prasarana maupun pembuatan sarana prasarana baru pihak koordinator masih memberikan sisa dana untuk daerah yang masih membutuhkan dan program PNPM untuk memperbaiki ataupun membangun sarana prasarana yang baru akses bagi masyarakat desa walaupun di daerah tersebut tidak mengirimkan wakilnya untuk memberikan usulan bagian mana yang masih perlu mendapat perbaikan dan perhatian dari penanggungjawab program rencana kegiatan PNPM. Dana yang diberikan untuk daerah yang tidak mengirimkan wakilnya tersebut tidak sebesar dana yang masuk dalam rencana kegiatan karena koordinator program rencana kegiatan PNPM tidak mengetahui kondisi fisik yang sebenarnya di daerah tersebut.

C. Pembahasan Data Fokus Penelitian

1. Efektivitas Penerapan PNPM Mandiri Pedesaan dalam Pembangunan Desa untuk Pengentasan Kemiskinan Di Desa Ngadirengga

Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Seperti yang diungkapkan oleh Yulianti, 2012:14 Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Sehingga jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan ketepatan perencanaan semua program kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan proses pencapaian atau pelaksanaan program kegiatan PNPM harus sesuai. Karena ketidaksesuaian akan dianggap bahwa program PNPM Mandiri Pedesaan ini dikatakan tidak dapat berjalan secara efektif sesuai dengan harapan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa proses perencanaan kegiatan yang telah ditentukan telah sesuai atau belum sesuai dengan proses pelaksanaan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini.

a. Proses Perencanaan Program PNPM Mandiri Pedesaan

Untuk menentukan sebuah perencanaan harus memperhatikan beberapa penekatan dalam pembangunan desa untuk membantu proses perencanaan yang sesuai dengan perencanaan yang akan dilakukan. Dalam pembangunan desa terdapat beberapa pendekatan untuk mengidentifikasinya beberapa diantaranya adalah Pendekatan berbasis sumberdaya alam dan Pendekatan untuk mempercepat perbaikan dalam perekonomian pedesaan. Pendekatan berbasis sumberdaya alam, pendekatan ini melalui penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis dan kerajinan/industri kecil serta pembangunan kelembagaan untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam. Sedangkan Pendekatan untuk mempercepat perbaikan dalam perekonomian pedesaan, pendekatan ini lebih memfokuskan melalui perencanaan tata ruang baik aspek fisik maupun aspek sosial ekonomi yang diharapkan mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan khusus daerah yang terbelakang. (Rahardjo, 2013 : 13)

Di desa Ngadirengga sebelum menentukan rencana kegiatan yang kemudian akan ditentukan sebagai proyek kegiatan muncul beberapa permasalahan dari masyarakat desa mengenai kurangnya sarana prasarana untuk jalan desa yang masih terbuat dari tanah sehingga perlu adanya makadam jalan untuk perbaikan akses jalan, failitas untuk akses jalan atau daerah-daerah di wilayah desa yang masih mengalami longsor apanila hujan turun, banyak warga desa yang miskin yang menempati rumah atau tempat tinggal yang layak huni sehingga dibutuhkan rehab rumah, pelatihan untuk peluang kesempatan kerja bagi mereka yang

berpendidikan rendah sehingga kurang memiliki ketrampilan dalam bekerja, kurangnya fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu sehingga dibutuhkan les gratis atau pembelajaran gratis bagi mereka yang tidak mampu untuk biaya sekolah formal dan bahkan keluhan untuk modal usaha mereka yang tidak memiliki kesempatan kerja seperti masyarakat yang beruntung. Dari berbagai permasalahan maka dibentuk Rencana kegiatan dalam kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini masuk dalam kegiatan tahunan.

Rencana kegiatan yang telah disusun kemudian ditentukan alternatif kebutuhan yang akan dijadikan proyek dan dilaksanakan oleh masyarakat. Usulan rencana kegiatan tersebut dilakukan sendiri oleh masyarakat desa dalam setiap dusun yang mengirimkan wakilnya untuk mendata kebutuhan apa saja yang akan diusulkan untuk dijadikan rencana kegiatan. Sehingga proyek yang ditentukan dari rencana kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa di setiap dusun dan untuk kebutuhan kegiatan mereka memiliki kebutuhan kegiatan yang berbeda-beda oleh karena itu setiap masyarakat desa memiliki hak untuk menentukan rencana kegiatannya sendiri melalui wakil yang dipilih.

Usulan rencana kegiatan tersebut sesuai dengan permasalahan yang muncul pada masyarakat desa. Setelah usulan kegiatan dari masyarakat desa dikumpulkan tugas dari koordinator program PNPM memilih rencana kegiatan yang paling prioritas, kebutuhan masyarakat desa yang paling mendesak yang akan direalisasikan terlebih dahulu. Hal ini dilakukakn karena mengingat keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola program

ini. Dari permasalahan yang muncul rencana kegiatan yang akan direalisasikan atau diprioritaskan terlebih dahulu adalah membangun makadam jalan, aspal jalan, rabat jalan, pembuatan plengsengan, rehab plengsengan apabila mengalami kerusakan dan butuh perbaikan, pembuatan parit untuk pengairan air hujan, rehab rumah untuk masyarak desa yang memiliki rumah tidak layak huni, memberikan sarana prasaran untuk sekolah anak-anak yang kurang mampu, memberikan les gratis untuk anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa yang tidak mendapatkan peluang kerja untuk menggali potensi mereka dan menumbuhkan keahlian pada diri mereka agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi diri mereka sendiri, dan pemberian pinjaman modal usaha bagi mereka yang membutuhkan modal untuk usaha mereka agar dapat memperbaiki perekonomian mereka.

Dari alternatif kebutuhan yang telah ditentukan melalui usulan rencana kegiatan masyarakat dibutuhkan jumlah atau besaran yang akan dilakukan perbaikan maupun kebutuhan yang baru akan dibuat. Untuk makadam jalan, aspal jalan, rabat jalan harus ditentukan besaran yang akan diperbaiki agar memudahkan koordinator program untuk mendeteksi kaebutuhan masyarakat yang akan direalisasikan. Begitu juga untuk pembuatan parit, pembuatan dan rehab plengsengan, rehab bagi rumah yang layak huni harus ditentukan jumlah rumah yang perlu untuk dipebaiki dalam bentuk unit. Bagi pelatihan-pelatihan yang akan diberikan kepada masyarakat disesuaikan dengan jumlah warga masyarakat yang memiliki minat tinggi dalam mengikuti peltihan-pelatihan untuk mengembangkan potensi dan keahlian mereka. Pemberian pinjaman modal usaha bagi masyarakat

desa yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha mereka disesuaikan dengan jumlah kelompok masyarakat dan jumlah anggota dari setiap kelompok yang ikut dalam kelompok simpan pinjam ini.

Jumlah dari besaran kegiatan yang akan dilakukan akan memudahkan koordinator program kegiatan dalam mengusulkan biaya yang akan di peroleh dari dana PNPM Mandiri Pedesaan. Karena dana yang diperoleh untuk menunjang rencana kegiatan ini disesuaikan dengan jumlah rencana kegiatan yang diusulkan kemudian ditentukan jumlah besarnya dan akan ditentukan perkiraan biaya yang akan dihabiskan dalam proses pelaksanaan program kegiatan tersebut. Perkiraan rincian biaya tersebut digunakan untuk mengajukan seluruh biaya dalam kegiatan yang akan dilakukan agar memudahkan dalam pencairan dana PNPM Mandiri Pedesaan. Jumlah dana dari setiap kegiatan yang diajukan oleh masyarakat tersebut sumber dananya diperoleh dari dana APBN yang khusus untuk biaya kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dan dana APBD, selain itu juga mendapat tambahan dana dari dana swadaya.

Dalam proses perencanaan yang ada di Desa Ngadirengga ini aspek-aspek yang masuk dalam pendekatan menurut Rahardjo, 2013 adalah pendekatan berbasis sumber daya alam. Pada Desa Ngadirengga proses rencana kegiatan dalam bidang sosial pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh masyarakat seperti pelatihan sayur mayur, pelatihan pakan ternak dan pelatihan pupuk kompos, dimana semua pelatihan tersebut menggunakan sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang tersedia dapat dijadikan sebagai pengembangan potensi masyarakat dalam melatih keahlian mereka dalam melakukan sesuatu.

Untuk selanjutnya adalah pendekatan yang dapat membantu mempercepat perbaikan dalam hal ekonomi. Dalam proses rencana kegiatan bidang ekonomi, melalui dana PNPM koordinator program kegiatan PNPM memeberikan bantuan dana atau modal usaha bagi masyarakat untuk membantu peningkatan perokonomian mereka, dana untuk modal usaha dari PNPM tersebut dapat digunakan untuk membuka usaha baru bagi masyarakat yang ingin membuka lapangan pekerjaan sendiri namun memiliki kendala dalam hal biaya/modal. Karena dengan adanya peminjaman dalam modal usaha ini juga akan membantu peningkatan taraf hidup masyarakat desa dan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Desa Ngadirengga.

Pendekatan yang terakhir ini adalah pendekatan pasrtisipatif dimana dalam hal ini partisipasi masyarakat lebih diutamakan dan terbentuknya sarana parasarana merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara masyarakat dan seluruh koordinator program. Di Desa Ngadirengga partisipasi masyarakat memiliki tingkat yang tinggi namun ada beberapa masyarakat yang berada di wilayah perekebunan yang sulit untuk bekerja sama karena anggapan mereka bahwa tunjangan atau hasil dari perkebunan tersebut lebih menjanjikan untuk perbaikan sarana prasarana daripada dana yang diberikan oleh program PNPM. Masalah waktu juga menjadi kendala karena para karyawan perkebunan bekerja hampir setengah hari dan untuk mengurus rencana kegiatan dari program PNPM ini mereka tidak memiliki waktu yang cukup.

b. Pencapaian Dan Ketepatan Kegiatan Program PNPM Mandiri Perdesaan

Pembangunan desa, bukan yang hal baru lagi di Indonesia ini, yang bertujuan untuk menentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan masyarakat, dalam penelitian ini konsep pembangunan dari PNPM Mandiri Perdesaan dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Hasil dari pembangunan desa yang berupa pembangunan fisik yang telah dilakukan dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang merasakan hasil dari proyek tersebut. (Sumiyati, 2013 : 29)

Efektivitas merupakan suatu pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Sehingga jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif (Yulianti, 2012:14). Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Dalam ketepatan pencapaian kegiatan program PNPM ini dari beberapa usulan kegiatan masyarakat yang telah berhasil direalisasikan melalui dana PNPM

ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan atau peningkatan dalam beberapa tahun. Dengan adanya bantuan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan dan kegiatan untuk menunjang program PNPM ini beberapa kegiatan yang sudah berjalan mengalami peningkatan menjadidi lebih baik, berkurangnya jumlah masyarakat yang menerima bantuan juga menjadi salah satu bukti bahwa terjadinya peningkatan dalam keberhasilan kegiatan yang telah diusulkan oleh masyarakat.

Bagi Masyarakat yang menerima bantuan dari dana PNPM melalui program kegiatan PNPM mengalami kemajuan dalam beberapa program kegiatan. Pada kegiatan bidang lingkungan dari beberapa tahun sebelumnya dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang masih tinggi saat ini semakin berkurang karena semakin banyak kebutuhan masyarakat yang terpenuhi dengan berjalannya program PNPM melalui kegiatan di bidang lingkungan. Apabila dilihat dari setiap usulan kegiatan yang diberikan oleh masyarakat desa dan dimasukkan ke dalam rencana kegiatan dalam kegiatan bidang lingkungan kegiatan yang terealisasi semakin memenuhi kebutuhan masyarakat desa seperti terealisasinya makadam jalan bagi lingkungan masyarakat sepanjang 1200m, terciptanya pembangunan aspal jalan sepanjang 2500m, terwujudnya pembangunan parit sepanjang 1000m, terwujudnya pembangunan rabat jalan sepanjang 1200m, untuk terealisasinya plengsengan sepanjang 60m dan pembenahan rehab rumah sebanyak 30 unit rumah warga yang kurang layak huni.

Untuk bidang sosial minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan soaial seperti pelatihan untuk potensi masyarakat dan les gratis untuk anak-anak yang

kurang mampu semakin menurun. Hal ini diakibatkan kurangnya minat masyarakat dalam menjalani proses kegiatan ini, bagi masyarakat yang mendapat pelatihan untuk pengembangan potensi dalam beberapa tahun berikutnya mengalami penurunan. Sarana les gratis untuk anak-anak yang kurang mampu memiliki peminat yang cukup banyak namun keterbatasan dana bagi gaji guru les gratis mengakibatkan rencana kegiatan ini sudah tidak dapat berjalan. Sebelum adanya kendala dari masyarakat mengenai rencana kegiatan telah terealisasikan rencana kegiatan sesuai dengan usulan kegiatan masyarakat desa. Terealisasinya pemberian asupan gizi bagi balita dan ibu hamil sebanyak 20 orang, pemberian bantuan produktif kambing begulir bagi peternak kambing kepada 30 orang, bantuan sarana prasarana TK dan PAUD untuk 90 anak, pelatihan bagi masyarakat desa sebanyak 95 orang dan sarana les gratis untuk anak-anak keluarga miskin sebanyak 70 anak.

Kegiatan yang mendapat respon paling banyak dari masyarakat adalah pinjaman bantuan modal usaha. Namun kendala pada program kegiatan ekonomi ini adalah apabila masyarakat yang masuk pada kelompok simpan pinjam pada pengembalian modal keseluruhan kurang dari 90% dana yang akan diberikan untuk program kegiatan ini pada tahun berikutnya tidak dapat diberikan dan akan dihibahkan pada program kegiatan lingkungan. Namun minat masyarakat desa dalam rencana kegiatan ini memiliki tingkat yang tinggi karena dengan adanya program ini telah teresalisasikan pinjaman bergulir bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha sebanyak 150 KSM.

Pada setiap kegiatan yang diajukan membutuhkan rencana biaya yang berbeda. Sebelum dana PNPM yang bersumber dari dana APBN dan dana APBD tersebut cair dan untuk menunjang kegiatan program PNPM rincian biaya tersebut diusulkan terlebih dahulu sesuai dengan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat setelah itu dana untuk kegiatan program PNPM dapat digunakan untuk menunjang kegiatan. Dengan rencana perkiraan biaya untuk kegiatan program PNPM selain karena mengikuti prosedur yang ada akan lebih memudahkan para koordinator program PNPM untuk memperkirakan semua usulan program beserta biaya yang akan dihabiskan untuk kegiatan tersebut.

Total biaya untuk rencana kegiatan yang telah diusulkan ini, pada program kegiatan bidang lingkungan terdapat selisih biaya dalam pengadaan biaya untuk melaksanakan program. Sesuai rencana kegiatan usulan masyarakat yang sudah ditetapkan biaya untuk bidang lingkungan mencapai Rp. 1.536.400.000 dalam jangka waktu 3 tahun periode sedangkan untuk biaya total yang dibutuhkan mencapai Rp. 2.043.000.000 dalam jangka waktu 3 tahun periode. Ini disebabkan karena adanya perbaikan tak terduga untuk sarana prasana akses transportasi masyarakat sehingga dana yang dibutuhkan keluar dari perkiraan usulan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun dengan adanya kekurangan dana yang dialami dalam program ini koordinator PNPM Mandiri Pedesaan lebih mementingkan dana untuk program kegiatan yang sudah direncanakan dan untuk semua kekurangan perbaikan sarana prasarana yang belum dapat diatasi akan kembali diusulkan pada rencana kegiatan pada

tahun periode berikutnya yang menggunakan dana untuk program PNPM Mandiri Pedesaan yang baru.

Kegiatan masyarakat dalam bidang sosial terdapat selisih dana yang diperoleh untuk melaksanakan kegiatan program PNPM Mandiri Pedesaan. Pada rencana kegiatan yang telah ditentukan oleh koordinator program dana yang diperkirakan untuk program bidang sosial ini seluruhnya adalah sebanyak Rp. 108.500.000 sedangkan pada seluruh total kebutuhan dana yang dibutuhkan sebanyak Rp. 230.000.000. Hal ini dikarenakan dalam pelatihan untuk mengembangkan potensi warga masyarakat yang tidak memiliki peluang kerja terdapat beberapa pelatihan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan ini disebabkan karena minat dari masyarakat yang kurang untuk beberapa pelatihan pengembangan potensi. Sehingga untuk meminimalisir pengeluaran dana dalam pelatihan ini hanya diambil beberapa pelatihan untuk masyarakat yang memiliki tingkat partisipasi dari masyarakat yang tinggi. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam program kegiatan pelatihan ini dengan melihat minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan ini. Namun jika pelatihan yang diusulkan pada periode ini mengalami penurunan pada minat masyarakat yang mengikuti maka program kegiatan ini tidak akan diusulkan kembali pada periode berikutnya dan akan diganti dengan pelatihan baru yang juga dapat membantu pengembangan potensi masyarakat desa untuk membuka kesempatan kerja mereka sendiri.

Rencana program kegiatan dalam bidang ekonomi ini memiliki selisih yang lebih sedikit dari pada program kegiatan bidang yang lainnya. Dalam bidang

ekonomi desa Ngadirengga hanya memiliki satu program untuk membantu perekonomian masyarakat desa yaitu dengan memberikan pinjaman bergulir kepada masyarakat desa untuk modal usaha. saat ini terbagi menjadi beberapa kelompok masyarakat untuk memudahkan pinjaman modal usaha ini karena dalam program ini memiliki kesepakatan dalam peminjaman apabila dalam pengembalian kurang dari 90% dari beberapa kelompok masyarakat tersebut maka dana untuk mebiaya program kegiatan peminjaman modal usaha ini akan dihibahkan pada program kegiatan bidang lingkungan. Dalam ketepatan kegiatan program ini dengan rencana biaya yang diperoleh menagalami selisih yang tidak begitu besar. Di dalam rencana kegiatan dana yang diperkirakan untuk melaksanakan proses kegiatan sebesar Rp. 189.000.000 sedangkan setelah proses pelaksanaan jumlah biaya yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan sebesar Rp. 190.000.000. Hal ini disebabkan oleh kelompok masyarakat yang terdaftar dalam kelompok simpan pinjam ini bertambah karena setiap bulan anggota kelompok tersebut tetap dan mengembalikan anggaran pinjamannya dengan tepat waktu, juga disesuaikan dengan kondisi anggaran periode saat itu.

Dengan adanya hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Ngadirengga belum berjalan secara efektif. Dilihat pada proses perencanaan program kegiatan belum sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan, masih banyak terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaannya baik dalam hal pendanaan program kegiatan sampai pada program yang dilakukan oleh masyarakat, juga ada masyarakat yang ikut serta dalam program kegiatan PNPM

belum memiliki partisipasi yang tinggi sehingga program ini belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dana yang diperkirakan juga belum tepat pada sasaran sehingga masih banyak rencana kegiatan yang belum dapat terealisasi dengan baik karena masih memprioritaskan rencana kegiatan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dan untuk rencana kegiatan yang belum dapat untuk terealisasi akan menunggu rencana kegiatan pada periode selanjutnya yang membutuhkan banyak waktu dan dana.

c. Keterlibatan Para Aktor Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip untuk membantu mengidentifikasi keseluruhan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM mandiri Pedesaan ini. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial diantaranya adalah a) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif karenanya pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai patner. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu memberikan sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan dan g) Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. (Fuadika, 2011:61).

Program PNPM Mandiri Pedesaan ini mengikutsertakan beberapa golongan masyarakat sebagai pelaksana program dan perangkat desa serta koordinator program PNPM lainnya sebagai pendamping atau pengarah program

PNPM Mandiri Pedesaan. Kepala desa adalah sebagai perangkat yang juga ikut serta dalam program ini yang memiliki peran penting sedangkan lembaga pemerintahan desa seperti BKM atau penggerak dari program PNPM ini. Masyarakat yang menjadi sasaran utama adalah warga yang bertempat tinggal disekitar desa Ngadierengga dan pendamping dari kecamatan yang biasa disebut sebagai fasilitator dari kecamatan yang bertugas untuk mendampingi kegiatan PNPM.

Masyarakat merupakan subjek atau yang menjadi sasaran utama dalam program kegiatan PNPM ini. Tingkat keberhasilan pelaksanaa program kegiatan PNPM dilihat dari peningkatan perekonomian masyarakat desa, menurunnya angka kemiskinan pada masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus berpartisipasi dan menumbuhkan kesadarannya sendiri dalam pemberdayaan mereka sendiri agar semua rencana kegiatan yang telah diajukan dapat dilaksanakan. Selain masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan ini juga dibantu oleh para koordinator program kegiatan PNPM. Adanya kerjasama yang baik antara pelaku program kegiatan PNPM dengan penggerak program kegiatan PNPM ini akan mewujudkan hasil yang baik pula. Para penggerak kegiatan PNPM ini hanya membantu dan bertanggung jawab dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Partisipasi dari masyarakat yang aktif maupun dari perangkat desa selaku koordinator dari program PNPM Mandiri Pedesaan dapat membantu berjalannya proses perencanaan program kegiatan sampai pada proses pelaksanaan program PNPM ini. Karena Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta

dalam pelaksanaan semua kegiatan yang telah direncanakan sangat dibutuhkan. Kesejahteraan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan mendapat kehidupan yang layak menjadi salah satu tujuan untuk diluncurkannya kebijakan ini.

d. Sosialisai terhadap sasaran program PNPM mandiri Pedesaan

Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PNPM Mandiri Pedesaan memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PNPM Mandiri Pedesaan. (Fitriana, 2013 : 436)

Untuk menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rencana kegiatan Program PNPM Mandiri Pedesaan ini dibutuhkan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat dari setiap dusun untuk membahas kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk membahas proyek yang akan diusulkan pada rencana kegiatan tahunan masyarakat dikumpulkan pada setiap dusun masing-masing, perangkat desa dan koordinator yang bertugas mendatangi dusun-dusun untuk melakukan sosialisasi dan melihat keadaan wilayah dusun. Pada tahap sosialisasi ini masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan masih memiliki tingkat partisipasi yang sangat kurang karena jaminan dari pihak perkebunan lebih menjanjikan dari pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program PNPM Mandiri Pedesaan. Dengan adanya

sosialisasi program PNPM Mandiri Pedesaan dapat membantu perangkat desa dan koordinator PNPM untuk mengetahui permasalahan dan keadaan wilayah sebenarnya di setiap dusun.

e. Pemantauan Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan

Pemantauan ini dilakukan untuk membantu pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan PNPM. Dengan adanya pemantauan ini dapat membantu para koordinator program kegiatan PNPM untuk mengawasi seluruh proses kegiatan dalam pelaksanaan program. Tim pemantau ini menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. Keanggotannya berasal dari dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa . jumlah anggota tim pemantau ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah. Hasil pemantauan kegiatan disampaikan pada saat musyawarah desa. (Depdagri, 2007 :11)

Namun di Desa Ngadirengga anggota pemantauan atau monitoring yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan program kegiatan PNPM ini dipilih langsung oleh kecamatan untuk memantau kegiatan PNPM yang ada di desa. Setiap pemantau memiliki tanggung jawab pada desa yang berbeda sesuai dengan amanat dari pihak kecamatan yang memberikan tugas untuk bertanggung jawab atas desa tertentu. Dari hasil pemantauan tersebut diberikan kepada pihak kecamatan untuk mengetahui seluruh proses kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan program kegiatan PNPM.

Setelah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat desa mengenai adanya kebijakan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini di

dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM yang dibantu oleh perangkat desa, koordinator program PNPM dan partisipasi masyarakat juga didukung oleh pemantauan atau monitoring selama kegiatan program PNPM tersebut berlangsung. Pihak monitoring dalam pelaksanaan kegiatan program PNPM dilakukan oleh fasilitator dari kecamatan yang bertugas untuk mendampingi selama kegiatan berlangsung pada seluruh desa yang dibawahinya. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui proses dari kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dan tingkat keberhasilan dari kegiatan yang sudah dilakukan. Hasil dari usulan kegiatan tersebut adalah adanya sarana prasarana yang memadai sampai pada pengembangan potensi dari masyarakat untuk taraf hidup yang lebih baik. Apabila semua sasaran kegiatan program PNPM tersebut tidak berjalan sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan maka pihak fasilitator memberikan laporan kepada kecamatan dan dana untuk program PNPM yang tidak memenuhi dan trealisasikan sesuai usulan kegiatan dapat ditunda untuk pencairan dananya

f. Penerimaan Masyarakat Dalam PNPM Mandiri Pedesaan

Pemberdayaan memiliki beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Pemberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dalam rangka pemikiran. Oleh karena itu dengan adanya pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat desa tidak lagi tergantung pada orang lain, mereka mampu

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mampu meningkatkan perekonomian mereka dalam kehidupan. (Kartasmita, 1995 : 17) dalam (fuadika, 2011 : 50)

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan yang positif bagi kehidupan masyarakat desa. Dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengikuti keseluruhan program kegiatan PNPM ini dapat dikatakan bahwa respon masyarakat desa dengan adanya kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan ini sangat baik. Semua program kegiatan yang telah direncanakan diusulkan oleh masyarakat desa sendiri dan hasilnya untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Dengan adanya program kegiatan PNPM ini sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat baik dalam akses sarana prasarana sampai pemberian pinjaman modal kepada masyarakat untuk modal usaha.

Di Desa Ngadirengga respon masyarakat terhadap adanya kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan yang membantu kesejahteraan masyarakat ini tidak semua masyarakat mampu menerima dengan baik program PNPM ini. Masyarakat Desa Ngadirengga memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda sebagian dari jumlah masyarakat bekerja sebagai buruh perkebunan. Mayoritas masyarakat Desa setuju dan menerima dengan baik adanya kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan namun warga masyarakat yang bekerja di daerah perkebunan kurang memiliki partisipasi yang baik terhadap program PNPM ini. Para karyawan yang bekerja di perkebunan tersebut merasa bahwa segala sarana prasarana dan jaminan perekonomian sudah menjadi tanggungjawab pihak perkebunan sehingga apabila koordinator membutuhkan wakil untuk

mengusulkan kegiatan yang akan direncanakan kurang mendapat respon yang baik dari warga yang bekerja sebagai karyawan perkebunan.

Dengan adanya hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Ngadirengga belum berjalan secara efektif. Dilihat pada proses perencanaan program kegiatan belum sesuai dengan proses pelaksanaan kegiatan, masih banyak terdapat kekurangan dalam proses pelaksanaannya baik dalam hal pendanaan program kegiatan sampai pada program yang dilakukan oleh masyarakat, juga ada masyarakat yang ikut serta dalam program kegiatan PNPM belum memiliki partisipasi yang tinggi sehingga program ini belum dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dana yang diperkirakan juga belum tepat pada sasaran sehingga masih banyak rencana kegiatan yang belum dapat terealisasi dengan baik karena masih memprioritaskan rencana kegiatan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dan untuk rencana kegiatan yang belum dapat untuk terealisasi akan menunggu rencana kegiatan pada periode selanjutnya yang membutuhkan banyak waktu dan dana.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Ngadirengga

Faktor-faktor yang menjadikan dukungan maupun faktor-faktor yang menjadikan hambatan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan ini merupakan motivasi bagi para koordinator Program kegiatan PNPM dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga program ini dapat berjalan sesuai

dengan harapan. Terpenuhinya semua kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat adalah salah satu tujuan dari adanya kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan karena kesejahteraan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian mereka sangat penting untuk dilakukan.

Untuk menjalankan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan tidak luput dari hal-hal yang mendukung adanya program PNPM Mandiri Pedesaan ini sampai dikatakan berhasil mengatasi kemiskinan di Indonesia. Namun bukan hanya hal-hal yang mendukung program ini namun kendala yang ada di dalamnya sehingga dapat menjadikan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini berubah menjadi lebih baik dengan mengetahui semua kendala yang ada dan menyiapkan solusi yang tepat agar kendala yang muncul dapat teratasi dan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat berhasil sesuai harapan semua kalangan masyarakat.

Pada faktor-faktor pendukung terdapat beberapa hal yang mendukung program kegiatan PNPM yang melalui dukungan dari dalam program ini sendiri seperti petunjuk teknis sedangkan untuk dukungan yang dapat dihasilkan dari luar program ini adalah output dari kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini seperti sarana prasarana yang telah dilakukan oleh masyarakat dan dibantu oleh penanggung jawab program kegiatan PNPM ini. Dengan adanya sarana prasarana ini dapat dijadikan sebagai tolok ukur dari keberhasilan kebijakan program kegiatan ini karena adanya sarana prasarana ini merupakan bukti nyata bahwa program PNPM Mandiri Pedesaan ini telah melalui proses yang sedang berjalan.

Selain adanya faktor pendukung baik dari dalam maupun dari luar program ini juga terdapat faktor penghambat dalam kebijakan program kegiatan PNPM. Hambatan yang ada dalam kebijakan program kegiatan ini dapat menjadikan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini berubah menjadi lebih baik dengan mengetahui semua kendala yang ada dan menyiapkan solusi yang tepat agar kendala yang muncul dapat teratasi dan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat berhasil sesuai harapan semua kalangan masyarakat. Karena suatu keberhasilan sebuah program adalah dapat menyelesaikan segala permasalahan yang muncul, dapat menemukan solusi yang tepat pada semua kendala yang ada. Sama seperti faktor pendukung bahwa faktor penghambat ini juga terdapat beberapa hal yang dapat menghambat rencana kegiatan yang dilakukan, faktor penghambat dibedakan juga dengan faktor penghambat yang berasal dari dalam program ini seperti keterlibatan para aktor, keikutsertaan para aktor dalam program ini dan faktor penghambat yang berasal dari luar program kegiatan ini adalah keterbatasan dalam penyaluran dana kepada masyarakat desa melalui kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan.

a. Faktor Pendukung

1. Petunjuk Teknis

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang mendorong keberhasilan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki taraf hidup masyarakat desa agar lebih sejahtera. Untuk faktor pendukung program PNPM ini adalah petunjuk teknis dari pusat mengenai keseluruhan yang berhubungan dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri

Pedesaan. Petunjuk teknis dari pusat tersebut mulai dari tujuan diadakannya program PNPM Mandiri Pedesaan, visi misi dalam pelaksanaannya, peran pelaku yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan seperti koordinator program sampai peran kepala desa dan seluruh perangkat untuk membantu program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini. Tidak hanya pelaku yang ada di pedesaan yang dapat mengkoordinir kegiatan program PNPM ini namun juga pelaku dari kecamatan yang berwenang atau bertanggung jawab dalam kegiatan ini.

Apabila melihat ukuran efektivitas dalam melaksanakan suatu program agar program tersebut dapat dicapai sesuai dengan harapan Yulianti (2012 : 16) bahwa kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya suatu program adalah melihat proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan yang artinya kebijakan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. (Yulianti, 2012 :16)

Dalam program kegiatan PNPM ini semua perumusan kebijakan program kegiatan PNPM yang dimulai dari tujuan adanya kebijakan ini, pelaku koordinator program, proses perencanaan kegiatan sampai pada evaluasi pelaksanaan program dicantumkan dalam petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Pedesaan. Dengan adanya petunjuk teknis ini akan membantu memudahkan para koordinator program kegiatan PNPM dan masyarakat desa dalam memahami semua tujuan diadakannya kebijakan ini, semua yang berhubungan dengan penetapan program kegiatan bagi masyarakat desa dalam melaksanakan pemberdayaan. Petunjuk teknis ini digunakan untuk mengatur

seluruh proses kegiatan dan alur kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dalam menjalankan program kegiatan PNPM.

Alur kegiatan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat desa juga terdapat dalam petunjuk teknis agar masyarakat mampu dan mudah untuk mempelajari mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai pada pelestarian kegiatan agar kegiatan yang sudah dapat direalisasikan dapat dijaga atau bahkan dapat dikembangkan oleh masyarakat desa. Dan yang terakhir mengenai pengendalian program seperti pemantauan atau pengawasan dalam jalannya kegiatan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini. Evaluasi kerja setelah selesai kegiatan dan kemudian pelaporan dari koordinator desa kepada fasilitator yang di tunjuk langsung oleh kecamatan untuk memberikan tanggung jawab kepada fasilitator memberikan pengawasan pada desa yang bersangkutan.

Petunjuk teknis membantu untuk memudahkan para pelaku kebijakan program PNPM untuk dapat menjalankan kegiatan karena keberhasilan program ini adalah minimalnya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan ini. Wujud nyata keberhasilan kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini dilihat dari usulan rencana kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat desa kemudian dapat direalisasikan dan hasil dari kegiatan tersebut adalah perbaikan sarana prasarana, dibentuknya sarana prasana baru untuk memudahkan masyarakat desa dalam akses mereka melakukan pekerjaan mereka. Karena sarana prasarana yang rusak akan menghambat masyarakat desa untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari.

2. Sarana Prasarana

Faktor pendukung lainnya yang menjadi kunci kesuksesan program kegiatan PNPM ini adalah terpenuhinya segala sarana prasarana bagi masyarakat desa. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendukung bagi kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan ini karena adanya sarana prasarana ini dapat membantu masyarakat desa untuk akses transportasi kehidupan sehari-hari mereka seperti pembangunan aspal jalan, pembangunan makadam jalan di lingkungan masyarakat. Dan untuk sarana prasarana yang lainnya yang dapat membantu masyarakat desa adalah pembangunan parit untuk aliran air hujan karena keluhan masyarakat saat ini adalah masih sering terjadinya banjir pada saat musim hujan. Pembembenahan lingkungan untuk perbaikan rumah masyarakat desa yang tidak layak huni juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat karena tempat tinggal yang layak juga merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa.

Melihat ukuran efektivitas dalam melaksanakan suatu program agar program tersebut dapat dicapai sesuai dengan harapan bahwa kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidaknya suatu program adalah tersedianya sarana prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan adanya sarana prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu program. (Yulianti, 2012 : 16)

Dalam program PNPM Mandiri Pedesaan ini semua kebutuhan masyarakat dalam hal sarana prasarana sudah mendapat peningkatan dalam realisasinya. Kebutuhan masyarakat desa yang lebih mendesak atau lebih

dibutuhkan menjadi rencana kegiatan yang utama seperti pembangunan makadam jalan, aspal jalan, parit untuk mengaliri air hujan dan sampai pada pembangunan atau rehab bagi rumah-rumah warga yang tidak lagi layak untuk dihuni. Dengan adanya sarana prasarana yang telah diciptakan dalam program kegiatan PNPM ini merupakan buktinya nyata untuk keberhasilan program PNPM ini karena buktinya nyata bahwa program kegiatan PNPM ini telah berjalan adalah dengan adanya sarana prasarana yang telah disediakan.

Terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat dari perbaikan sarana prasarana sampai pada peningkatan perekonomian masyarakat desa merupakan hal yang paling mendukung dalam kebijakan program PNPM. Seperti yang dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat desa adalah tujuan utama diluncurkannya kebijakan program PNPM mandiri Pedesaan ini sehingga segala sesuatu yang terkait dengan terpenuhinya segala kebutuhan bagi masyarakat desa akan menjadi prioritas utama bagi koordinator kebijakan program kegiatan PNPM.

b. Faktor Penghambat

1. Keterlibatan Para Aktor

Faktor penghambat merupakan wujud dari beberapa permasalahan muncul, permasalahan mengenai kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan. Kebijakan program yang dibuat oleh pemerintah memang tidak selalu mendapat dukungan atau respon yang baik dari masyarakat baik dalam program PNPM yang dicanangkan pada tahun 2006 ini. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan program PNPM ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk dapat menjadikan program PNPM ini lebih baik. Beberapa kendala datang dari dalam

program PNPM ini mulai dari para aktor yang mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan program PNPM sampai pada dana yang diperoleh untuk mendukung program kegiatan PNPM.

Dalam prinsip pemberdayaan masyarakat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berpijak pada pedoman atau prinsip pekerjaan sosial. Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu memberikan sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. (Fuadika, 2011 : 61)

Di Desa Ngadirengga Para pelaku program kegiatan yang terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam program kegiatan ini adalah kepala desa beserta perangkat desa yang lainnya, fasilitator dari kecamatan dan yang paling penting adalah adanya masyarakat yang bersedia untuk diberdayakan dalam melaksanakan program kegiatan PNPM. Masyarakat menjadi subyek utama dalam pelaksanaan program ini karena sasaran utama dari kebijakan program ini adalah masyarakat yang tergolong miskin yang bersedia untuk diberdayakan melalui program ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan penting.

Hambatan yang muncul di Desa Ngadirengga dalam pelaksanaan rencana kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kurangnya respon yang baik dari sebagian masyarakat desa. Di desa Ngadirengga terdapat 3 perkebunan yang

sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai karyawan perkebunan. Dalam setiap rencana kegiatan masyarakat setiap dusun memiliki hak untuk memberikan usulan mereka dalam rencana kegiatan untuk satu periode namun di 3 perkebunan tersebut tidak mengirimkan wakilnya atau yang yang mewakili daerah mereka untuk memberikan usulan rencana kegiatan. Pihak koordinator kebijakan program PNPM Mandiri Pedesaan tetap memberikan proyek atau rencana kegiatan dengan dana yang diberikan namun proyek yang diberikan tersebut belum juga diselesaikan dan seharusnya SPJ kegiatan sudah harus selesai sebelum rencana kegiatan berikutnya. Hal ini mengakibatkan tertundanya rencana kegiatan yang akan diusulkan oleh masyarakat desa untuk periode berikutnya.

2. Keterbatasan Penyaluran Dana

Beberapa kendala lainnya muncul dari lepasnya tanggung jawab KSM dalam pelaksanaan rencana kegiatan PNPM. KSM merupakan kumpulan masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam suatu kelompok karena adanya suatu ikatan yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama untuk membantu keberhasilan program PNPM Mandiri Pedesaan. Kendala dalam KSM ini adalah proyek yang akan dijalankan oleh masyarakat, untuk melakukan rencana kegiatan yang baru KSM tahap pertama harus terlebih dahulu selesai dilakukan namun KSM tidak peduli akan hal pengusulan rencana proyek yang baru sehingga untuk menentukan proyek kedua sulit untuk dilakukan. Selama ini KSM tidak peduli dengan proyek yang masuk dalam rencana kegiatan masyarakat dan untuk sementara yang menyelesaikan proyek tersebut agar dapat menentukan proyek yang kedua adalah BKM, sedangkan dalam menyelesaikan proyek ini

pihak BKM sendiri tidak mendapat anggaran dana untuk gaji mereka karena secara sukarela pihak BKM ini membantu pelaksanaan proyek ini.

Kendala yang muncul selanjutnya dalam penyaluran dana ini adalah kurangnya dana yang diberikan untuk membantu masyarakat desa sehingga dana yang akan digunakan untuk program rencana kegiatan yang lain harus digunakan untuk rencana kegiatan yang lebih mendesak terlebih dahulu. Walaupun dibutuhkan perkiraan biaya terlebih dahulu dalam perencanaan kegiatan untuk proyek masyarakat agar dapat mengetahui jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk proses pelaksanaan program kegiatan. Namun semua perkiraan biaya yang dilakukan dan diajukan untuk mecairkan dana tidak sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. Biaya yang diperlukan lebih banyak daripada perkiraan biaya yang telah diajukan karena terdapat kebutuhan masyarakat desa yang belum dapat terealisasi pada periode saat ini sehingga dengan keterbatasan dana yang diperoleh dari pencairan dana tersebut kebutuhan masyarakat desa yang paling mendesak yang akan direalisasikan terlebih dahulu.

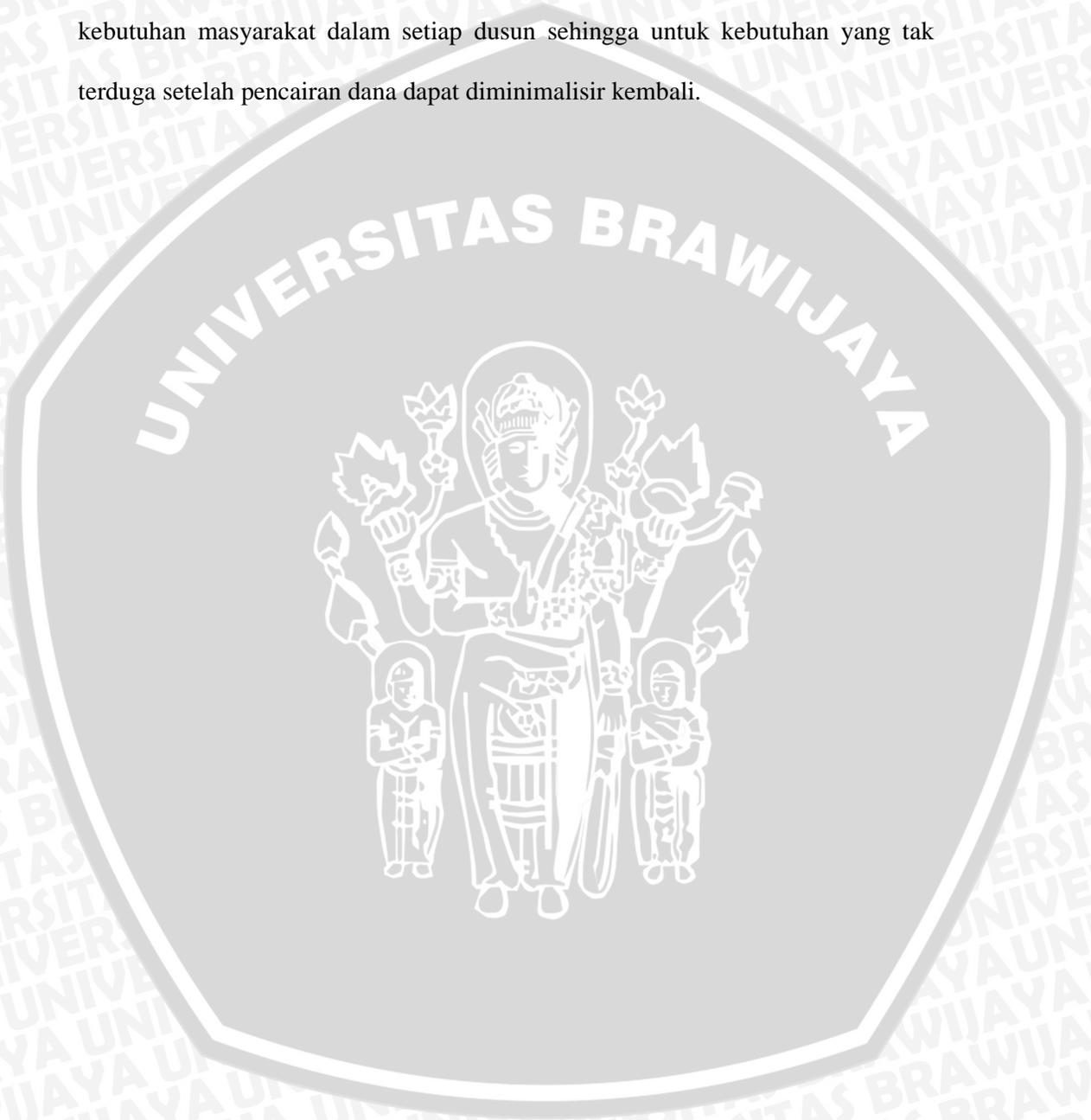
Pada jenis bantuan di tingkat masyarakat, bantuan untuk masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan diwujudkan dalam bentuk bantuan salah satunya adalah bantuan pendanaan. Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana bantuan langsung masyarakat (BLM) yang bersifat stimulan atau sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dana bantuan langsung masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan

yang termasuk dalam komponen-komponen kegiatan lingkungan, kegiatan sosial, dan komponen-komponen kegiatan keuangan atau ekonomi. (Sumiyati, 2013)

Di Desa Ngadirengga semua bantuan dana dari BLM untuk menunjang program kegiatan PNPM ini kurang mendapat perhatian. Melihat keadaan yang ada di proses perencanaan kegiatan yang telah diajukan oleh masyarakat desa kemudian dimasukkan dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian perkiraan biaya yang telah dilampirkan. Semua rencana kegiatan yang telah diajukan tersebut digunakan untuk mencairkan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan program kegiatan namun dengan adanya tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi sehingga banyak kebutuhan tak terduga dari masyarakat mengenai rencana kegiatan dan kebutuhan masyarakat desa yang paling mendesak yang mendapat penanganan terlebih dahulu. Dengan adanya hal ini dana yang telah dicairkan untuk proses pelaksanaan kegiatan masyarakat menjadi terbatas karena koordinator program kegiatan PNPM lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.

Dalam hambatan yang ada di dalam penyusunan rencana kegiatan masyarakat maupun dalam proses pelaksanaan program kegiatan diharapkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh aktor yang terkait dalam proyek yang telah direncanakan. Tanggung jawab yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik karena program kegiatan PNPM ini menjadi hak bagi masyarakat desa yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan hidup mereka. Sehingga kerjasama antara para koordinator penanggung jawab program rencana kegiatan PNPM ini dengan masyarakat yang mendapat pelayanan dari pemerintah pusat

dapat terus terjalin. Dan untuk keterbatasan pendanaan bagi program kegiatan masyarakat seharusnya dapat diperhatikan kembali benar-benar melihat kondisi kebutuhan masyarakat dalam setiap dusun sehingga untuk kebutuhan yang tak terduga setelah pencairan dana dapat diminimalisir kembali.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program pemerintah yang ditetapkan mulai dari tahun 2007. Kebijakan program PNPM Mandiri Perdesaan adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam keberhasilan pencapaian program ini masyarakat yang tergolong miskin menjadi sasaran utama. Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini diharapkan bantuan dana dari pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ini dapat berhasil, mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di pedesaan.

Dari hasil pembahasan yang telah dibuat dan disesuaikan dengan keadaan yang ada dilapangan dapat disimpulkan :

1. Belum dapat dikatakan efektif dalam penerapan PNPM Mandiri Perdesaan dalam Pembangunan Desa untuk Pengentasan Kemiskinan Di Desa Ngadirengga karena disebabkan oleh :
 - a. Proses perencanaan yang dibuat belum mencakup dari semua warga masyarakat di Desa Ngadirengga sedangkan menurut ukuran atau kriteria program dapat dikatakan efektif adalah dengan Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan

operasional. Namun dalam pelaksanaan proses perencanaan tersebut masih belum mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan karena masih banyak wilayah masyarakat yang tidak masuk rencana kegiatan.

- b. Pencapaian dan ketepatan Kegiatan belum sesuai karena kegiatan yang tidak masuk rencana masih tetap masuk dalam pelaksanaan sedangkan menurut ukuran kriteria kegiatan tersebut adalah Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pencapaiannya masih belum sesuai dengan sasaran atau rencana yang telah ditentukan
- c. Kurangnya tanggung jawab dan keterlibatan aktor dalam perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan sedangkan menurut ukuran dan kriterianya adalah dengan Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. Namun pada kenyataannya dilapangan masih ada beberapa beberapa penanggungjawab yang lepas tanggungjawab terhadap pekerjaannya.
- d. Kurangnya sosialisasi pada warga masyarakat karena adanya dusun yang tidak mengirimkan wakilnya dalam perencanaan kegiatan sehingga pihak koordinator PNPM tidak dapat melihat kondisi wilayah dan tidak dapat memasukkan dalam rencana kegiatan program PNPM

- e. Pemantauan dilakukan langsung oleh penanggung jawab kegiatan dari Kecamatan telah sesuai menurut kriteria dan ukuran efektif tidaknya program dapat dilihat dengan Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
 - f. Kurangnya respon yang baik dari masyarakat Desa Ngadirengga yang beranggapan bahwa jaminan dari tempat bekerja mereka lebih menjamin daripada dana dari PNPM Mandiri Pedesaan sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka dibanding dengan mengikuti program-program kegiatan dari kegiatan PNPM
2. Dalam keberhasilan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat untuk tercapainya seluruh tujuan PNPM yaitu :
 - a. Faktor pendukung

Faktor pendukung ini membantu tercapainya seluruh tujuan dalam mrnjalankan program PNPM Mandiri Pedesaan yaitu dengan petunjuk teknis yang meruapkan panduan dalam menjalankan tujuan PNPM dan sarana prasarana yang merupakan bukti nyata dari pelaksanaan kegiatan PNPM.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat ini membantu dalam pemberian solusi yang tepat untuk seluruh kendala yang muncul dalam menjalankan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan yaitu dengan adanya kendala dalam kurangnya keterlibatan para aktor dalam program kegiatan PNPM dan keterbatasan penyaluran dana untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan PNPM.

B. Saran

Melihat permasalahan yang muncul dalam rencana kegiatan pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan, hambatan yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan dan kurangnya ketepatan dalam melakukan realisasi kegiatan yang kurang sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan, maka dapat diberikan beberapa saran agar keberhasilan program kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini lebih diperhatikan lagi, sebagai berikut :

1. Dalam proses perencanaan kegiatan yang belum mencakup dari semua warga masyarakat Ngadirengga diharapkan pihak koordinator tetap memasukkan daerah dusun yang tidak mengirimkan wakilnya pada saat sosialisasi program kegiatan, tetap merencanakan kegiatan kepada daerah dusun yang membutuhkan bantuan dana PNPM karena pihak koordinator dapat mengetahui kondisi wilayah dan kebutuhan dengan melakukan survei.
2. Dalam Pencapaian dan ketepatan Kegiatan belum sesuai karena kegiatan yang tidak masuk rencana masih tetap masuk dalam pelaksanaan diharapkan pihak koordinator dapat menggunakan dana yang telah dicairkan dengan baik dan

memprioritaskan program kegiatan yang telah masuk rencana apabila terdapat sisa dana yang telah digunakan untuk program kegiatan dapat digunakan untuk program kegiatan yang tidak masuk dalam rencana kegiatan.

3. Dalam hambatan yang ada di dalam penyusunan rencana kegiatan masyarakat maupun dalam proses pelaksanaan program kegiatan diharapkan adanya kerjasama yang baik dari seluruh aktor yang terkait dalam proyek yang telah direncanakan. Tanggung jawab yang telah diberikan dapat dijalankan dengan baik karena program kegiatan PNPM ini menjadi hak bagi masyarakat desa yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan hidup mereka. Sehingga kerjasama antara para koordinator penanggung jawab program rencana kegiatan PNPM ini dengan masyarakat yang mendapat pelayanan dari pemerintah pusat dapat terus terjalin. Adanya sanksi bagi para koordinator PNPM yang tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dapat membantu menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi semua penanggungjawab program PNPM.
4. Dalam perencanaan kegiatan lebih diperhatikan perkiraan yang akan diajukan sehingga tidak terjadi selisih yang signifikan antara perkiraan biaya dalam perencanaan kegiatan dengan total biaya yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
5. Untuk bidang kegiatan sosial dalam pelatihan-pelatihan masyarakat seharusnya pelatihan yang diberikan disesuaikan dengan minat masyarakat desa sehingga program kegiatan tidak berhenti ditengah jalan hanya kerana kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pelatihan tersebut.

6. Dalam sosialisasi pada warga masyarakat karena adanya dusun yang tidak mengirimkan wakilnya dalam perencanaan kegiatan diharapkan koordinator PNPM dapat menunjukkan keuntungan dari penggunaan dana PNPM tersebut dalam pembangunan desa Ngadirengga sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti sosialisasi program kegiatan PNPM
7. Kurangnya respon yang baik dari masyarakat Desa Ngadirengga yang beranggapan bahwa jaminan dari tempat bekerja mereka lebih menjamin daripada dana dari PNPM Mandiri Pedesaan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan adanya sosialisasi yang baik dan menyeluruh bagi semua warga masyarakat desa untuk mengetahui keuntungan dari semua program kegiatan yang diberikan oleh dana PNPM sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat desa Ngadirengga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. R. 2013. *Pembangunan Pedesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta : Graha ilmu
- Basrowi. Dr. M.Pd. dan Suwandi. Dr. M.si. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Kelima, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Fitriana. A. 2013, eJurnal Ilmu Pemerintahan, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara*, 1 (2): 430-445.
- Fuadika. N. G. 2011. *Program Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. [Skripsi]. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.
- Hamzah. A. 2012. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia : Realita dan Pembelajaran*, 1(1):1-55
- Indiahono. D, Nuraini. H dan Satyawan. D.S. 2012, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik, Model Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan Di Kabupaten Banyumas*, 25(1) : 1-7.
- Labombang. M. 2011, *Dampak Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pada Program PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Toli-toli*, 1.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Keduapuluh empat, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis. H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama. Penerbit Erlangga.
- Prastyanti. S. 2011, *PNPM Mandiri Pedesaan dan Pengembangan Kapasitas Perempuan*, 7 (2).
- Rahmat. I. 2012, *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (PNPM MPd SPP) Di Desa Teluk Buton Kabupaten Natuna*.
- Suyono. A. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*, malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Sumiyati. I. 2013, eJurnal Pemerintahan Integratif, *Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kabupaten Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*, 1 (1): 28-36.
- Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri*

Perdesaan- Penjelasan X Pinjaman Bergulir. Jakarta : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

Undang-undang No. 22. 1999. *Tentang Pemerintahan Daerah*, diakses pada tanggal 03 februari 2014 dari <http://prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu-22-1999.pdf>

Undang-undang No. 32. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*, diakses pada tanggal 25 Februari 2014 dari <http://www.google.com/search?client=ms-rim&hl=id&q=undang-undang%20no%2032%20tahun%202004&ie=UTF-8&channel=browser>

Yudhaningsih. R. 2011, jurnal Pengembangan Humaniora, *Peningkatan Efektivitas Kerja Melalui Komitmen Perubahan dan Budaya Organisasi*, 11 (1) : 40-50

Yulianti. D. 2012. *Efektivitas Program PTPN 7 Peduli di PTPN VII (Persero) Lampung (Suatu Evaluasi Atas Program CSR)*. [Tesis]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia.

Yusuf. Y, Iyan. R.Y dan Saputra. E. 2010, *Implikasi Program Naional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pedapatan Pedagang Kecil Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan di Provinsi Riau*.



Lampiran 1.

Matrik Susunan Rencana Program Kegiatan PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011

No	Indikasi Persoalan	Target Capaian	Permasalahan	Program	Penanggungjawab	Total Kebutuhan Dana	Waktu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Adanya balita dan ibu hamil dengan berat badan kurang dari usianya, dikarenakan asupan gizinya kurang	Asupan gizi balita tercukupi sehingga kesehatan balita meningkat 30 %	Masih minimnya asupan gizi bagi balita dan ibu hamil dari pemerintah setempat	Asupan gizi balita dan ibu hamil	UPS	25.000.000	2011- 2013
2	Adanya kebutuhan masyarakat untuk social produktif kambing bergulir	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Terbatasnya kegiatan untuk bantuan peternak miskin	Kambing bergulir	UPS	32.000.000	2011- 2013
3	Banyaknya sarana pendidikan APE dan juga yang lainnya masih kurang memadai	Terpenuhinya sarana pendidikan masyarakat dengan baik 25 %	Belum punya sarana pendidikan dengan baik	Pengadaan sarana dan prasarana TK dan PAUD	UPS	15.000.000	2011- 2013
			Belum adanya sarana belajar dan wahana untuk melatih kecerdasan anak	Pengadaan APE TK dan PAUD	UPS	21.000.000	2011- 2013
4	Adanya pengangguran produktif di kalangan masyarakat	Menurunkan angka pengangguran produktif di kalangan masyarakat 26 %	Terbatasnya sarana pelatihan aktif	Pelatihan pakan ternak	UPS	8.500.000	2011- 2013
			Tidak adanya akses yang jelas mengenai info	Pelatihan pupuk organik	UPS	4.500.000	2011- 2013
5	Banyaknya anak-anak yang masih minim dalam menerima pendidikan tambahan	Terpenuhinya pendidikan anak-anak warga miskin 58%	Terbatasnya sarana pendidikan yang bisa dijangkau anak-anak warga miskin	LES gratis untuk anak-anak warga miskin	UPS	15.000.000	2011- 2013
6	Masih adanya jalan rusak dan akses jalan yang sulit di lalui oleh masyarakat terutama pada waktu	Pemenuhan akan perbaikan jalan / makadam jalan, aspal jalan dan rabat jalan	Masih adanya jalan yang rusak	Makadam jalan	UPL	271.000.000	2011- 2013
			Masih adanya jalan yang belum diaspal	Aspal jalan	UPL	50.000.000	2011- 2013

	musim hujan	terpenuhi 37%	Masih adanya jalan kampung yang kurang baik	Rabat jalan	UPL	112.000.000	2011- 2013
7	Sistem drainase yang kurang memadai	Terpenuhinya sistem drainase yang tepat guna di masyarakat 34%	Terjadinya aliran yang deras pada waktu hujan dan mengakibatkan banjir	Pembuatan drainase	UPL	513.000.000	2011- 2013
8	Banyaknya plengsengan jalan yang rusak terkikis air sehingga harus ada pembenahan	Terpenuhinya pembangunan plengsengan yang lebih baik 56%	Terjadinya longsor akibat kikisan air hujan	Pembuatan plengsengan	UPL	195.000.000	2011- 2013
			Terjadinya alur dan kontur tanah yang tidak ideal	Rehab plengsengan	UPL	150.000.000	2011- 2013
9	Masih ada rumah warga yang kurang layak huni	Rumah warga menjadi layak huni 25%	Masih adanya rumah yang kurang layak huni di masyarakat	Rehab rumah	UPL	50.000.000	2011- 2013
10	Masih ada warga yang kekurangan air bersih	Warga miskin mendapat pelayanan air bersih 100%	Terpenuhinya layanan air bersih kepada masyarakat	Pelayanan air bersih	UPL	201.000.000	2011- 2013
11	Pendapatan ekonomi warga yang masih rendah	Meningkatkan pendapatan warga melalui peningkatan usaha 30%	Masih adanya pendapatan warga yang berada kurang dari Rp. 400.000 karena tidak punya usaha dan untuk usaha permodalan kurang	Pemberian pinjaman modal usaha secara bergulir lewat KSM	UPK	189.000.000	2011- 2013
Total						1.852.000.000	

Lampiran 2.

Rencana Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Periode Tahun 2011 – Tahun 2013

No	Program	Lokasi			Volume	Perkiraan Biaya	Pelaksana	Penanggung Jawab	Sumberdaya	Waktu	
		RT	RW	Dusun							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
BIDANG LINGKUNGAN											
1	Makadam jalan (lanjutan)	3	9	Genjong	900x3	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 - 2013
2	Makadam jalan	2	10	Genjong	2,5x100	13.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 - 2013
3	Makadam jalan	3	10	Genjong	2,5x100	12.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 - 2013
4	Makadam jalan	1	10	Genjong	2,5x100	30.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 - 2013
5	Makadam jalan	3	9	Genjong	2,5x400	11.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 - 2013

6	Makadam jalan		14	Pijiombo	3x1200	13.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
7	Makadam jalan		11	Ringin telu	3x1200	30.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
8	Makadam jalan		6	Nongkorejo	3x1200	13.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
9	Makadam jalan	3	4	Ngola'an	600x3	30.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
10	Makadam jalan	2	3	Ngadirengga	200x3	12.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
11	Makadam jalan	1	6	Nongkorejo	190x2,5	10.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
12	Makadam jalan (putuk)	3	7	Sanggrahan	200x2,5	34.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
13	Makadam jalan	2	8	Sumberduren	500x2,5	13.000.000	KSM/ Panitia,	Sumardjianto	Sumber	pasir,	2011	-

							relawan,dan masyarakat	(UPL)	material swadaya masyarakat, batu,	2013	
14	Aspal jalan	1,2	4	Ngola'an	600x3	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, pasir, batu, program pemerintah	2011 2013	-
15	Rabat jalan	2	6	Nongkorejo	100x2	45.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, pasir, batu, program pemerintah	2011 2013	-
16	Rabat jalan	2,3	9	Genjong	2x300	10.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, pasir, batu, program pemerintah	2011 2013	-
17	Rabat jalan	2	1	Ngadirengga	100x2,8	20.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, pasir, batu, program pemerintah	2011 2013	-
18	Rabat jalan	1	7	nongkorejo	2x250	12.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, pasir, batu, program pemerintah	2011 2013	-
19	Rabat jalan			Ringin telu	2x250	10.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, pasir, batu, program pemerintah	2011 2013	-
20	Rabat jalan		6	Nongkorejo	2x300	15.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, pasir, batu,	2011 2013	-

									program pemerintah			
21	Parit/ drainase	1,2	3	Ngadirengga	220x0,5	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 2013	-
22	Parit/ drainase	1,2	4	Ngola'an	600x0,5	45.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 2013	-
23	Parit/ drainase	1,2	8	Sumberduren	300x0,5	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 2013	-
24	Parit/ drainase	1	9	Genjong	3x500	12.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 2013	-
25	Parit/ drainase	3	10	Genjong	3x300	10.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 2013	-
26	Drainase	1	10	Genjong	2x500	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011 2013	-
27	Drainase	2	10	Genjong	2,3x500	45.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat,	pasir, batu,	2011 2013	-

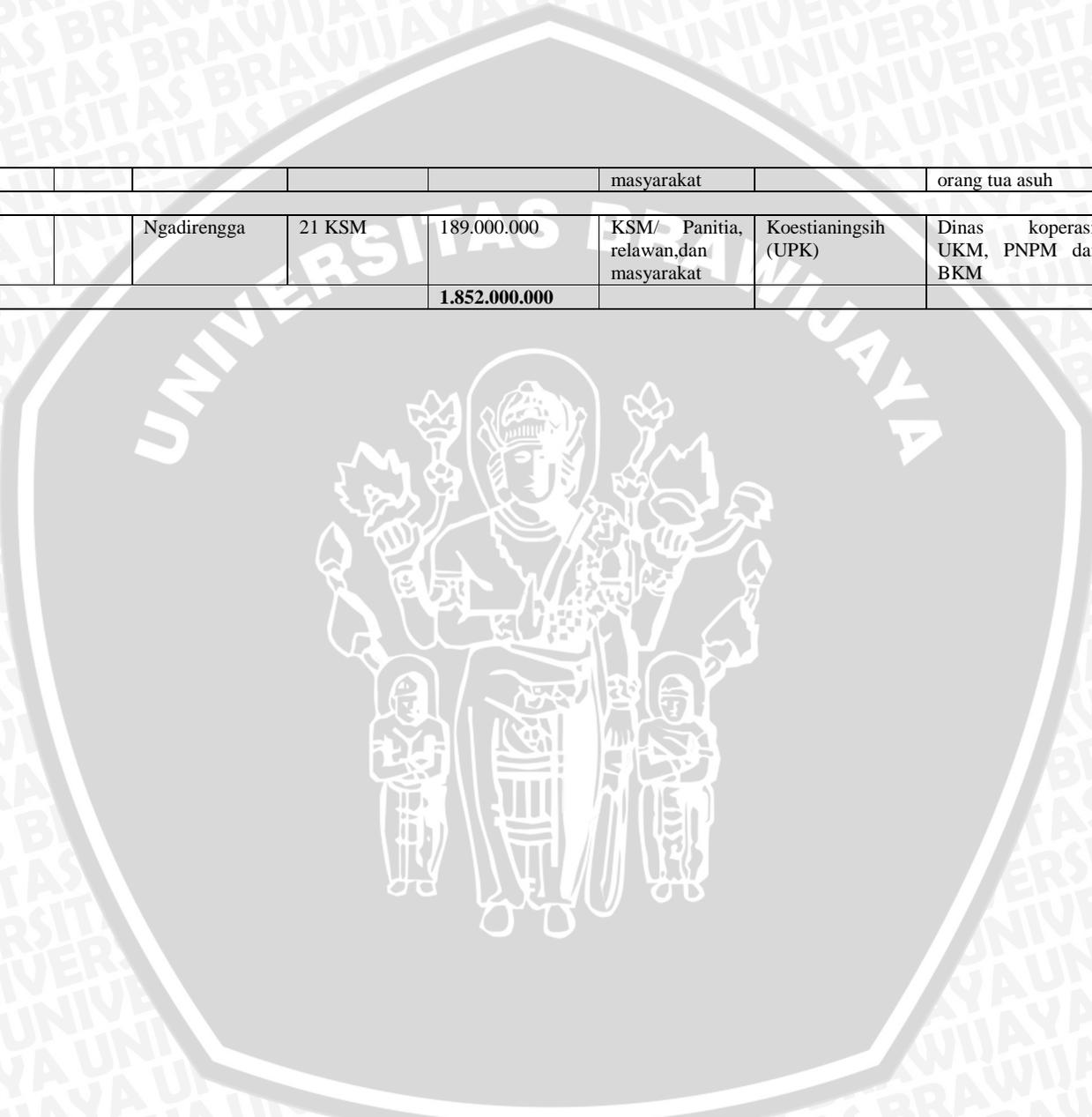
									program pemerintah			
28	Drainase	3	9	Genjong	2,3x400	32.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
29	Drainase	1,2	4	Ngola'an	200x0,5	20.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
30	Drainase	2	1	Ngadirengga	120x0,5	30.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
31	Drainase		1	Ngadirengga	0,4x1x1200	10.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
32	Drainase		9,10	Genjong	0,2x3x400	23.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
33	Gorong-gorong/ pemasangan bis beton	3	10	Genjong	2,5x4	11.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
34	Parit/ drainase	1	7	Sanggrahan	60x0,5	30.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat,	pasir, batu,	2011-2013	-

									program pemerintah			
35	Saluran irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	2000x1x0,5	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
36	Dam irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	3	45.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
37	Plengsengan	1	10	Genjong	5x10	20.750.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
38	Plengsengan	2	9	Genjong	10x12	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
39	Plengsengan	1	9	Genjong	3x3x7	12.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
40	Plengsengan	1	7	Sanggrahan	3x3x0,5	10.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
41	Plengsengan makam umum	Dsn	Dsn	Ngadirengga	500x3x0,5	20.750.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat,	pasir, batu,	2011-2013	-

									program pemerintah			
42	Plengsengan	1	7	Sanggrahan	30x0,5	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
43	Plengsengan (depan selip)	1	7	Sanggrahan	40x3x0,5	32.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
44	Pembangunan jembatan		4,5	Ngola'an	3,5x40	150.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
45	Rehab rumah			Ngadirengga	40 unit	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
46	Pipanisasi + tabung air bersih	1	16	Perke. Sengon	300+1	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
47	Pipanisasi	2	14	Perh. Pijiombo	500	45.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat, program pemerintah	pasir, batu,	2011-2013	-
48	Pipanisasi	4	19	Perk. Sirah kencong	500	50.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material swadaya masyarakat,	pasir, batu,	2011-2013	-

									program pemerintah	
49	Pipanisasi air + tandon	Dsn	Dsn	Genjong	1000+6	56.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011 - 2013
BIDANG SOSIAL										
50	Asupan gizi balita			Ngadirengga	6 bln	25.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, bidan, kader posyandu desa	2011 - 2013
51	Asupan gizi ibu hamil			Ngadirengga	6 bln	17.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, bidan, kader posyandu desa	2011 - 2013
52	Kambing bergulir			Ngadirengga	36 bln	32.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan desa, dan tomas	2011 - 2013
53	Pengadaan APE TK			Ngadirengga	23 bln	21.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas dan orang tua asuh	2011 - 2013
54	Pengadaan sarana prasarana TK			Ngadirengga		15.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas dan orang tua asuh	2011 - 2013
55	Pelatihan pakan ternak			Ngadirengga	32 bln	8.500.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan desa, dan tomas	2011 - 2013
56	Pelatihan pupuk kompos			Ngadirengga	12 bln	4.500.000	KSM/ Panitia, relawan,dan masyarakat	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan desa, dan tomas	2011 - 2013
57	LES Gratis			Ngadirengga	12 bln	15.000.000	KSM/ Panitia, relawan,dan	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas dan	2011 - 2013

						masyarakat		orang tua asuh	
BIDANG EKONOMI									
58	Pinjaman bergulir masyarakat desa		Ngadirengga	21 KSM	189.000.000	KSM/ Panitia, relawan, dan masyarakat	Koestianingsih (UPK)	Dinas koperasi, UKM, PNPM dan BKM	2011 - 2013
Jumlah total					1.852.000.000				



Lampiran 3.

Matriks Persoalan Kemiskinan dan Daftar Prioritas Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi

No	Permasalahan	Hubungan sebab akibat		Jenis Kegiatan	Prakiraan penerima manfaat		Harapan	Kebutuhan	Jenis dan alokasi sumberdaya	Prioritas
		Faktor penyebab	Akibat yang ditimbulkan		L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BIDANG LINGKUNGAN										
1	Jalan tanah rusak di beberapa tempat sehingga perlu diadakan pembenahan	Karena kurangnya kegiatan untuk pembenahan jalan yang kurang merata dan ketika hujan turun jalan menjadi sulit untuk dilewati	Banyaknya jalan yang rusak akses transportasi masyarakat jadi terganggu	Makadam jalan Aspal jalan Pembangunan rabat jalan atau rehab	130 67 114	78 67 98	Pemenuhan akan perbaikan jalan/ makadam jalan, rabat jalan dan paving terpenuhi	Perbaikan makadam jalan, rabat jalan dan paving jalan kampung	BLM/ APBD Swadaya	I
2	Musim hujan banyak jalan-jalan yang tergenang oleh air hujan sehingga banyak pekarang rumah warga yang tergenang oleh air hujan	Karena pada waktu musim hujan tidak ada aliran yang khusus dialiri oleh air hujan	Pada waktu musim hujan sering terjadi banjir di depan pekarangan rumah warga masyarakat	Pembuatan saluran air/ parit/ drainase	112	89	Terpenuhinya sistem drainase yang tepat guna di masyarakat	Pembangunan gorong-gorong, parit dan drainase	BLM/ APBD Swadaya	II
3	Musim hujan banyak jalan-jalan yang terkikis air sehingga badan jalan tidak bisa menampung untuk arus air yang deras	Karena pada waktu musim hujan kekuatan badan jalan semakin menipis sehingga terjadi ambrol	Untuk keamanan badan jalan perlu fungsi khusus untuk menguatkan jalan	Pembuatan dan rehab plengsengan	112	89	Terpenuhinya pembangunan plengsengan yang lebih baik	Pembangunan dan rehb plengsengan	BLM/ APBD Swadaya	III

4	Banyaknya pemukiman kumuh di masyarakat dan rumah tidak layak huni yang segera di benahi	Karena kurangnya kegiatan untuk rehab rumah tidak layak huni	Kegiatan rehab rumah tertentu saja yang menikmati	Rehab rumah tidak layak huni	20	10	Rumah warga menjadi layak huni	Perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga miskin	BLM/ APBD Swadaya	IV
BIDANG SOSIAL										
1	Banyaknya balita dan ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin yang kurang gizi sehingga membutuhkan bantuan	Beban ekonomi keluarga	Tidak terpenuhinya kebutuhan primer balita	Pemberian asupan gizi bagi balita dan ibu hamil	60	40	Asupan gizi balita dan ibu hamil tercukupi sehingga kesehatan balita meningkat	Pemberian makanan bergizi kepada balita dan ibu hamil keluarga miskin	BLM Swadaya	I
		Asupan gizi yang kurang	Beran badan menurun							
		Harga makanan bergizi yang terus naik/mahal	Makanan bergizi tidak dapat terbeli							
2	Peningkatan kegiatan sosial produktif masyarakat kambing bergulir	Karena tidak adanya kegiatan yang bisa untuk memajukan para peternak miskin	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Kegiatan kambing bergulir	25	05	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Sosialisasi manfaat sosial produktif terutama tentang kegiatan kambing bergulir	BLM Swadaya	II
3	Banyaknya TK dan PAUD yang kurang sarana permainan edukatifnya sehingga perlu diberikan bantuan keberlanjutan belajarnya	Karena kurangnya bantuan pendidikan untuk tingkat TK dan PAUD	Bantuan pendidikan hanya di khususkan untuk TK dan bantuan tertentu sehingga tidak tepat sasaran	Pemberian APE dan sarana prasarana bagi TK dan PAUD	50	40	Terpenuhinya sarana pendidikan bagi masyarakat miskin dengan baik	Memfasilitasi dengan seksama dari kebutuhan yang ada dengan cara peningkatan sarannya dengan efektif seperti kebutuhan APE dan lainnya	BLM Swadaya	III
4	Banyaknya kaum produktif yang masih menganggur	Karena kurangnya akses pelatihan pengembangan	Karena akses pelatihan hanya untuk tertentu saja	Pelatihan produktif pakan ternak	33	15	Angka pengangguran dapat dikurangi	Sosialisasi dan penyuluha pelatihan	BLM Swadaya	IV

			potensi masyarakat		Pelatihan pupuk kompos	25	15		ketrampilan dan lain-lain di kalangan masyarakat		
5	Peningkatan pendidikan masyarakat memberikan gratis dan pembangunan perpustakaan masyarakat	sarana dengan LES dan	Karena upaya untuk meningkatkan kecerdasan anak dan masyarakat sangat dibutuhkan maka perlu adanya kegiatan yang searah dengan pendidikan	Kurangnya sarana pendidikan yang efektif untuk masyarakat dan anak-anak	Kegiatan pelatihan komputer LES gratis dan perpustakaan masyarakat	45	25	Meningkatkan pendidikan anak-anak dari keluarga miskin	Sosialisasi manfaat tentang pendidikan bagi anak-anak	BLM Swadaya	V
BIDANG EKONOMI											
1	Banyaknya warga produktif dengan usaha kecil dengan penghasilan kurang dari 400.000 per bulan	dengan kurang per	Tidak bisa mengakses modal usaha di pihak lain / kurang modal	Kalah bersaing sehingga terjadi gulung tikar	Kredit modal usaha/ simpan pinjam	50	100	Pendapatan warga masyarakat meningkat	Pemberian pinjaman modal usaha secara bergulir lewat KSM	BLM Swadaya	I

Lampiran 4.

Pelaksanaan Kegiatan Program PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Periode Tahun 2011 – Tahun 2013

No	Program	Lokasi			Volume	Penerima Manfaat		Perkiraan Biaya	Pelaksana	Penanggung jawab	Sumberdaya	Waktu
		RT	RW	Dusun		L	P					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG LINGKUNGAN												
Target 1 : memperbaiki kondisi sarana jalan warga miskin 45%												
1	Aspal	1,2	4	Ngola'an	600x3	49	51	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material pasir, batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
2	Rabat jalan	2	6	Nongkorejo	100x2	33	30	45.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material pasir, batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
3	Makadam jalan (lanjutan)	3	9	Genjong	900x3	36	40	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material pasir, batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
4	Rabat jalan	2	11	Perhutani nongkorejo	2x250	28	35	32.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber material pasir, batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013

5	Makadam jalan	2	10	Genjong	2,5x100	39	44	13.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
6	Makadam jalan	3	10	Genjong	2,5,x100	14	24	12.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
7	Makadam jalan	1	10	Genjong	2,5x100	36	47	30.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
8	Rabat jalan	2,3	9	Genjong	2x300	27	22	10.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
9	Makadam jalan	3	9	Genjong	2,5x400	38	49	11.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013v
10	Rabat jalan	1	14	Perhutani pijiombo	2,5x200	50	54	20.750.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
11	Rabat jalan	2	14	Perhutani	2,5x200	84	71	15.000.000	KSM/ panitia,	Sumardjianto	Sumber pasir,	2011-

				pijiombo					relawan dan masyarakat	(UPL)	material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2013
12	Rabat jalan	2	1	Ngadirengga	100x2,8	17	20	20.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
13	Rabat jalan	1,2	19	Perkebunan sirahkencong	500	29	29	34.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
14	Makadam jalan		14	Pijiombo	3x1200	47	51	13.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
15	Rabat jalan	1	6	Nongkorejo	2x250	58	64	12.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
16	Makadam jalan		11	Ringin telu	3x1200	35	40	30.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
17	Rabat jalan			Ringin telu	2x250	59	77	10.000.000	KSM/ panitia, relawan dan	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu,	2011-2013

									masyarakat		swadaya masyarakat, program pemerintah	
18	Rabat jalan		6	Nongkorejo	2x300	20	20	15.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
19	Makadam jalan		6	Nongkorejo	3x1200	24	30	13.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
20	Makadam jalan, pertanian	2	3	Ngadirengga	200x3	24	35	12.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
21	Makadam jalan	3	4	Ngola'an	600x3	30	30	30.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
22	Makadam jalan	1	6	Nongkorejo	190x2,5	47	51	10.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
23	Makadam jalan (putuk)	3	7	Sanggrahan	200x2,5	47	51	34.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya	2011-2013

											masyarakat, program pemerintah	
24	Makadam jalan	2	8	Sumberduren	500x2,5	58	64	13.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
25	Makadam jalan jurusan genjong	1,2	12	Perhutani ringin telu	800x1	35	40	12.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
26	Makadam jalan	1,2	14	Perhutani pijiombo	1000x1	46	77	45.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
Target 2 : saluran dan lahan rawan lonzor teratasi 65%												
27	Parit	1,2	3	Ngadirengga	220x0,5	18	25	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
28	Parit	1,2	4	Ngola'an	600x0,5	15	18	45.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
29	Parit	1,2	8	Sumberduren	300x0,5	22	20	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya	2011-2013

											masyarakat, program pemerintah	
30	Drainase	2	11	Perhutani nongkorejo	2,5x250	35	42	32.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
31	Drainase	1	11	Perhutani nongkorejo	2x100	30	37	13.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
32	Parit/ drainase	1	9	Genjong	3x500	12	14	12.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
33	Parit/ drainase	2	10	Genjong	3x200	8	11	30.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
34	Parit/ drainase	3	10	Genjong	3x300	9	10	10.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
35	Gorong-gorong / pemasangan bis beton	3	10	Genjong	2,5x4	11	13	11.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat,	2011-2013

36	Talut/ plengsengan	1	10	Genjong	5x10	102	111	20.750.000	KSM/ relawan masyarakat	panitia, dan	Sumardjianto (UPL)	program pemerintah Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011- 2013
37	Parit/ drainase	1	10	Genjong	2x500	102	111	50.000.000	KSM/ relawan masyarakat	panitia, dan	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011- 2013
38	Parit/ drainase	2	9	Genjong	2,3x500	11	15	45.000.000	KSM/ relawan masyarakat	panitia, dan	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011- 2013
39	Talut/ plengsengan	2	9	Genjong	10x12	20	20	50.000.000	KSM/ relawan masyarakat	panitia, dan	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011- 2013
40	Parit/ drainase	3	9	Genjong	2,3x400	24	30	32.000.000	KSM/ relawan masyarakat	panitia, dan	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011- 2013
41	Parit/ drainase	1	14	Perhutani pijiombo	2,5x200	24	35	13.000.000	KSM/ relawan masyarakat	panitia, dan	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program	2011- 2013

42	Talut/plengsengan	1	9	Genjong	3x3x7	30	30	12.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	pemerintah	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
43	Parit (depan bu gimah)	1	7	Sanggrahan	60x0,5	19	26	30.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	pemerintah	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
44	Plengsengan (depan bu tanem)	1	7	Sanggarahan	3x3x0,5	50	50	10.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	pemerintah	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
45	Talut	1	14	Perhutani pijiombo	15x0,5	50	50	11.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	pemerintah	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
46	Plengsengan makam umum	Dsn	Dsn	Ngadirengga	500x3x0,5	77	80	20.750.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	pemerintah	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
47	Saluran irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	2000x1x0,5	65	69	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	pemerintah	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	

48	Pembuatan dam irigasi	Dsn	Dsn	Ngadirengga	3	20	20	45.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
49	Plengsengan (depan slamet)	1	7	Sanggarahan	30x0,5	24	30	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
50	Plengsengan (depan selip jiono)	1	7	Sanggarahan	40x3x0,5	24	35	32.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
51	Parit	1,2	4	Ngola'an	200x0,5	30	30	20.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
52	Parit	2	11	Perhutani nongkorejo	150x0,5	50	50	12.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
53	Parit	2	1	Ngadirengga	120x0,5	77	80	30.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
54	Parit/ drainase		1	Ngadirengga	0,4x1x200	65	69	10.000.000	KSM/ panitia,	Sumardjianto	Sumber pasir,	2011-

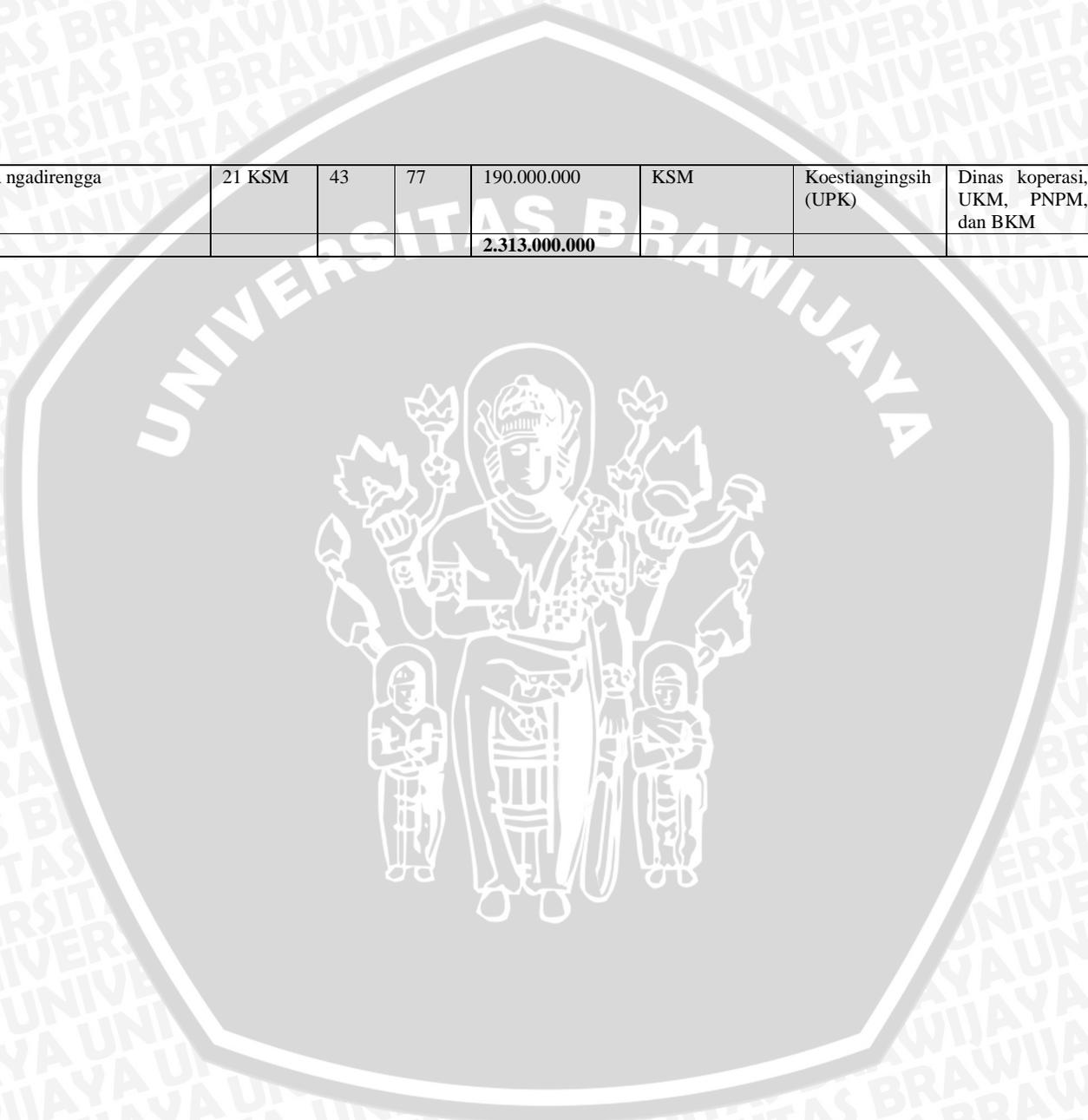
									relawan dan masyarakat	(UPL) Sumardjianto (UPL)	material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2013
55	Parit/ drainase		9,10	Genjong	0,2x3x400	20	20	23.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL) Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
56	Talud + Parit		3	Ngadirengga	5x3x25	24	30	20.750.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
57	Talud + Parit		6	Nongkorejo	5x3x25	24	35	19.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
Target 3 : warga miskin mendapatkan pelayanan air bersih 100%												
58	Pipanisasi tabung bersih + air	1	16	Perkebunan sengon	300+1	20	20	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
59	pipanisasi	2	14	Perhutani pijiombo	500	24	30	45.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
60	Pipanisasi	4	19	Perkebunan	500	24	35	50.000.000	KSM/ panitia,	Sumardjianto	Sumber pasir,	2011-

				sirahkencong					relawan dan masyarakat	(UPL)	material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2013	
61	Pipanisasi tandon	+	Dsn	Dsn	Genjong	1000+6	65	38	56.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013
62	Pembangunan jembatan	3	19	Perkebunan sirahkencong	6x2,5	76	49	76.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013	
63	Pembangunan jembatan		4,5	Ngola'an	3,5x40	56	44	150.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013	
Target 5 : meningkatkan sarana lingkungan masyarakat 56%													
64	Rehab rumah		Desa Ngadirengga		40 unit	23	34	50.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013	
65	Pembuatan MCK	1	11	Perhutani nongkorejo	3 unit	65	38	15.000.000	KSM/ panitia, relawan dan masyarakat	Sumardjianto (UPL)	Sumber pasir, material batu, swadaya masyarakat, program pemerintah	2011-2013	

BIDANG SOSIAL												
Kesehatan												
Target : menurunkan angka lansia, ibu hamil dan balita kurang gizi 30%												
66	Asupan gizi lansia	Desa ngadirengga	6 bln	75	45	15.000.000	KSM/ dan panitia kader posyandu	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, bidan, kader posyandu	2011-2013		
67	Asupan gizi balita	Desa ngadirengga	6 bln	77	65	25.000.000	KSM/ dan panitia kader posyandu	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, bidan, kader posyandu	2011-2013		
68	Asupan gizi ibu hamil	Desa ngadirengga	6 bln	0	43	17.000.000	KSM/ dan panitia kader posyandu	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, bidan, kader posyandu	2011-2013		
Pelatihan												
Target : meningkatkan ketrampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan inovatif masyarakat 30%												
69	Pelatihan pembuatan pupuk kompos	Desa ngadirengga	12 bln	32	47	10.000.000	KSM dan panitia	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat	2011-2013		
70	Pelatihan pembuatan pakan ternak	Desa ngadirengga	32 bln	34	25	10.000.000	KSM dan panitia	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat	2011-2013		
71	Kambing bergulir	Desa ngadirengga	36 bln	12	57	27.000.000	KSM dan panitia	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat	2011-2013		
72	Pelatihan menjahit ibu-ibu	Desa ngadirengga	18 bln	0	56	18.000.000	KSM dan panitia	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan	2011-2013		

									desa dan tokoh masyarakat	
73	Pelatihan tata boga bagi masyarakat dan ibu-ibu	Desa ngadirengga	6 bln	10	49	12.000.000	KSM panitia dan	Hardjito (UPS)	Dinas sosial, PPL kec wlingi, BLK, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat	2011-2013
Pendidikan										
Target : meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak miskin demi tercapainya kemampuan yang maksimal di dalam pendidikan dasar 20%										
74	Pelatihan pendidikan komputer buat anak-anak miskin	Desa ngadirengga	12 bln	32	43	18.000.000	KSM panitia dan	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas, dan orang tua asuh	2011-2013
75	Pengadaan APE TK	Desa ngadirengga	23 bln	44	37	21.000.000	KSM panitia dan	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas, dan orang tua asuh	2011-2013
76	Pengadaan APE posyandu	Desa ngadirengga	18 bln	31	35	13.000.000	KSM panitia dan	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas, dan orang tua asuh	2011-2013
77	Program perpustakaan masyarakat	Desa ngadirengga	36 bln	38	44	16.000.000	KSM panitia dan	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas, dan orang tua asuh	2011-2013
78	Les gratis untuk anak kelas 6 SD yang kurang mampu	Desa ngadirengga	12 bln	23	43	10.000.000	KSM panitia dan	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas, dan orang tua asuh	2011-2013
79	Beasiswa terpadu bagi anak-anak miskin	Desa ngadirengga	12 bln	65	78	18.000.000	KSM panitia dan	Hardjito (UPS)	Ada dana BOS, dinsos, diknas, dan orang tua asuh	2011-2013
BIDANG EKONOMI										
Target : meningkatkan pendapatan warga miskin 30%										

80	Pinjaman bergulir bagi warga miskin	Desa ngadirengga	21 KSM	43	77	190.000.000	KSM	Koestiangingsih (UPK)	Dinas koperasi, UKM, PNP, dan BKM	2011-2013
Jumlah total						2.313.000.000				



Lampiran 5.

Matrik Susunan Pelaksanaan Program Kegiatan PNPM Desa Ngadirengga Kecamatan Wlingi Tahun 2011-2013

No 1	Indikasi Persoalan 2	Program 3	Target Pencapaian 4	Penanggungjawab 5	Total Dana 6	waktu 7
1	Masih adanya jalan rusak dan akses jalan yang sulit di lalui oleh masyarakat terutama pada musim hujan	Makadam jalan Aspal jalan Rabat jalan	Pemenuhan akan perbaikan jalan/ makadam jalan, aspal jalan dan rabat jalan terpenuhi 45%	UPL	691.750.000	2011- 2013
2	Sistem drainase yang kurang memadai	Pembuatan drainase	Terpenuhinya sistem drainase yang tepat guna di masyarakat untuk saluran air dan lahan rawan longsor teratasi 65%	UPL	809.250.000	2011- 2013
3	Masih banyak warga masyarakat yang kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari	Pelayanan air bersih bagi warga masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan air bersih bagi warga masyarakat untuk membantu kehidupan sehari-hari merekateratasi 100%	UPL	201.000.000	2011- 2013
4	Masih adanya penghubung akses transportasi warga masyarakat denga desa lain yang membutuhkan pembenahan untuk lebih menghemat waktu bagi masyarakat	Pembuatan sarana jalan jembatan untuk warga masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan meningkatkan sarana jalan jembatan bagi warga masyarakat 30%	UPL	226.000.000	2011- 2013
5	Masih banyak rumah warga masyarakat desa yang tidak layak huni	Melakukan rehab rumah bagi rumah-rumah warga masyarakat yang tidak layak huni	Meningkatkan sarana lingkungan masyarakat untuk pembangunan rehab rumah 56%	UPL	65.000.000	2011- 2013
6	Adanya balita dan ibu hamil dengan berat badan kurang dari usianya, dikarenakan asupan gizinya kurang memenuhi	Asupan gizi bagi balita dan ibu hamil	Asupan gizi balita tercukupi sehingga kesehatan balita meningkat 30%	UPS	57.000.000	2011- 2013

7	Adanya pengangguran produktif di kalangan warga masyarakat	Pelatihan pembuatan pakan ternak	Menurunkan angka pengangguran produktif di kalangan warga masyarakat 30 %	UPS	77.000.000	2011- 2013
		Pelatihan pembuatan pupuk kompos				
8	Banyaknya anak-anak yang masih minim dalam menerima pendidikan tambahan terutama bagi warga miskin	LES gratis untuk anak-anak yang tergolong warga miskin	Meningkatkan mutu pendidikan bagi anak-anak miskin demi tercapainya kemampuan yang maksimal dalam pendidikan dasar mereka 20%	UPS	96.000.000	2011- 2013
9	Masih adanya Pendapatan ekonomi warga yang tergolong rendah	Pemberian pinjaman modal usaha secara bergulir lewat KSM	Meningkatkan pendapatan warga miskin melalui peningkatan usaha 30%	UPK	190.000.000	2011- 2013
Jumlah total					2.313.000.000	

Lampiran 6.**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Berapa luas wilayah Desa Ngadirengga?
2. Berapa jumlah penduduk Desa Ngadirengga? Laki-laki dan perempuan
3. Berapa jumlah KK keseluruhan di Desa Ngadirengga?
4. Berapa jumlah Rumah Tangga miskin di Desa Ngadirengga?
5. Berapa jumlah warga miskin keseluruhan?
6. Daftar mata pencaharian warga desa Ngadirengga?
7. Apa saja jenis pekerjaan warga Desa Ngadirengga? Berapa jumlah total keseluruhan?
8. Bagaimana respon masyarakat terhadap adanya program PNPM?
9. Apa saja program kegiatan dalam PNPM?
10. Bagaimana sosialisasi terhadap masyarakat dengan adanya program PNPM?
11. Bagaimana keterlibatan semua aktor dalam pelaksanaan program PNPM?
12. Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PNPM?
13. Siapa yang memiliki tanggung jawab memonitoring proses kegiatan?
14. Bagaimana proses perencanaan kegiatan PNPM sebelum dilaksanakan?
15. Bagaimana menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan?
16. Berapa jumlah sarana prasarana yang sudah diperbaiki?
17. Apa saja jenis program kegiatan yang masih berjalan sampai saat ini?
18. Apa saja jenis program kegiatan yang tidak dilanjutkan? mengapa?
19. Program apa saja yang sudah terlihat hasilnya?
20. Berapa anggaran dana PNPM dalam sekali periode?
21. Apakah dengan dana yang diperoleh sudah mengatasi kemiskinan?
22. Apakah terdapat kendala dalam pengajuan dana?
23. Apakah dengan dana yang diperoleh sisa atau kurang untu kegiatan PNPM?
24. Apa yang dihasilkan dari program yang sudah berjalan?
25. Bagaimana ketepatan rencana dan realisasi program kegiatan PNPM?
26. Adakah sanksi apabila kegiatan yang belum tepenuhi dalam satu periode?
27. Apa saja hal yang dapat mendukung program kegiatan PNPM?
28. Apa saja hal menjadi hambatan atau kendala bagi peogram kegiatan PNPM?
29. Bagaimana penanggungjawab program mengatasi kendala yang muncul?
30. Adakah manfaat atau keuntungan dengan adanya kegiatan PNPM?

CURRICULUM VITAE

Nama : Alvanda Chrisna Dewanti

Nomor Induk Mahasiswa : 105030507111010

Tempat, tgl lahir : Blitar, 19 September 1991

Email : vandadewanti@gmail.com

Pendidikan formal : 1. SDN Babadan 1 Tamat tahun 2004
 2. SMP Negeri 1 Wlingi, Tamat tahun 2007
 3. SMA Negeri 1 Garum, Tamat tahun 2010

Pendidikan Non-Formal : 1. DAT *Professional Level*
 2. *Preparation* TOEIC
 3. IC3 Certiport

Pengalaman Kerja : Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten
 Malang (Magang)



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Sutomo Nomor 53 Telepon/Faximile (0342) 801243
E-mail : badan.kesbang@blitarkab.go.id

BLITAR

SURAT IZIN

Nomor : 072/98/409.202/2014

- Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor: 3633/UN.10.3/PG/2014 tanggal - April 2014 perihal Riset/Survey
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Kabupaten Blitar.

Diizinkan untuk melakukan kegiatan survei, penelitian, pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan kepada :

Nama : ALVANDA CHRISNA DEWANTI
Alamat : Jln. MT. Haryono No. 163 Malang
Judul Kegiatan : Penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan
Lokasi : Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar
Waktu : Tanggal 22 April sampai dengan 23 Juli 2014
Bidang Kegiatan : Penelitian
Nama Penanggungjawab/Koordinator : TRISNAWATI, S.Sos,M.AP
Anggota/Peserta : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan Pemerintah Desa setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas;
5. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi/tempat kegiatan;
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukannya kegiatan survei, penelitian pendataan, pengembangan, pengkajian dan studi lapangan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil-hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada :
 1. Bupati Blitar cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar;
 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait.
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah serta hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada Tanggal : 17 April 2014



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Blitar (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Camat Wlingi
3. Sdr. Kepala Desa Ngadirenggo



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN WLINGI
KEPALA DESA NGADIRENGGO
JL. MASTRIP NO : 08 Telp. (0342) Kode Pos 66184
NGADIRENGGO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 266 / VI / 409.056.07 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar menerangkan bahwa :

1. N a m a : ALVANDA CHRISNA DEWANTI
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. A l a m a t : Jln. MT. Haryono No.163 Malang

Orang tersebut di atas telah melaksanakan kegiatan suvei, penelitian dan pendataan di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar.

Demikian surat keterangan ini untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngadirenggo, 30 Juni 2014

Kepala Desa

ADY SUTRISNO